



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021-2026**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepahiang



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pasal 270 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahang Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penedalialan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keunangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 08).

Dengan Pertujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai tahun 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan

pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Provinsi.
9. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan untuk digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.
11. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pasal 2

- (1) RPJMD berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Periodisasi pembangunan jangka menengah daerah adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- (2) Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun RKPD dan pedoman untuk penyusunan kebijakan APBD.

BAB III SISTEMATIKAN RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan Keuangan Daerah.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan pembangunan daerah dan berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan program dari setiap strategi terpilih.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

- (2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2021-2026 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2022 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal : 26 Agustus 2021



Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 26 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 23
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU NOMOR:

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	I
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD.....	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	6
1.4. Maksud Dan Tujuan	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	9
2.1. Aspek Geografis Dan Demografi.....	18
2.1.1.Aspek Geografi	18
2.1.2.Aspek Demografi.....	28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	31
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	43
2.2.3 Fokus Kesenian Budaya Dan Olahraga.....	48
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	49
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dengan Layanan Dasar.....	49
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	61
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	76
2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	80
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	87

	2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	88
	2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	90
	2.4.3 Fokus Iklim Investasi.....	90
	2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	92
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang	109
2.6	Capaian SPM Kabupaten Kepahiang	127
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	144
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	146
	3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	147
	3.1.2 Belanja Daerah.....	154
	3.1.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	158
	3.1.4 Pembiayaan	161
	3.1.5 Neraca Daerah	166
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	177
	3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	180
	3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	184
3.3	Kerangka Pendanaan.....	189
	3.3.1 Proyeksi Pendapatan Dan Belanja.....	190
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	200
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	200
4.2	Isu Strategis Nasional Dan Pembangunan Daerah.....	213
	4.2.1 RPJMM 2020 – 2024	213
	4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026	215
	4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kepahiang	227

	Tahun 2021 – 2026	
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	235
	5.1 Visi.....	235
	5.2 Misi.....	237
	5.3 Tujuan Dan Sasaran.....	538
	5.4 Prioritas Daerah Dan Program Prioritas Daerah	409
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	412
	6.1 Strategi Pembangunan Daerah.....	412
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	416
	6.3 Program Pembangunan Daerah.....	425
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	446
	7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	446
	7.2 Program Perangkat Daerah.....	449
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	490
BAB IX	PENUTUP.....	519

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026 Dengan RPJMM Tahun 2020 – 2024	7
Tabel 1.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026 Dengan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 – 2025	9
Tabel 1.3 Keselarasan Fokus Pembangunan RPJPD Tahap IV Dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021 – 2026.....	10
Tabel 1.4 Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021 – 2026 Dengan KLHS	13
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2019	20
Tabel 2.2 Suhu Dan Kelembaban Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	21
Tabel 2.3 Kecepatan Angin, Tekanan Udara Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020	21
Tabel 2.4 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan Dan Penyinaran Matahari Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020	22
Tabel 2.5 Wilayah Rawan Bencana Di Kabupaten Kepahiang	23
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020	29
Tabel 2.7 Persentase Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.8 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepahiang (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kepahiang (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020	33
Tabel 2.11 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020	34
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kepahiang (Persen) 2017-2020.....	35
Tabel 2.13 Laju Indeks Implisit PDRB Atas Dsar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Kepahiang (Persen) 2017-2020.....	36
Tabel 2.14 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Di Kabupaten Kepahiang (Miliar Rupiah) 2015-2019.....	36
Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Di Kabupaten Kepahiang (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019.....	37
Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2019.....	37

Tabel 2.17	PDRB Per Kapita Kabupaten Kepahiang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 2.18	Laju Inflasi Implisit Kabupaten Kepahiang Menurut Sektor Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 2.19	Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 2.20	Persentase Dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.21	Garis Kemiskinan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	42
Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 2.23	Perkembangan Angka Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	45
Tabel 2.24	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020...	45
Tabel 2.25	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	46
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Ibu Melahirkan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	47
Tabel 2.27	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepahiang.....	47
Tabel 2.28	Capain Indikator Kebudayaan Dan Organisasi Kepemudaan Di Kabupaten Kepahiang.....	48
Tabel 2.29	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kepahiang Tahu 2016-2020.....	50
Tabel 2.30	Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	50
Tabel 2.31	Jumlah Guru Dan Murid Jenjang Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	51
Tabel 2.32	Angka Kelulusan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	51
Tabel 2.33	Rapor Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020.....	52
Tabel 2.34	Rapor Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020.....	53
Tabel 2.35	Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	54
Tabel 2.36	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	56
Tabel 2.37	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	58
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	58
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman.....	59
Tabel 2.40	Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Kepahiang.....	60
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	61
Tabel 2.42	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja.....	62
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	63
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kepahiang Tahun	64

	2016-2020.....	
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	65
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan Dan Capil Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	66
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	67
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	67
Tabel 2.49	Capain Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	68
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	69
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	70
Tabel 2.52	Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	71
Tabel 2.53	Penanaman Modal Asing Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020.....	71
Tabel 2.54	Peraturan Yang Mendukung Iklim Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	71
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	72
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	74
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	75
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	75
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	76
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	77
Tabel 2.63	Produksi Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	78
Tabel 2.64	Realisasi Indkator Urusan Pertanian Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	79
Tabel 2.65	Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	79
Tabel 2.66	Realisasi Indikator Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	80
Tabel 2.67	Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	81
Tabel 2.68	Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Keuangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	83

Tabel 2.69	Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	84
Tabel 2.70	Nilai SAKIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	85
Tabel 2.71	Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	85
Tabel 2.72	Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	86
Tabel 2.73	Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Kesbang dan Poldagri Tahun 2016-2020.....	87
Tabel 2.74	Pengeluaran Rata – Rata Perkapita Menurut Kelompok Makanan..	88
Tabel 2.75	Nilai Tukar Petani Tahun 2016 – 2018.....	89
Tabel 2.76	Daftar Penerbitan Izin di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020.....	90
Tabel 2.77	Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020	93
Tabel 2.78	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.....	94
Tabel 2.79	Kesesuaian Anatara RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang.....	110
Tabel 2.80	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	112
Tabel 2.81	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	129
Tabel 2.82	Permasalahan dan Solusi Penerpan SPM Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	130
Tabel 2.83	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	132
Tabel 2.84	Permasalahan Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020.....	133
Tabel 2.85	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	136
Tabel 2.86	Permasalahan Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020.....	137
Tabel 2.87	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	138
Tabel 2.88	Permasalahan Dalam Penerapan SPM Bidang perumahan Rakyat Tahun 2020.....	138
Tabel 2.89	Realisasi Capaian SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	140
Tabel 2.90	Permasalahan Dalam Penerapan SPM Keamanan, Ketertiban Umum Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	141
Tabel 2.91	Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	142
Tabel 2.92	Permasalahan Dalam Penerapan SPM Keamanan, Ketertiban Umum Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020.....	143
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun	150

	Anggaran 2016-2020*).....	158
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	158
Tabel 3.3	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepahiang TA 2016-2020 (dalam juta).....	160
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Kepahiang.....	163
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	168
Tabel 3.6	Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020.....	172
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Kepahiang TA. 2021-2026.....	181
Tabel 3.8	Analisis Proposal Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kepahiang 2016 s/d 2020.....	183
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang.....	185
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang....	186
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kepahiang.....	187
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 s/d Tahun 2026.....	191
Tabel 3.13	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang	198
Tabel 3.14	Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang	199
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	201
Tabel 5.1	Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Kepala Daerah Dengan Tujuan Organisasi Perangkat Daerah.....	239
Tabel 5.2	Visi Misi Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Kepahiang Maju Mandiri Sejahtera Dan Berdaya Saing.....	402
Tabel 5.3	Keterkaitan Antara Isu Strategis, Prioritas Daerah Dan Program Prioritas Daerah.....	410
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Kepahiang.....	413
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Kabupaten Kepahiang.....	421
Tabel 6.3	Pencapaian Sasaran Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.....	426
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 s/d Tahun 2026.....	447
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kepahiang.....	452
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepahiang.....	492
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.....	493

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020	29
.....	
Grafik 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang (milyar rupiah), 2016.....	32
Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang (persen), 2017-2020.....	32
Grafik 2.4 Perbandingan IPM Antar Kabupaten Provinsi Bengkulu Tahun 2020.....	44
Grafik 3.1 Perkembangan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepahiang.....	156
Grafik 3.2 Aset Lancar Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	173
Grafik 3.3 Investasi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	174
Grafik 3.4 Total Aset Tetap Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	175
Grafik 3.5 Kewajiban Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	176
Grafik 3.6 Ekuitas Kabupaten Kepahiang 2016-2020.....	177
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kepahiang 2016 – 2020.....	194

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Keterkaitan Rancangan Awal RPJMD terhadap Penyusunan dokumen RPJMD.....	6
Gambar 6.1 Perencanaan Strategik dan Perencanaan Operasional.....	417

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan awal, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah menyusun Perda RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026 memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2005–2025.

Perda RPJMD ini mencakup tahapan IV pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepahiang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, yang memprioritaskan Kabupaten Kepahiang yang Sejahtera, Adil, Demokratis Terdepan Dalam Industri, Pariwisata yang Berbasis pada Pertanian, Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Bertaqwa, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat Kabupaten Kepahiang. Selain itu, Perda ini juga

memperhatikan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2019 dan masukan dari para pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Perda RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya akan melalui beberapa tahapan penyempurnaan hingga menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepahiang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan peningkatan kinerja melalui inovasi daerah. Hal ini juga akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran inovasi daerah akan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dipandang perlu dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan yang telah menjadi visi Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026.

Namun, dalam upaya pencapaian penyelenggaraan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah, penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih menjadi tantangan yang nyata bagi pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pandemi COVID-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Masalah-masalah sosial ini banyak muncul dalam aspek pemerintah di

Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menurus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan COVID-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan-tantangan baru. Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepahiang harus mempunyai strategi dalam pemulihan ekonomi melalui arah-arrah kebijakan yang tepat dan memberikan stimulus bagi masyarakat serta mempertahankan kesinambungan perekonomian daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 -2025;

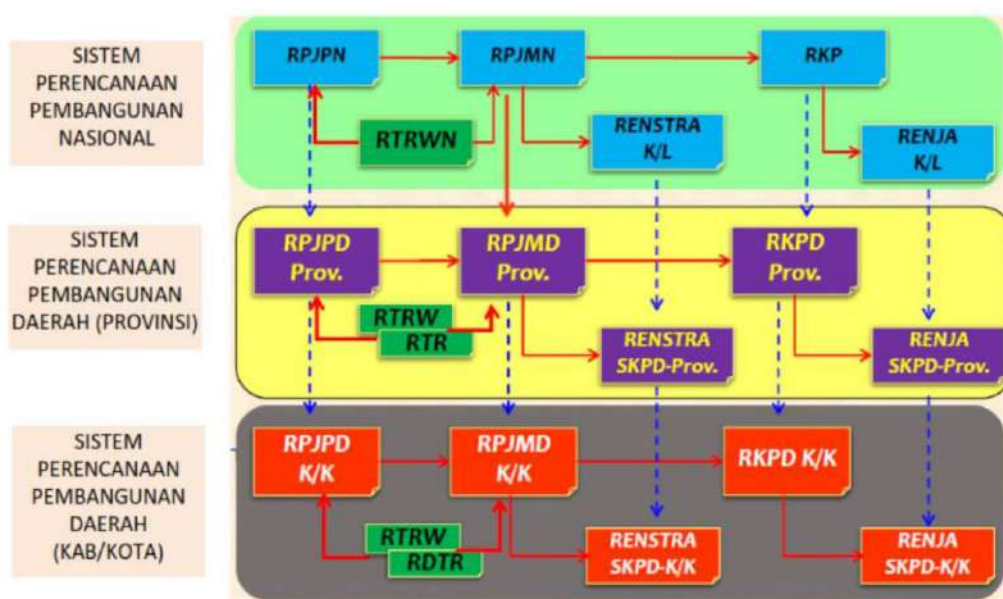
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat diperjelas sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelerasan

pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Tabel 1.1
Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
1	Misi I : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	Misi II : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum	PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan insfrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat	PN 5: Memperkuat Insfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
4	<p>Misi IV : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah</p>	<p>PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p>
5	<p>Misi V : Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya</p>	<p>PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan</p>

2. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah

Arah pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 mengikuti/ mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-2025) dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025.



Tabel 1.2
Keselarasn RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan
RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025

No	RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	RPJPD Kepahiang Bengkulu Tahun 2005-2025
1	<p style="text-align: center;">VISI</p> <p>Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing</p>	<p style="text-align: center;">VISI</p> <p>Masyarakat sejahtera, adil, dan demokratis yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan perekonomian yang kokoh yang berbasis agroindustri dan agrowisata</p>
2	<p>Misi I :</p> <p>Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan</p>	<p>Misi IV :</p> <p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDA)</p> <p>Misi VII : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan serta membangun kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan</p>
3	<p>Misi II :</p> <p>Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum</p>	<p>Misi I : Menerapkan Pelaksanaan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>)</p> <p>Misi II : Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supermasi hukum</p>
4	<p>Misi III :</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan insfrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat</p>	<p>Misi V :</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar</p>



No	RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	RPJPD Kepahiang Bengkulu Tahun 2005-2025
5	Misi IV : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah	Misi III : Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat Misi VI : Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agrowisata
6	Misi V : Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya	Misi VI : Memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan berbasis agroindustri terpadu dan agrowisata

Selain itu, Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari focus pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 tahap IV, sebagai berikut :

Tabel 1.3
Keselarasan Fokus Pembangunan RPJPD Tahap IV dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

No	Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahap IV (2020-2025)	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026
1	Pemantapan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain diberbagai bidang	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis 2. Peningkatan Mitigasi Bencana 3. Pelestarian Lingkungan Hidup
2	Pemantapan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kabupaten	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang 2. Peningkatan Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak



No	Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahap IV (2020-2025)	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026
3	<p>Kepahiang</p> <p>Pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan menekan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pengembangan UMKM, Koperasi dan Industri Rumah Tangga serta Pengembangan Komoditas Potensi Unggulan Daerah (Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata 2. Peningkatan Pertumbuhan Investasi 3. Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 6. Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan
4	<p>Pemantapan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah yang harus menjadi landasan pembangunan, baik dalam pembangunan SDM, ekonomi, pemerintah, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan hidup tata ruang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pengembangan UMKM, Koperasi dan Industri Rumah Tangga serta Pengembangan Komoditas Potensi Unggulan Daerah (Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026 menjadi pedoman/ acuan para PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026. Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabiarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran

pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Selanjutnya RPJMD sebagai pedoman dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepahiang dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang.

Rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang mengakomodir program/kegiatan/kebijakan dari rencana pembangunan lain yang telah lebih dulu ditetapkan atau secara hierarki lebih tinggi. Keterpaduan rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi hal yang mutlak dilakukan demi pencapaian kualitas pembangunan di suatu kawasan/daerah.

4. RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup



Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

Tabel 1.4
Keselarasan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dengan KLHS

No	RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026
1	Misi I : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia, Tingginya Kemiskinan dan Rendahnya Keberdayaan Masyarakat
2	Misi II : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum	Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Kepemerintahan dan Pemerintahan Desa, dan Belum Efektifnya Reformasi Birokrasi
3	Misi III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan insfrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat	Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, dan Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan

No	RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026
4	Misi IV : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah	Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah
5	Misi V : Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya	Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah

1.4 Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dokumen RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan melalui penetapan program serta kegiatan prioritas daerah. RPJMD menjadi tolak ukur



pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati diukur dari pencapaian target RPJMD. Seluruh program prioritas selama lima tahun yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA PD.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang periode masa pemerintahan tahun 2021-2024 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam dokumen RENSTRA PD.
3. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang.
4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
6. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan

pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

7. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Kepahiang berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Perda RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 (lima) bab dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografis dan Demografis
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN



- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

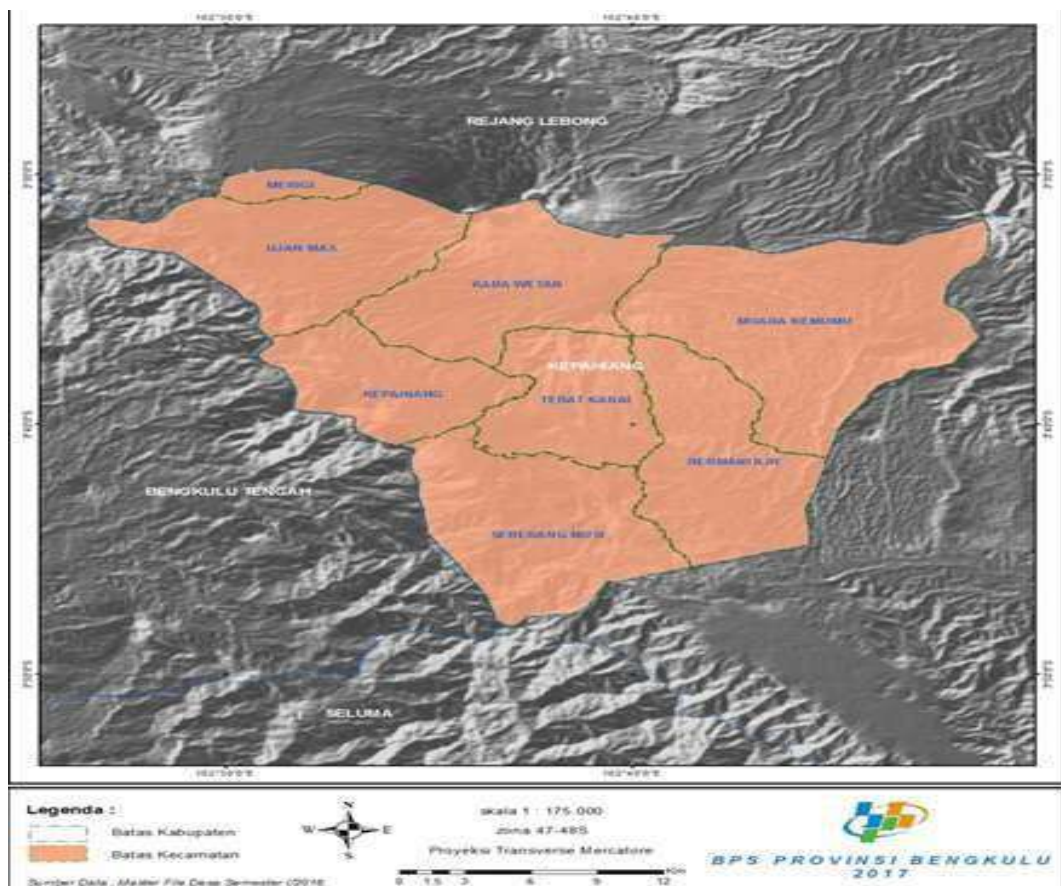
BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40 %), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.



Berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;

1. Karakteristik dan Wilayah

Kabupaten Kepahiang mempunyai luas 66.500 ha dan terdiri dari 8 Kecamatan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir 16.391 ha atau 24,65 % dari total keseluruhan Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Merigi yaitu 2.418 ha atau 3,64 % dari total luas Kabupaten Kepahiang. Kecamatan Kepahiang memiliki luas 7.192 ha atau 10,82%, Kecamatan Tebat Karai 7.688 ha atau 11,56%, Kecamatan Ujan Mas 9.308 ha atau 13,99%, Kecamatan Muara Kemumu 9.507 ha atau 14,29%, Kecamatan Seberang Musi 7.665 ha atau 11,52% dan Kecamatan Kabawetan 6.331 ha atau 9,52%. Sedangkan Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang. Rincian luas Kabupaten Kepahiang per Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2019

Kecamatan	Luas	
	Ha	Persentase
1	2	3
Muara Kemumu	9.507	14,29
Bermani Ilir	16.391	24,65
Seberang Musi	7.665	11,53
Tebat Karai	7.688	11,56
Kepahiang	7.192	10,82
Kabawetan	6.331	9,52
Ujan Mas	9.308	13,99
Merigi	2.418	3,64
Jumlah	66.500	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan tekstur tanahnya, Kabupaten Kepahiang sebagian bertekstur tanah sedang seluas 35.604 ha atau 53,54%. Sisanya sebanyak 22.630 ha atau 34,03% bertekstur halus dan seluas 8.266 ha atau 12,43% bertekstur kasar. Sebagian besar atau 75,01% wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada ketinggian 500 – 1.000 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian lainnya berada pada ketinggian 100 – 500 m dpl seluas 8.550 ha atau 12,86% dan 12,13% luas wilayahnya berada pada ketinggian lebih dari 1.000 m dpl atau seluas 8.071 ha. Sedangkan menurut kemiringan tanahnya, Kabupaten Kepahiang sebagian besar terletak pada lereng-lereng perbukitan dengan kemiringan lebih dari 40°, yaitu sebanyak 37,68%. Sementara 31,03% wilayah lainnya dengan kemiringan tanah 15° – 40°, 24,78 % dengan kemiringan 2° - 15° dan 6,51% dengan kemiringan 0° – 2°.

2. Iklim dan Kelembapan

Kabupaten Kepahiang terletak di wilayah perbukitan dengan iklim yang sejuk. Umumnya di wilayah ini sering terjadi hujan dengan tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi. Berikut pengamatan unsur iklim menurut bulan di Stasiun Geofisika Kabupaten Kepahiang Tahun 2020:

Tabel 2.2
Suhu dan kelembaban di Kabupaten Kepahang Tahun 2020

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humid (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	20,5	24,3	29,2	81	88	93
Februari/February	21,1	24,6	29,5	77	86	96
Maret/March	20,8	24,4	30	81	88	93
April/April	21,7	24,8	30,1	82	88	92
Mei/May	21,5	24,7	30	81	89	96
Juni/June	20,9	24,2	29,8	83	88	94
Juli/July	20,8	24,2	29,7	81	87	90
Agustus/August	20,2	24,3	30,2	76	85	94
September/September	20,4	24,3	29,8	76	83	91
Oktober/October	20,4	23,9	29	78	87	95
November/November	20,9	24,1	29,5	81	88	96
Desember/December	20,6	23,7	28,8	81	87	94

Sumber : BPS Kabupaten Kepahang

Tabel 2.3
Kecepatan Angin, Tekanan Udara
Di Kabupaten Kepahang Tahun 2020

Bulan Month	Kecepatan Angin (m/det) wind Veloc (m/sec)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mb)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum m	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/January	3,6	5,9	10,8	953,0	954,6	957,4
Februari/February	2,9	6,8	11,9	953,2	954,8	956,8
Maret/March	4,7	6,7	10,8	953,2	954,3	956,5
April/April	3,2	6,0	10,4	953,2	955,2	957,0
Mei/May	2,5	5,3	7,9	952,6	954,7	957
Juni/June	3,6	5,8	9,0	953,3	955,0	957,1
Juli/July	4,0	10,0	14,8	952,5	954,2	956,5
Agustus/August	3,2	8,0	13,7	952,7	954,8	957,7
September/September	4,7	8,5	17,6	953,2	955,3	957,7
Oktober/October	3,6	7,1	12,6	953	954,8	956,5
November/November	4,3	6,4	9,0	953,0	954,9	957,2
Desember/December	3,2	7,8	11,5	953,3	954,6	956,4

Sumber : BPS Kabupaten Kepahang

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

Bulan <i>Month</i>	Jumlah Curah Hujan <i>Number of Precipitation</i> (mm)	Jumlah Hari Hujan(hari) <i>Number of Rainy Days(day)</i>	Penyinaran Matahari <i>Duration of Sunshine</i> (%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/ <i>January</i>	516,7	29	2,6
Februari/ <i>February</i>	221	21	3,3
Maret/ <i>March</i>	356,2	25	3,9
April/ <i>April</i>	416,6	27	4,0
Mei/ <i>May</i>	302,4	24	3,2
Juni/ <i>June</i>	358,7	19	4,3
Juli/ <i>July</i>	69,3	21	5,2
Agustus/ <i>August</i>	48,3	17	1,5
September/ <i>September</i>	82,5	13	1,2
Oktober/ <i>October</i>	309,7	28	2,3
November/ <i>November</i>	455,4	26	2,8
Desember/ <i>December</i>	290	25	3,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

3. Rawan Bencana

Secara geomorfologi Kabupaten Kepahiang mempunyai dua karakter utama, yaitu dataran-dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi ini, maka Kabupaten Kepahiang termasuk wilayah yang rawan bencana.

Jenis bencana dan lokasi bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Wilayah Rawan Bencana Di Kabupaten Kepahiang

No	Jenis Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Banjir (Rawan Banjir)	Kecamatan Muara Kemumu	Desa Cinto Mandi
		Kecamatan Bermani Ilir	Desa Muara Langkap
			Desa Kembang Seri
		Kecamatan Ujan Mas	Desa Tanjung Alam
			Desa Air Hitam
		Kecamatan Merigi	Desa Pulogeto Baru
Kecamatan Tebat Karai	Desa Talang Karet		
2	Gerakakan Tanah	Berdasarkan kajian peta zona kerentanan gerakan tanah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang berpotensi mengalami bencana alam gerakan tanah	Gerakan tanah yang dimaksud meliputi : - Gerakan tanah tinggi - Gerakan tanah sedang - Gerakan tanah rendah
3	Gunung Berapi	Dilihat dari potensi bencana gunung berapi Bukit, Kabupaten Kepahiang berpotensi	
		1. Lahar Panas	a. Kecamatan Kabawetan (Hulu sungai air sempiang) b. Kecamatan Ujan Mas (Hulu sungai air durian) c. Kecamatan Bermani Ilir (Hulu sungai cinto mandi)
		2. Lahar Dingin	a. Kecamatan Kabawetan (Sungai air sempiang) b. Kecamatan Ujan Mas (Sungai air durian) c. Kecamatan Bermani Ilir (Sungai cinto mandi) d. Kecamatan Kepahiang (Sungai air sengkak)
		3. Hujan Abu	a. Kecamatan Merigi b. Kecamatan Ujan Mas c. Kecamatan Kabawetan d. Kecamatan Muara Kemumu
		4. Awan Panas	Kecamatan Kabawetan

		5. Gempa Vulkanik	Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, beerdasarkan fakta historis, Kecamatan Kabawetan mendapat perhatian lebih terhadap potensi bencana alam gempa bumi
4	Gempa Bumi (Tektonik)	Hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, beerdasarkan fakta historis, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Ujan Mas perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap potensi bencana alam gempa bumi.	
5.	Kekeringan	Kecamatan Tebat Karai	1. Desa Tebat karai 2. Kelurahan Tebat Karai
		Kecamatan Bermani Ilir	1. Desa Gunung Agung 2. Desa Kembang Seri
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	Kec. Bermani Ilir	1. Ds. Kembang Seri 2. Ds. Gunung Agung 3. Kel. Keban Agung
		Kec. Tebat Karai	1. Ds. Taba Air Pauh 2. Ds. Penanjung Panjang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang

4. Potensi Sumber Daya

Rencana pengembangan setiap kegiatan dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan, atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan yaitu bahwa penetapan peran dan fungsi kawasan perkotaan didasarkan potensi pada kondisi saat ini, baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan. Pertimbangan yang lebih penting adalah pada rencana pengembangan ke depan dalam

kurun waktu perencanaan, sedangkan sumberdaya yang ada serta kondisi saat ini menjadi pertimbangan selanjutnya. Rencana pengembangan pusat kegiatan di Kabupaten Kepahiang ini mengacu pada rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah Provinsi Bengkulu dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Kepahiang direncanakan terdiri atas 4 (empat) hirarki jenjang. Hirarki I yaitu (PKWp), hirarki II (PKL), hirarki III (PPK), hirarki IV (PPL). Adanya empat pusat kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota, pemerataan pelayanan dan pembangunan.

Pusat pelayanan di Kabupaten Kepahiang direncanakan mempunyai fungsi kegiatan yang jelas agar pusat kegiatan tersebut dapat berkembang dengan baik, pusat-pusat kegiatan tersebut adalah:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu tahun 2010-2030, ibukota Kabupaten Kepahiang yaitu Kota Kepahiang (kecamatan Kepahiang) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi. Hal ini berdasarkan kriteria penilaian sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Berdasarkan kondisi saat ini dan juga melihat kebutuhan pada saat mendatang, Kota Kepahiang tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai pusat kegiatan perkonomian bagi Kabupaten Kepahiang dan beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan semua fasilitas yang ada khususnya

untuk menunjang perekonomian dan sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan dan hasil sumberdaya alam lain di Kabupaten Kepahiang, untuk itu perlu ditingkatkan pelayanannya dengan memperbaiki dan menyempurnakan sistem pelayanan sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Beberapa fasilitas yang mendukung Kota Kepahiang sebagai PKWp, meliputi:

- Perkantoran Kabupaten;
- Pelayanan dan jasa penunjang kegiatan pemerintahan;
- Pusat pemerintahan kabupaten.
- Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten.
- Simpul transportasi untuk beberapa kabupaten .
- Pusat kegiatan Pertanian dan Perkebunan (teh) skala wilayah.
- Pariwisata Alam.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu ditetapkan bahwa ada 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Kepahiang yang melayani wilayah di Kabupaten Kepahiang, Pusat Kegiatan Lokal tersebut ditetapkan di Kecamatan Bermani Ilir yaitu Kota Keban Agung.

Kota Keban Agung berfungsi sebagai pusat perkantoran kecamatan, yang melayani beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, Kota Keban Agung memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa. Beberapa fasilitas yang mendukung Kota Keban Agung sebagai PKL pusat primer dengan fungsi jasa dan pemerintahan meliputi:

- Perkantoran Kecamatan;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- Pusat Perdagangan dan jasa skala lokal;
- Pusat Pertanian dan Perkebunan karet, kelapa sawit, kopi dan kelapa skala lokal.

3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk masa mendatang ditetapkan sebagai PKL promosi (dengan notasi PKLp). Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ruang kawasan perkotaan di Provinsi Bengkulu, sehingga ditetapkan PKL bagi Kabupaten Kepahiang adalah Kecamatan Bermani Ilir dengan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kota Ujan Mas Atas (Kecamatan Ujan Mas). Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK);

4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Merupakan pusat kegiatan yang melayani wilayah skala Kecamatan. Pada tingkat pusat pelayanan kawasan ini, Kabupaten Kepahiang terdiri dari 2 pusat, yaitu Penanjung Panjang di Kecamatan Tebat Karai, serta Durian Depun di Kecamatan Merigi. Beberapa fasilitas yang diperlukan untuk mendukung Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:

- Pemerintahan, yaitu seluruh instansi tingkat kecamatan;
- Perdagangan, yaitu pusat grosir, pusat pertokoan dan warung;
- Transportasi yaitu, sistem transportasi yang melayani transportasi antar wilayah;
- Pendidikan, yaitu sampai pendidikan SMA;
- Kesehatan yaitu fasilitas puskesmas, poliklinik, dan rumah

sakit bersalin;

- Fasilitas-fasilitas yang berfungsi untuk pelayanan dengan skala wilayah kecamatan.

5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL di Kabupaten Kepahiang ditetapkan pada;

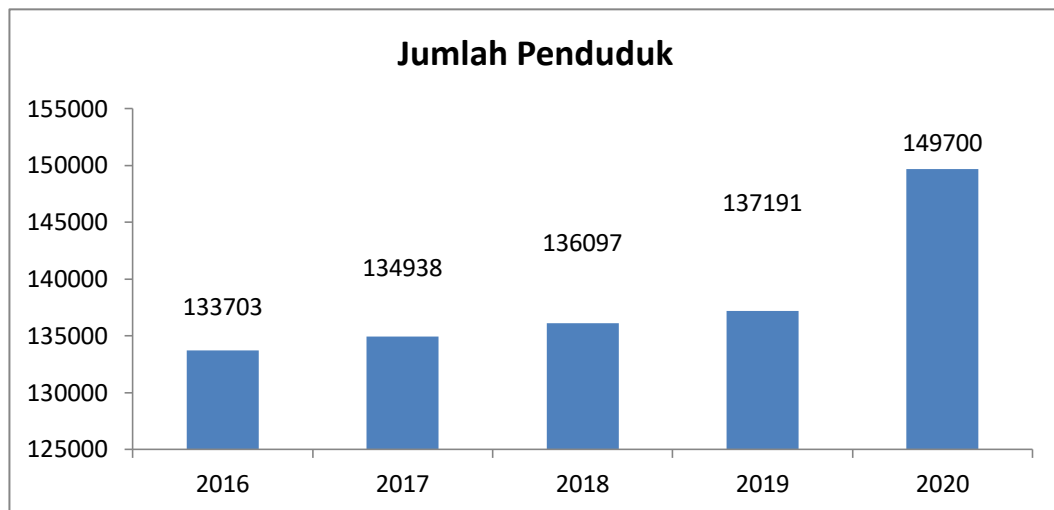
- Kota Batu Kalung di Kecamatan Muara Kemumu;
- Kota Tangsi Baru di Kecamatan Kabawetan;
- Kota Lubuk Saung di Kecamatan Seberang Musi.

2.1.2 Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 mencapai 149.737 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 137.190 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2019 sebesar 107. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, rasio jenis kelamin tertinggi adalah di Kecamatan Seberang Musi yaitu 114. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah ada di Kecamatan Kepahiang dan Merigi yaitu 105. Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang dari 15 tahun meski telah bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja sebagai bagian dari aspek demografi memiliki kecenderungan meningkat atau menurun sesuai perubahan yang dialami oleh penduduk. Hal ini dikarenakan faktor alamiah, yakni kelahiran, kematian, dan pergeseran jumlah penduduk. Angka pengangguran didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang tahun 2020 sebanyak 83.860 orang sedangkan tingkat pengangguran sebesar 2,5 persen.

Berdasarkan persebarannya, maka kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kepahiang dengan jumlah penduduk 50.700 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Seberang Musi yaitu sebanyak 7.800 jiwa.

Grafik 2.1
Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Muara Kemumu	Jiwa	12.676	12.697	12.711	12.717	14.000
2	Bermani Ilir	Jiwa	13.945	13.970	13.985	13.993	14.800
3	Seberang Musi	Jiwa	6.566	6.577	6.584	6.588	7.800
4	Tebat Karai	Jiwa	13.608	13.770	13.926	14.074	14.800
5	Kepahiang	Jiwa	44.298	44.885	45.448	45.991	50.700
6	KabaWetan	Jiwa	11.456	11.578	11.699	11.803	12.900
7	Ujan Mas	Jiwa	20.001	20.082	20.150	20.206	22.800
8	Merigi	Jiwa	11.153	11.379	11.600	11.819	11.900
Total			133.704	134.938	136.097	137.191	149.700

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang



Tabel 2.7
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km²
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
		% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²	% Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²
1	Muara Kemumu	9,48	133	9,41	134	9,34	134	9,27	134	9,32	147
2	Bermani Ilir	10,43	85	10,35	85	10,28	85	10,20	85	9,90	90
3	Seberang Musi	4,91	86	4,87	86	4,84	86	4,80	86	5,20	102
4	Tebat Karai	10,18	177	10,20	179	10,23	181	10,26	183	9,85	192
5	Kepahiang	33,13	616	33,26	624	33,40	632	33,52	640	33,87	705
6	Kaba Wetan	8,57	181	8,58	183	8,59	185	8,60	186	8,64	204
7	Ujan Mas	14,96	215	14,88	216	14,80	216	14,73	217	15,24	245
8	Merigi	8,34	461	8,43	471	8,52	480	8,62	489	7,98	494
Total		100	100	201	100	203	100	205	100	100	225

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.8
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Muara Kemumu	1,12	112	112	112,28	107
2	Bermani Ilir	1,08	108	108	107,71	109
3	Seberang Musi	1,12	112	112	111,98	114
4	Tebat Karai	1,03	103	103	102,69	107
5	Kepahiang	1,02	102	102	101,94	105
6	Kaba Wetan	1,06	106	106	106,11	108
7	Ujan Mas	1,02	102	102	102,37	106
8	Merigi	1,03	102	102	102,41	105
Total		1,05	104	104	104,45	107

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap Pertumbuhan PDRB, Pendapatan Perkapita, Laju Inflasi, Indeks Gini, dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Sementara itu untuk analisis terhadap fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni dan olah raga masing-masing dilakukan terhadap capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angkat Kematian Bayi, Angka Kematian ibu melahirkan, IPM, Tenaga Kerja serta perkembangan seni budaya dan olah raga di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketersediaan data.

2.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku telah mencapai 4.409,81 milyar rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2020 sebesar 2.805,56 milyar rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2020 atas dasar harga berlaku telah mengalami perkembangan harga sebesar 2,04 persen, sedangkan PDRB Kabupaten Kepahiang tahun 2020 atas harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 0,06 persen.

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang hingga tahun 2020 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai leading sector dalam perekonomian Kabupaten Kepahiang masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai nominal PDRB sektor

pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 1.748,6 milyar rupiah dan peranannya dalam PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 39,65 persen. Kemudian diikuti sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (tergabung di sektor jasa-jasa) dengan nilai nominal atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 742,01 milyar dengan peran sebesar 16,83 persen.

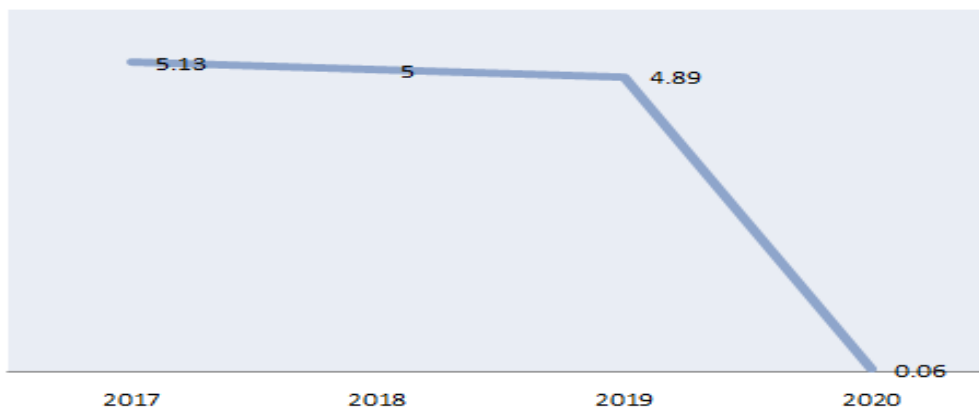
Pada tahun 2020 nilai PDRB perkapita Kabupaten Kepahiang atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar 0,03 milyar rupiah. Nilai PDRB per kapita ini cenderung terus meningkat setiap tahunnya.

Grafik 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang (miliar rupiah), 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang (persen), 2017-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang



Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Kepahiang (miliar rupiah), 2016-2020

NO	SEKTOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1402.62	1515.51	1612.93	1716.15	1748.6
2	Pertambangan dan Penggalian	75.56	80.43	88.05	96.09	95.29
3	Industri Pengolahan	245.5	277.81	303.89	324.39	329.29
4	Pengadaan Listrik, Gas	4.24	5.11	5.83	6.62	7.53
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.1	5.56	6.12	6.75	6.93
6	Konstruksi	184.77	210.68	237.9	266.88	271.2
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	289.65	331.08	376.09	418.77	409.45
8	Transportasi dan Pergudangan	76.6	82.35	91.42	102.28	108.51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.43	67.09	78.42	88.1	89.58
10	Informasi dan Komunikasi	62.13	69.33	77.12	85.15	89.43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	41.01	44.38	45.77	47.04	52.99
12	Real Estate	105.81	115.76	127.09	135.7	137.32
13	Jasa Perusahaan	4.18	4.85	5.39	5.92	5.85
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	502.88	577.64	647.08	716.42	742.01
15	Jasa Pendidikan	164.3	180.12	198.55	214.32	219.49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	40.96	47.57	54.98	62.49	67.88
17	Jasa lainnya	18.51	21.91	24.87	28.18	28.38
	PDRB	3280.55	3637.17	3981.49	4321.25	4409.81

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.10
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Kepahiang (miliar rupiah), 2016-2020

NO	SEKTOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1057.91	1091.9	1127.99	1168.49	1165.15
2	Pertambangan dan Penggalian	61.67	62.4	65.03	67.71	66.45
3	Industri Pengolahan	187.54	196.75	207.73	213.69	207.46
4	Pengadaan Listrik, Gas	3.32	3.55	3.82	4.12	4.6

5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.3	4.37	4.58	4.81	4.83
6	Konstruksi	124.92	130.89	141.05	152.36	152.26
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	228.83	247.96	266.48	285.07	275.75
8	Transportasi dan Pergudangan	63.23	67.61	72.96	79.35	80.28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.08	48	51.82	56.11	55.75
10	Informasi dan Komunikasi	47.91	51.96	56.04	59.92	62.25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.63	29.15	29.41	29.57	33.51
12	Real Estate	83.94	89.8	93.44	96.86	97.46
13	Jasa Perusahaan	3.37	3.63	3.82	4.01	3.93
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	313.72	338.45	360.52	386.09	393.75
15	Jasa Pendidikan	125.12	132.48	137.58	142.8	144.65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	29.25	31.7	34.25	37.05	39.45
17	Jasa lainnya	13.99	15.38	16.63	18.07	1803
	PDRB	2421.17	2545.97	2673.15	2806.09	2805.56

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang, 2016-2020

NO	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB menurut Lapangan usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,76	41,67	40,51	39,66	39,65
2	Pertambangan dan Penggalian	2,30	2,21	2,21	2,22	2,16
3	Industri Pengolahan	7,48	7,64	7,63	7,51	7,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,14	0,15	0,15	0,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16
6	Konstruksi	5,63	5,79	5,98	6,18	6,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,83	9,10	9,45	9,70	9,29
8	Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,26	2,30	2,39	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	1,84	1,97	2,04	2,03
10	Informasi dan Komunikasi	1,89	1,91	1,94	1,97	2,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	1,22	1,15	1,09	1,20
12	Real Estate	3,23	3,18	3,19	3,14	3,11

13	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,33	15,88	16,25	16,59	16,83
15	Jasa Pendidikan	5,01	4,95	4,99	4,96	4,98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,31	1,38	1,45	1,54
17	Jasa lainnya	0,56	0,60	0,62	0,65	0,64
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepahiang (persen), 2017-2020

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.8	3.21	3.31	3.39	-0.1
2	Pertambangan dan Penggalian	2.67	1.2	4.21	4.13	-1.87
3	Industri Pengolahan	5.35	4.91	5.58	2.87	-2.92
4	Pengadaan Listrik, Gas	17.6	6.87	7.74	7.92	11.6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.74	1.65	4.72	4.95	0.58
6	Konstruksi	5.63	4.78	7.76	8.02	-0.07
7	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Sepeda Motor	7.79	8.36	7.47	6.98	-3.27
8	Transportasi dan Pergudangan	7.31	6.94	7.9	8.76	1.17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.99	8.98	7.96	8.28	0.64
10	Informasi dan Komunikasi	6.26	6.99	4.05	3.66	3.89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.58	1.8	0.91	0.52	13.4
12	Real Estate	6.26	6.99	4.05	3.66	0.62
13	Jasa Perusahaan	7.61	7.69	5.22	4.99	-2.21
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.34	7.88	6.52	7.09	1.98
15	Jasa Pendidikan	8.75	5.88	3.85	3.8	1.29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	8.53	8.36	8.05	8.17	6.47
17	Jasa lainnya	9.04	9.9	8.15	8.65	-0.21
	PDRB	5.63	5.13	5	4.97	0.06

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.13
Laju Indeks Implisit PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Kepahiang (persen), 2017-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,56	4,69	2,89	2,71	2,19
B	Pertambangan dan Penggalian	5,52	5,19	5,04	4,81	1,06
C	Industri Pengolahan	6,54	7,86	3,61	3,77	4,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,34	12,73	5,95	5,23	1,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,30	7,41	5,07	4,99	2,11
F	Konstruksi	6,47	8,82	4,79	3,85	1,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	4,33	5,48	5,70	4,08	1,08
H	Transportasi dan Pergudangan	1,72	0,53	2,88	2,86	3,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,37	9,20	8,26	3,75	2,34
J	Informasi dan komunikasi	2,65	2,87	3,14	3,27	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,73	6,31	2,20	2,26	(0,61)
L	Real Estate	5,39	2,25	5,52	3,01	0,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,53	5,70	4,57	0,98
O	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan	6,67	6,47	5,16	3,33	1,56
P	Jasa Pendidikan	4,36	3,54	6,14	3,99	1,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,58	7,19	6,96	5,09	2,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,31	7,72	4,96	4,29	0,90
PDRB		5,90	5,17	5,46	3,39	2,04

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten
Kepahiang (miliar rupiah), 2015-2019

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ²	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	1 974,28	2 165,94	2 340,06	2 530,81	2 733,43	2 778,16

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ²	2020
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	91,16	98,23	107,73	117,58	130,95	123,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	521,26	572,23	618,23	668,01	709,80	729,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1 369,62	1 531,42	1 653,42	1 784,78	1 916,39	1944,40
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	116,86	109,91	114,03	40,29	88,79	81,74
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	(1 120,21)	(1 197,19)	(1 196,30)	(1 159,97)	(1 258,11)	(1247,76)
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	2 952,97	3 280,55	3 637,17	3 981,49	4 321,25	4409,81

Sumber : BPS Kabupaten Kepahang

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kepahang (miliar rupiah), 2015–2019

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2015	2016	2017	2018 ¹	2019 ²	2020 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	1 430,18	1 505,61	1 586,89	1 672,94	1 760,50	1761,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	74,15	77,35	81,35	86,97	93,67	86,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	387,34	397,20	405,20	428,68	447,26	448,76
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1 119,40	1 186,33	1 243,63	1 293,85	1 357,23	1334,60
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	62,87	57,44	56,87	25,76	18,44	23,58
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	(781,30)	(802,20)	(827,97)	(835,05)	(871,00)	(850,01)
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	2 292,65	2 421,73	2 545,97	2 673,15	2 806,09	2805,56

Sumber : BPS Kabupaten Kepahang

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Kepahang, 2016–2019

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2016	2017	2018 ¹	2019 ²	2020 ²
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	5,27	5,40	5,42	5,17	0,13
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	4,31	5,17	6,91	6,56	-6,20

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	2,54	2,01	5,79	4,33	0,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5,98	4,83	4,04	4,90	-1,67
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Exports of Goods and Services</i>	4,94	4,47	2,93	-	-
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,63	5,13	5,00	4,89	0,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahang

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Kabupaten Kepahang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	2	3	4	5
2016	24.54	18.11	10,02	4,61
2017	26.95	18.87	9,86	4,17
2018	29.25	19.64	8,53	4,10
2019	31.50	20.45	7,68	4,11
2020	31.91	20.30	1,30	-0.73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahang

PDRB per kapita atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu wilayah yang dinilai terhadap harga produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar (2010), sedangkan PDRB atas harga berlaku merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB dapat juga dikatakan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk yang dinilai dengan menggunakan harga produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Pendapatan Perkapita di Kabupaten Kepahang dalam struktur ekonomi atas dasar harga berlaku Tahun 2020 tercatat 29.45 juta rupiah atau turun sebesar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan pendapatan



perkapita berdasarkan harga konstan naik sebesar 1.71 persen atau mencapai 18.74 juta rupiah.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Selain untuk menghitung kinerja perekonomian, angka PDRB dapat juga digunakan untuk mengestimasi laju inflasi. Angka yang diperoleh akan berbeda dengan data inflasi yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK), karena data yang digunakan adalah data harga produsen. Untuk mengetahui laju inflasi/deflasi, maka yang perlu diketahui adalah *Indeks Implisit* yaitu indeks PDRB yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan harga (inflasi/deflasi) menurut masing-masing indikator lapangan usaha, dimana Indeks Implisit merupakan perbandingan antara nilai tambah bruto atas harga berlaku tahun tertentu dengan nilai tambah bruto atas harga berlaku konstan pada tahun tertentu. Dengan demikian, dapat dihitung perkembangan harga, jika positif berarti telah terjadi inflasi dan sebaliknya bila negatif berarti terjadi deflasi.

Tabel 2.18
Laju Inflasi Implisit Kabupaten Kepahiang
Menurut Sektor Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018*)	2019*)	2020*)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,56	4,69	2,89	2,71	2,19
B	Pertambangan dan Penggalian	5,52	5,19	5,04	4,81	1,06
C	Industri Pengolahan	6,54	7,86	3,61	3,77	4,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,34	12,73	5,95	5,23	1,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	4,30	7,41	5,07	4,99	2,11
F	Konstruksi	6,47	8,82	4,79	3,85	1,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	4,33	5,48	5,70	4,08	1,08
H	Transportasi dan Pergudangan	1,72	0,53	2,88	2,86	3,87

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,37	9,20	8,26	3,75	2,34
J	Informasi dan komunikasi	2,65	2,87	3,14	3,27	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,73	6,31	2,20	2,26	(0,61)
L	Real Estate	5,39	2,25	5,52	3,01	0,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,53	5,70	4,57	0,98
O	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan	6,67	6,47	5,16	3,33	1,56
P	Jasa Pendidikan	4,36	3,54	6,14	3,99	1,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,58	7,19	6,96	5,09	2,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,31	7,72	4,96	4,29	0,90
PDRB		5,90	5,17	5,46	3,39	2,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tentang Gini Ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila Gini Ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, dikategorikan ketimpangan sedang apabila Gini Rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya dikategorikan ketimpangan tinggi apabila Gini Rationya lebih besar dari 0,5. Berikut dapat disajikan perkembangan Gini Ratio Kabupaten Kepahiang untuk kurun waktu 2016 – 2020 pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Gini Ratio
1	2	3
1	2016	0,30
2	2017	0,33
3	2018	0,30
4	2019	0,27
5	2020	0,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

2.2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di dunia, dilaporkan sekitar seperenam populasi penduduk atau sekitar satu miliar orang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Mereka mengalami masalah seperti: kekurangan gizi, kesehatan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya untuk mempertahankan hidup. Secara nasional tingkat kemiskinan pada 2020 mencapai titik terendah, yaitu sebesar 9,78 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) per maret 2020 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019. Dibandingkan September 2019 jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020)

Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp. 454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 118.859,- (26,14 persen).

Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678 ,-/rumah tangga miskin/bulan. Persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Kepahiang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Masyarakat Miskin (%)	16,31	15,95	14,42	14,74	14,69
Jumlah Masyarakat Miskin (jiwa)	21,750	21,467	19,582	20,182	20,270

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah survei sosial ekonomi nasional panel modul konsumsi dan KOR.

Tabel 2.21
Garis Kemiskinan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp)	N/A	348,238	361,281	374,568	396,184

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Garis kemiskinan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebesar 396.184, artinya penduduk Kabupaten Kepahiang termasuk kedalam kategori miskin jika pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 396.184. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak dll). Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya adalah:

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report*.

Salah satu indikator keberhasilan pencapaian dalam konteks kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM mencerminkan gambaran akumulatif dari hasil pembangunan. Hal ini mengingat komponen IPM adalah indeks komposit yang merupakan rata-rata gabungan dari 3 (tiga) komponen penilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Masing-masing indeks dari komponen IPM memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan selama ini di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Kepahiang sebesar 67.67 dan pada tahun 2020 IPM Kabupaten Kepahiang mengalami kenaikan sebesar 68.17 Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan diukur dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk. Dibidang

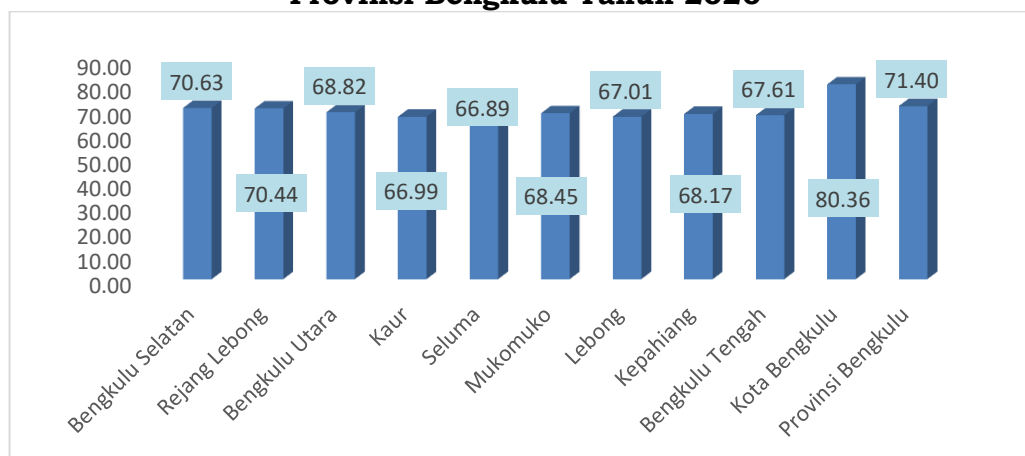
kesehatan diukur dari angka Harapan Hidup (AHH) , Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indeks pembangunan dibidang daya beli, diukur oleh rata-rata pendapatan. Perkembangan IPM Kabupaten Kepahiang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7
Indeks Pembangunan Manusia	66.35	66.60	67.14	67.67	68.17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Grafik 2.4
Perbandingan IPM Antar Kabupaten
Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Bengkulu

2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Ukuran lain dari tingkat pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Pada Tahun 2016 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kepahiang mencapai 7,83 Tahun, pada Tahun 2017 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kepahiang meningkat menjadi 7,84 tahun dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 7,93 Tahun sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,24 Tahun. Rincian peningkatan Angka



Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.83	7.84	7.92	7.93	8,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Nilai rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal, tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang, semakin tinggi RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

2.2.2.3 Angka Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepahiang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka harapan hidup sebesar 67,03 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 67,95 tahun.

Rincian peningkatan usia harapan hidup setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 2.24
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Angka Harapan Hidup	Tahun	67.03	67.12	67.39	67.78	67.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

2.2.2.4 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 sebanyak 3/100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2017 tetap 3/100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,3/100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2019 menurun menjadi 12,8/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 11/100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian bayi selama kurun waktu beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Angka Kematian Bayi	Per 100.000 kelahiran hidup	3	3	15,3	12,8	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

2.2.2.5 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian ibu melahirkan pada tahun 2016 sebanyak 79/100.000 ibu melahirkan, pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan 162/100.000 ibu melahirkan, pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan sehingga pada tahun 2018,



jumlah kematian ibu melahirkan mencapai 0/100.000 ibu melahirkan, pada tahun 2019 kembali meningkat sangat signifikan menjadi 177/100.000 ibu melahirkan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 81/100.000 ibu melahirkan. Berdasarkan kondisi lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada uraian tersebut, maka terkait dengan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Kepahiang terus mengalami fluktuasi sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk dapat terus menekan angka kematian ibu melahirkan sehingga angkanya terus mengalami penurunan.

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000	79	162	0	177	81

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

2.2.2.6 Tenaga Kerja

Tabel berikut merupakan gambaran penduduk yang berumur diatas 15 tahun yang dikelompokkan dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dari data tersebut tercatat 42.785 penduduk Kabupaten Kepahiang dengan status bekerja dan 1.007 orang pengangguran. Data jumlah Penduduk Berumur 15 keatas menurut Jenis Kegiatan Utama selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tabel 2.27
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepahiang

Jenis Kegiatan Utama	Jenis Kelamin / Sex		
	L	P	Total/ Total
1	2	3	4
Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i>			
a. Bekerja/ <i>Working</i>	46.079	35.599	81.678
b. Pengangguran / <i>Looking for work</i>	1.374	738	2.112
Bukan Angkatan Kerja / <i>Not Economically Active</i>	3.232	3.294	6.526



a. Sekolah / Attending	3.232	3.294	6.526
b. Mengurus Rumah Tangga / <i>House Keeping</i>	1.554	10.872	12.426
c. Lainnya / <i>Others</i>	2.085	1.254	3.339
TOTAL	3.232	3.294	6.526

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga

2.2.3.1 Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat berhubungan dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Kepahiang terdiri dari 8 Kecamatan 105 Desa dan 12 Kelurahan memiliki adat istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dimasyarakat sekaligus potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Berikut capaian indikator kebudayaan dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Kepahiang.

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kebudayaan Dan Organisasi Kepemudaan
Di Kabupaten Kepahiang

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Klub Olahraga	5	5	5	5	2
2	Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1
3	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	9	8
4	Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	15	15	11
5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	3	1
6	Jumlah Kegiatan Olahraga	2	1	3	1	11
7	Jumlah Prestasi di Bidang Olahraga	2	1	7	7	7
8	Jumlah Sanggar Kesenian	0	0	44	44	44
9	Jumlah Seni Musik	0	0	5	5	5

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang



2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib dengan Layanan Dasar

Capaian kinerja atas layanan urusan wajib layanan Dasar meliputi bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan merupakan salah satu kegiatan wajib Layanan Dasar Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam melaksanakan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang. Indikator kinerja yang ditampilkan dalam Urusan Pendidikan adalah :1) Angka Partisipasi Sekolah, 2)Ketersediaan Sekolah, Jumlah Guru dan Murid dan 4) Angka Kelulusan

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Pada Tahun 2019 APS SD/MI sebesar 99.10% APS SMP/MTs sebesar 98.00%. Perkembangan APS Kabupaten Kepahiang selama 4 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Angka Partisipasi Sekolah						
1	APS SD/MI	%	100	99,51	99,31	99,10	77,99
2	APS SMP/MTs	%	100	98,45	98,25	98,00	61,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat per jenjang usia sekolah yaitu usia SD dan SMP. Di Kabupaten Kepahiang angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD dengan APS sebesar 99,10%, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan APS SMP sebesar 98%. Dapat dilihat pada tabel diatas setiap tahunnya APS SD dan SMP di Kabuapten Kepahiang mengalami penurunan, hal ini dapat menjadi perhatian lebih bagi Kepala Daerah.

2) Ketersediaan Sekolah

Tabel 2.30
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Gedung SD dan SMP	unit	1.414	1.524	1.591	128	129
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	orang	15.165	15.279	15.388	14.529	15.541
3	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	orang	7.367	7.968	8.068	7.118	7.697

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang



3) Jumlah Guru dan Murid

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru	orang	1.042	1.039	944	1.036	1.181
1.2	Jumlah Murid	orang	14.753	14.663	14.299	13.782	13.082
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru	orang	443	492	438	436	505
2.2	Jumlah Murid	orang	5.442	5.675	5.827	4.889	5.617

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

4) Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.32
Angka Kelulusan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD/MI	%	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	%	99,91	99,96	99,86	99,84	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepahiang

Selain indikator – indikator yang telah disampaikan di atas, mutu pendidikan juga dinilai melalui peta mutu pendidikan yang berdasarkan

8 (delapan) standar nasional pendidikan. Peta mutu ini merupakan representasi visual profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan. Dengan peta mutu pendidikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kemampuan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Pengelolaan yang dilakukan diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai input dan nilai tambah. Berikut disampaikan detail rapor mutu pendidikan dasar di Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.33
Rapor Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Standar Nasional Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Standar Kompetensi Lulusan	indeks	4	5,42	6,09	6,99	5,05
2	Standar Isi	indeks	4,83	4,88	5,52	6,96	4,77
3	Standar Proses	indeks	4,87	5,66	6,3	6,99	4,4
4	Standar Penilaian Pendidikan	indeks	4,55	4,95	5,79	6,29	5,59
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	indeks	3,48	3,96	3,78	5,63	5,36
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	indeks	4,73	3,93	3,88	4,85	4,19
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	indeks	4,47	4,8	5,54	6,91	4,85
8	Standar Pembiayaan	indeks	3,77	5,2	5,74	6,64	5,13

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang)

Tabel 2. 34
Rapor Mutu Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Standar Nasional Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Standar Kompetensi Lulusan	indeks	4,67	5,65	6,21	6,99	5,02
2	Standar Isi	indeks	4,82	4,92	5,4	6,98	4,9
3	Standar Proses	indeks	4,73	5,84	6,26	6,99	4,79
4	Standar Penilaian Pendidikan	indeks	3,8	5,17	5,68	6,29	5,48
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	indeks	3,45	4,26	3,57	4,71	5,82
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	indeks	4,63	4,21	3,99	4,9	4,64
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	indeks	4,1	4,91	5,37	6,92	4,96
8	Standar Pembiayaan	indeks	3,81	5,35	5,57	6,64	5,4

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang)

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan merupakan merupakan salah satu kegiatan wajib layanan dasar Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Urusan kesehatan memiliki kontribusi sangat menentukan dalam melaksanakan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang.

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, maka program-program kesehatan diprioritaskan pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita.

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan penjangkauan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, screening faktor risiko penyakit tidak menular. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting

Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.35
Indikator Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepahang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,03	67,12	67,39	67,78	67,95
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000	79	162	0	177	81
3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100
4.	Angka Kematian	Per 1.000	3	3	15,3	12,8	11,8
5	Cakupan Desa/ Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	88,9	87,2	90,6	95,7	90,6
6	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	101,1	92,88	99,5	88	91

7	Rasio posyandu per satuan balita	Indeks	11,21	10,89	9,58	9,51	9,85
8	Persalinan di Fasyankes	%	92,7	92,58	81,1	82,6	83
9	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Indeks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	Indeks	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05
11	Rasio pustu per satuan penduduk	Indeks	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Indeks	0,074	0,074	0	0	0
13	Rasio dokter per satuan penduduk	Indeks	0,13	0,13	0,13	0,13	0,19
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
15	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,0007	0,005	0	0,008	0
16	Cakupan puskesmas	%	175	175	175	175	1,75
17	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	74,577	80,543	85,035	88,987	90,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun Indikator Kesehatan di Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* terus mengalami peningkatan, 87,2% pada tahun 2017, 90,6% tahun 2018, 95,7% tahun 2019, dan 90,6% pada tahun 2020. Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) juga meningkat dalam 2 tahun terakhir, 88% pada tahun 2019 dan 91% pada

tahun 2020. Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepahiang melalui peningkatan kinerja sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, pengawasan obat dan makanan), serta perlindungan finansial bagi penduduk.

Capaian selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan indikator kesehatan ibu yang direfleksikan dari indikator 4 kali kunjungan ANC (K4) dan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Proporsi pemeriksaan kehamilan K4 telah menunjukkan fluktuasi kenaikan dari 81,7% pada tahun 2016, 83,2% pada tahun 2019, namun menurun menjadi 80,8% pada tahun 2020. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan juga naik dari 82,6% pada tahun 2019 menjadi 83,1% pada tahun 2020.

Selain indikator di atas, Kabupaten Kepahiang juga meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sampai tahun 2020 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Tenaga Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokter umum	orang	12	12	14	12	11
2	Dokter gigi	orang	1	1	1	2	2
3	Perawat	orang	100	93	100	104	110
4	Perawat gigi	orang	1	1	1	1	2
5	Bidan	orang	11	14	12	17	23
6	Ahli gizi	orang	5	4	4	7	7
7	Sanitarian	orang	1	0	1	0	0

8	Asisten apoteker	orang	3	3	3	5	5
9	Analisis	orang	6	5	5	7	8
10	Penyuluh kesehatan	orang	0	0	1	1	1
11	Administrator Kesehatan	orang	0	0	0	0	0
12	Apoteker	orang	2	2	1	1	1
Jumlah		orang	142	135	143	157	170

Sumber : RSUD Kabupaten Kepahiang

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki fungsi penting dalam pelayanan dasar bagi masyarakat, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur dasar sebagai pendukung aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa infrastruktur dasar tersebut antara lain jalan, jembatan, irigasi, sanitasi dan sarana penyediaan air bersih.

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Kepahiang. Jaringan jalan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang sebagai perwakilan pemerintah dalam mengatur, memantau pembangunan dan peningkatan sarana jalan serta jembatan telah berusaha melakukan penambahan panjang jalan setiap tahunnya. Pada



tahun 2020 permukaan jalan ber aspal hotmix sepanjang 201,38 Km, jalan aspal lapen 184,77 Km, jalan kerikil 53,54 Km, jalan tanah 68,50 Km dengan total panjang 511,49 Km. Panjang jalan Kabupaten menurut jenis permukaan jalan dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.37
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aspal Hotmix/ <i>Hotmix Asphalt</i>	km	159,26	194,78	194,78	201,38	201,81
2	Aspal Lapen / <i>Lapen Asphalt</i>	km	186,28	153,34	173,37	168,77	184,77
3	Jalan Cor/ <i>Cor</i>	km	4,10	1,52	0	0	3,30
4	Kerikil/ <i>Split</i>	km	64,92	64,92	60,14	59,14	53,54
5	Tanah/ <i>Dirt</i>	km	96,93	96,93	82,20	82,20	68,50
6	Burda / <i>Reycling</i>	km	0	0	0	0	0
7	Tidak Dirinci/ <i>No Classification</i>	km	0	0	0	0	0
Jumlah/ Total			511,49	511,49	510,49	511,49	511,49

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	km	36,77	39,05	40,05	42,33	49,6
2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	m	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang

2.3.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan. Persentase rumah layak huni Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 sebesar 26,41 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 42,12 persen, pada tahun 2018 sebesar 41,82 persen, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 49,6 persen. Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	%	56,27	61,91	62,98	62,32	65,95
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	%	49,74	61,55	67,18	46,19	63,82
3	Persentase penduduk Yang terlayani akses air minum yang aman	%	19,29	22,59	25,55	28,75	29,67
4	Persentase rumah Layak huni	%	26,41	42,12	41,82	49,6	51,3

Sumber: (BPS Provinsi Bengkulu dan Dinas PU Kabupaten Kepahiang)



2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Jumlah polisi Pamong Praja pada tahun 2016 sebanyak 27 pegawai, pada tahun 2017 sebanyak 29 pegawai, pada tahun 2018 sebanyak 30 pegawai, dan pada tahun 2019 sebanyak 29 pegawai. Berdasarkan data tersebut, jumlah personil polisi Pamong Praja setiap tahunnya mengalami fluktuatif.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepahiang

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah polisi pamong praja	orang	27	29	30	29	24
2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	713	713	713	713	713
3	Jumlah penanganan unjuk Rasa	kali	1	1	1	1	1
4	Jumlah kegiatan pengamanan dalam setahun	kali	5	5	5	6	8
5	Persentase penegakan perda	%	90	90	90	80	90

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepahiang

2.3.1.6 Urusan Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PMKS yang tertangani	0	0	0	17 %	15,89%
2	Penyandang disabilitas	0	0	0	58 %	65,15%
3	Anak korban tindakan kekerasan/dalam panti asuhan	0	0	0	100%	67%
4	Persentase KUBE aktif	0	5%	15%	40%	60%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar

Urusan Wajib Non Layanan Dasar yang dilaksanakan Kabupaten Kepahiang meliputi :1) Tenaga kerja, 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 3) Pangan, 4) Lingkungan hidup, 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 8) Perhubungan, 9) Komunikasi & Informatika, 10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, 11) Penanaman modal, 12) Kepemudaan dan Olah Raga, 13) Statistik, 14) Persandian, 15) Kebudayaan, 16) Perpustakaan dan Kearsipan



2.3.2.1 Urusan Tenaga kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Indikator penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,89	73,80	75,48	77,24	79,48
2	Tingkat tenaga kerja pengangguran terampil	%	14,29	10,29	6,16	2,71	0,27
3	Angka pengangguran terbuka	Orang	4.370	3.470	2.181	1.981	0,821
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	10	30	95	171	191
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	100	115	130	1500	1700
6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	63,12	67,12	77,92	75,22	80,23
7	Jumlah lembaga pelatihan/penyiapan tenaga kerja	Lembaga	1	5	6	7	10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang

2.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, jumlah KDRT, persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terselesaikan dan tindak lanjut.

Persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2017 sebesar 5,68 persen, tahun 2018 sebesar 5,94 persen, tahun 2019 sebesar 6,34 persen, Berdasarkan uraian data diatas menunjukkan peran serta perempuan dalam kelembagaan pemerintahan mengalami peningkatan walaupun masih sangat sedikit. Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0	5,68	5,94	6,34	5,33
2	Jumlah KDRT	kali	4	4	3	2	1
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	120	120	0
4	Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak	kali	32	48	52	24	28

kekerasan yang terselesaikan dan tindak lanjut							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas DALDUK,KB, P3A Kabupaten Kepahiang

2.3.2.3 Urusan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kepahiang selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan pangan utama	%	0,09	0,081	0,064	0,023	0,012
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	kali	0	0	0	1	2

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang

2.3.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam

mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup lainnya diukur dengan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, jumlah tempat pembuangan sampah, penegakan hukum lingkungan, persentase rumah tangga yang terlayani urusan persampahan dengan baik, jumlah TPA dan volume sampah per hari. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indek kualitas air	%	40,83	43,33	45,83	48,33	50,83
2	Indeks kualitas udara	%	86,695	86,789	86,903	87,007	87,111
3	Jumlah tempat pembuangan sampah	unit	15	10	4	19	15
4	Penegakan hukum lingkungan	%	0	1	2	0	2
5	Persentase rumah tangga yang terlayani urusan persampahan dengan baik	%	37	37	37	50	50
6	Jumlah TPA	unit	1	1	1	1	1
7	Volume sampah Per hari	m ³	160,25	160,72	164,97	166,62	168,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

2.3.2.5 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase Kepemilikan KTP, Kepemilikan Akta Kelahiran, rasio bayi berakte



kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kabupaten
Kepahiang Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kepemilikan e-KTP	%	76,21	84,64	89,34	95,2	97
2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	46	66,42	84,63	94,02	98,71
3	Rasio bayi berakte kelahiran	%	96,65	97,60	96,80	98,56	99
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	5,5	6,3	11,4	17,29	23,41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang

2.3.2.6 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa dilakukan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dan Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: jumlah kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan jumlah BUMDes.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelompok TTG	kelompok	8	9	9	11	11
2	Jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	10	12	16	16	32
3	Jumlah BUMDes	desa	0	105	105	105	105
4	IDM (Desa Tertinggal)	Desa	0	0	0	21	14
5	Transmigrasi Tersertifikat	Persil	0	0	0	0	50

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang

2.3.2.7 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui pravelensi peserta KB aktif, Kabupaten layak anak, rata-rata jumlah anak perkeluarga, rasio aseptor KB dan jumlah kampong KB. Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pravalensi peserta KB aktif	%	90,47	83,98	73,87	73,57	73,72
2	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

3	Rata-rata jumlah anak Per keluarga	Orang	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
4	Rasio aseptor KB	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1:1
5	Jumlah kampung KB	Desa	1	9	15	15	15

Sumber: Dinas DALDUK,KB, P3A Kabupaten Kepahiang

2.3.2.8 Urusan Perhubungan

Pelayanan Pemerintah bidang Perhubungan di Kabupaten Kepahiang terus ditingkatkan setiap tahunnya dalam upaya mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepahiang, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang perhubungan adalah jumlah uji KIR angkutan umum, pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, persentase uji kir yang diterbitkan, jumlah terminal bis, dan jumlah ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (Nasional, Provinsi, Kabupaten).

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	59.965	60.618	61.516	65.400	60.5
2	Persentase uji kir yang di terbitkan	%	60	64	67	89	67
3	Jumlah terminal bus	terminal	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)



4	Jumlah ketersediaan rambu rambu lalu lintas (Nasional, Provinsi, Kabupaten)	unit	0	0	0	2.907	700
---	---	------	---	---	---	-------	-----

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang

2.3.2.9 Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.kepahiangkab.go.id> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Komunikasi dan Informatika diukur dengan indikator: cakupan layanan telekomunikasi, jumlah surat kabar lokal, jumlah penyiaran radio/tv lokal, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan layanan telekomunikasi	OPD	0	0	0	6	7
2	Jumlah surat kabar lokal	perusahaan	15	15	30	30	31
3	Jumlah penyiaran radio/tv lokal	amatir	1	1	1	1	1
4	Website milik pemerintah daerah	website	0	1	1	10	10
5	Pameran/expo	stand	0	0	0	1	0

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik



2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase usaha mikro dan kecil	%	35	40	55	65	70
2	Persentase koperasi aktif	%	80	82	90	91	99
3	Jumlah produk ukm /ikm yang dipromosikan lewat expo daerah	produk	3	4	5	6	7

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang

2.3.2.11 Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kabupaten Kepahiang memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Capaian penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.52
Penanaman Modal Dalam Negeri
Kabupaten Kepahang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Investor (Perusahaan)	Nilai Investasi (Rp)
1	2	3	4
1	2016	0	0
2	2017	170	23.413.000.000
3	2018	95	427.899.953.141
4	2019	245	58.175.649.000
5	2020	222	30.231.248.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahang

Tabel 2.53
Penanaman Modal Asing
Kabupaten Kepahang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Investor (Perusahaan)	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (orang)
1	2	3	4	5
1.	2016	0	0	0
2.	2017	0	0	0
3.	2018	1	7.750.000.000	229
4.	2019	1	7.750.000.000	229
2	2020	1	7.750.000.000	229

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahang

Tabel 2.54
Peraturan Yang Mendukung Iklim Usaha Dan Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Kepahang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah peraturan yang mendukung	perda	0	0	1 (satu) Perbup RUPMK No 54 Tahun 2018-2025	1 (satu) Perda Tentang Penanaman Modal No 07 Tahun 2019	0
2	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	orang	0	0	742	694	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahang

2.3.2.12 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kepahiang 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah klub olah raga	5	5	5	5	2
2	Jumlah gedung olah raga	1	1	1	1	1
3	Jumlah organisasi pemuda	10	10	10	9	8
4	Jumlah organisasi olah raga	15	15	15	15	11
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	3	3	1
6	Jumlah kegiatan olah raga	2	1	2	1	11
7	Jumlah prestasi dibidang olahraga	2	1	7	7	7

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang

2.3.2.13 Urusan Statistik

Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kepahiang Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Kepahang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Buku “Kepahiang Dalam Angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “PDRB Kabupaten”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahang

2.3.2.14 Urusan Persandian

Urusan wajib persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib persandian merupakan urusan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang menjadi kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Kepahang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	OPD	0	0	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik

2.3.2.15 Urusan Kebudayaan

Dibidang Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahang terus melakukan inventarisasi terhadap capaian-capaian kinerja berikut ini:



Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan festival seni budaya	kali	0	7	7	7	1
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	kali	0	0	0	0	0
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	0	36	2	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang

2.3.2.16 Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memnuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Dibidang pelayanan perpustakaan, sampai tahun 2019 jumlah koleksi buku sebanyak 12.887 buku dengan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebanyak 720 orang, hal ini tentunya akan menjadi fokus untuk dapat ditingkatkan tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah koleksi buku yang tersedia dipergustakaan Daerah	buku	11.136	11.136	11.136	12.887	12.877
2	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	orang	477	590	620	720	720
3	Rasio perpustakaan/ Satuan penduduk	%	3,24	3,24	3,97	4,11	4,74
4	Jumlah koleksi judul buku Perpustakaan	judul	4.322	4.621	4.650	5.855	5.855
5	Jumlah, pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	0	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang

Capaian kinerja layanan umum pada Urusan Kearsipan diukur dengan indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dan jumlah SDM pengelola kearsipan.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0	0	0	0	0,5
2	Jumlah SDM pengelola kearsipan	orang	3	3	4	4	0,4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di Kabupaten Kepahiang dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan.

2.3.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian indikator urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi budidaya perikanan	ton	5.225,4	4.404,6	4.840,4	1.766,7	617,189
2	Konsumsi ikan	%	4,2	3,5	3,9	1,8	0,024

3	Persentase kelompok tani yang dibina	%	48	100	100	100	100
---	--------------------------------------	---	----	-----	-----	-----	-----

Sumber :Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang

2.3.3.2 Urusan Pariwisata

Dibidang pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Wisatawan	orang	10275	10775	11275	11775	1800
2	Jarak Destinasi Wisata Terjauh Ke Ibu kota Provinsi	km	96	96	96	96	96
3	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	obyek	40	53	53	53	53
4	Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata	hari	28	30	31	32	1
5	PAD Sektor Pariwisata	Rp (juta)	80	60	14.3	14.3	18.7
6	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Ke Tujuan Wisata	%	25	30	40	50	50

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang

2.3.3.3 Urusan Pertanian

Sektor Pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Produktivitas pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari tabel berikut ini :



Tabel 2.63
Produksi Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 - 2020

No	Uraian		Satuan	Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Padi	Luas	Ha	11.195	11.195	11.856	11.973	6.557
		Produksi	Ton	47.738	47.738	54.697	54.395	33.490
2	Jagung	Luas	Ha	938	938	2.651	2.570	1.082
		Produksi	Ton	4.491	4.491	11.180	12.745	5.565
3	Kedelai	Luas	Ha	536	536	1.214	46	8
		Produksi	Ton	696	696	2.064	46,72	9,2
4	Kacang Tanah	Luas	Ha	164	164	247	238	58
		Produksi	Ton	190	190	326	312,43	207
5	Ubi Kayu	Luas	Ha	130	130	317	301	105
		Produksi	Ton	2.849	2.849	5.872	5.872	1.230
6	Ubi Jalar	Luas	Ha	247	247	203	204	139
		Produksi	Ton	4.937	2.849	3.832	3.856	4.250
7	Kopi	Luas	Ha	24.151	29.402	24.686	24.686	24.812
		Produksi	Ton	14.616	13.465	19.063	19.098	19.518
8	Lada	Luas	Ha	3.640	3.124	2.241	2.264	2.294
		Produksi	Ton	1.911	1.219	1.378	1.413	1.210,4

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang

Penyelenggaraan Urusan Pertanian juga merupakan salah unggulan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam melaksanakan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kepahiang. Kondisi Kabupaten Kepahiang yang agraris, menjadikan sektor pertanian berkontribusi secara dominan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Kepahiang. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Upaya yang telah dilakukan Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi

tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Berikut tabel realisasi indikator urusan pertanian tahun 2016-2019 :

Tabel 2.64
Realisasi Indikator Urusan Pertanian
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Produktivitas Tanaman Pangan							
1	Padi	ton	4,26	4,26	4,61	4,54	5
2	Jagung	ton	4,79	4,79	4,22	4,96	7
3	Kedelai	ton	1,30	1,30	1,70	1,02	0
4	Kacang Tanah	ton	1,16	1,16	1,32	1,31	3

Sumber Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang

2.3.3.4 Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepahiang. Kontribusi sektor perindustrian dan perdangan terhadap perekonomian di Kabupaten Kepahiang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang. Kontribusi sektor industri dan perdaganagn terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.65
Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	%	7,48	7,64	7,63	7,51	7,47
2	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	%	8,83	9,10	9,45	9,69	9,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

Tabel 2.66
Realisasi Indikator Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016– 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	10	14	19	25,47	33,37
2	Cakupan Bina UMKM	%	14	15	16	20	30
3	Jumlah Industri Kecil Dan Menengah	IKM	240	250	309	329	355
4	Jenis produk IKM yang dipasarkan	jenis	3	3	3	4	6

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.3.4 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sejumlah Penunjang Urusan Pemerintah meliputi: 1) Perencanaan; 2) Keuangan, 3) Sekretariat DPRD, 4) Sekretariat Daerah, 5) Pengawasan, 6). Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia, 7) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2.3.4.1 Urusan Perencanaan

Perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan memperhatikan dokumen- dokumen perencanaan yang telah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang, dan juga hasil pencapaian kinerja Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021, Selain itu juga dalam rangka sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang juga memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Penyelenggaraan perencanaan merupakan salah satu penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten

Kepahiang. Adapun indikator kinerja utama adalah (1). Jumlah dokumen perencanaan, RPJPD, (2). Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada (3). Jumlah dokumen RKPD, KUA dan PPAS RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda. Pencapaian indikator bidang Perencanaan Pembangunan tersajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.67
Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/tidak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen RKPD, KUA dan PPAS	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kabupaten Kepahiang

Keberhasilan dari pencapaian kinerja perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pelaksanaan proses perencanaan pembangunan secara berkualitas dan aspiratif melalui optimalisasi dan sinergitas seluruh *stakeholder* dan sektor pembangunan dengan mengedepankan perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan holistik – tematik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja mengacu pada *money folow* program dengan tahapan –tahapan yang dilaksanakan melalui Musrenbang desa/ kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.

2.3.4.2 Urusan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Bupati. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama. Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016- 2020 sebagaimana tersaji di bawah ini:

Tabel 2.68
Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Keuangan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	44,36	27,65	32,89	-2,85	-92,66
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,94	3,68	5,07	4,13	0,30
4	Perbandingan Belanja Langsung dan Tidak langsung	%	47,04 & 52,96	47,86 & 52,14	44,66 & 55,34	49,20 & 50,80	46,01 & 53,99
5	Penetapan APBD (tepat waktu/tidak tepat waktu)	tepat/tidak tepat	28 Januari 2016 (Tidak Tepat Waktu)	31 Desember 2016 (Tepat Waktu)	23 Januari 2018 (Tidak Tepat Waktu)	31 Desember 2018 (Tepat Waktu)	30 Desember 2019 (Tepat Waktu)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang

2.3.4.3 Sekretariat DPRD

Aspirasi masyarakat adalah usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan masyarakat agar bisa tercapai yang dapat disampaikan baik melalui surat, media komunikasi (SMS/telp.) dan media sosial lainnya, maupun disampaikan langsung ke DPRD dan melalui kegiatan lainnya yang bersifat/memiliki bobot peningkatan membangun daerah, peningkatan pelayanan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan yang direspon dan ditindaklanjuti oleh DPRD melalui Inspeksi Mendadak (SIDAK), Rapat Kerja dan Rapat Paripurna untuk mendapat pembahasan dan keputusan lebih lanjut.

Tabel 2.69
Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang

2.3.4.4 Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban

kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.70
Nilai SAKIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP	predikat	C	C	C	C	C

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Kepahiang

2.3.4.5 Urusan Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan social. Realisasi indikator kinerja urusan pengawasan Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71
Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pengawasan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang bebas temuan asset dan keuangan	%	60	65	67	70	73
2	Level 3 Maturitas SPIP	level	1	1	2	2	2
3	Persentase OPD yang hasil evaluasi nilai B	%	50	60	75	80	81
4	Level 3 Kapabilitas APIP	level	2	2	2	3	70



1	2	3	4	5	6	7	8
5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang tuntas ditindaklanjuti	%	68	74	72	74	70
6	Persentase penanganan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti	%	75	78	82	85	85
7	Jumlah tenaga APIP	orang	45	35	33	31	30

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kepahiang

2.3.4.6 Urusan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 2.72
Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengisian jabatan struktural dalam struktur organisasi	%	33,79	89,03	89,42	92,77	88,54
2	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan Kepemimpinan	%	1,53	0,61	0,76	1,00	0
3	Persentase peningkatan kapasitas SDM ASN	%	0	0,65	1,75	1,97	1,11

4	Proporsi ketersediaan ASN	%	0	0	9,8	0	0,71
---	---------------------------	---	---	---	-----	---	------

Sumber : Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM Kabupaten Kepahang

2.3.4.7 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pencapaian indikator bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tersajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Kesbang dan Poldagri Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	5	2	2	1	1
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih	%	0	0	0	80.34	81
3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	1	0	1	2	0
4	Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan	kegiatan	1	0	1	1	0
5	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	kegiatan	2	1	2	1	0

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahang

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.



2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Tabel 2.74
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita menurut Kelompok Makanan

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Perkapita	Rp	363.007	472.408	462.026	439.328	481.741

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Indikator kinerja daerah urusan pertanian Kabupaten Kepahiang diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan indikator yang memberikan gambaran bagaimana kehidupan petani ditopang oleh usaha sektor pertaniannya. Nilai tukar petani memperlihatkan dua sisi



kehidupan petani yaitu yang pertama sisi pendapatan petani yang menopang seluruh pembiayaan hidup rumah tangga petani dari hasil penjualan produk pertaniannya. Sisi yang kedua adalah sisi pengeluaran untuk kelangsungan rumah tangga petani. Pengertian dari nilai NTP adalah sebagai berikut ini:

$NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

$NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

$NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. NTP di Kabupaten Kepahiang selama tahun 2012-2017 diperlihatkan di tabel berikut ini.

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.75
Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2018

Bulan	Nilai Tukar Petani		
	2016	2017	2018
Januari	92.09	94.99	95.42
Februari	92.03	95.87	95.02
Maret	92.61	95.37	95.06
April	94.05	95.02	94.32
Mei	94.91	93.48	93.83
Juni	92.86	93.30	93.29
Juli	91.64	92.39	92.37
Agustus	92.56	93.60	92.54
September	93.12	94.35	92.81

Oktober	92.85	95.12	94.11
November	93.34	95.26	95.27
Desember	94.62	95.12	94.08

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang 2018

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Beberapa variabel dari fokus fasilitas wilayah antara lain rasio panjang jalan, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, jumlah bank, jumlah hotel dan restoran dan lain sebagainya. Saat ini Kabupaten Kepahiang memiliki 4 hotel/penginapan, dan 138 rumah makan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kepahiang. Sementara itu jumlah sarana dan prasarana perhubungan sampai tahun 2019 telah memiliki 2 terminal dengan Tipe C yang terletak di Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Merigi, Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya Kabupaten Kepahiang meliputi angkutan Antar Kota Antar Provinsi, Antar Kota Dalam Provinsi Dan Angkutan Lokal yang berupa angkutan kota dan angkutan pedesaan. Untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kepahiang tahun 2019 sebesar 89%.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Penanaman modal atau investasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam penciptaan efek berganda dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, maka selain peningkatan perekonomian, juga terjadi penciptaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan daerah melalui proses yang siklikal. Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat. Besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif, yaitu perekonomian yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat. Daftar Penerbitan Izin di Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.76
Daftar Penerbitan Izin di Kabupaten Kepahang
Tahun 2016–2020

No	Jenis Perizinan	Jumlah Izin / Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	8
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	194	429	328	606	97
2.	Izin Gangguan (HO) / SITU	516	530	290	0	0
3.	Izin Prinsip	3	2	1	0	0
4.	Izin Lokasi	5	3	1	9	3
5.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	127	154	124	153	187
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	0	86	135	261	223
7.	Surat Izin Usaha Konstruksi (SIUK)	97	101	101	38	11
8.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	0	2	4	4	4
9.	Tanda Daftar Gudang	1	2	1	1	4
10.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	5	6	8	22	13
11.	Tanda Daftar Industri (TDI)	5	12	17	18	20
12.	Izin Kepariwisata	0	0	7	29	2
13.	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) dan Izin Operasi Biro Jasa (IOBR)	4	5	2	7	10
14.	Izin Penyelenggaraan Khusus	2	3	6	9	12
15.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta	20	20	22	32	28
16.	Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	80	101	105	227	100
17.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum	26	31	24	28	29
18.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi	1	3	1	2	4
19.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	2	4	3	4	2
20.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Gigi	1	2	1	5	3
21.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Bersalin dan KIA	0	0	0	0	0

22.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Toko Obat	0	2	3	4	2
23.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Produksi Makanan dan Minuman	2	3	5	22	22
24.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rumah Sakit	0	0	0	1	0
25.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Pelayanan Balai Pengobatan / Klinik	0	1	1	1	2
26.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotik	0	2	3	4	2
27.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Optik	1	1	1	1	1
28.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Laboratorium Kesehatan	0	1	1	0	0
29.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Sarana Pengobatan Tradisional	1	1	1	2	2
30.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Pantim Pijat Umum Modern (PPUM)	1	1	1	0	0
31.	Izin Penyelenggaraan Sarana Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut	0	1	0	0	1
32.	Ijin Praktek Fisiotropi/Radiografer	0	1	1	3	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepahiang

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 (kualitas tenaga kerja)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Jumlah penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja sebanyak

54,84 persen dari total penduduk Kabupaten Kepahiang. Kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang tercipta di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 relatif tinggi mencapai 96,92 persen. Berarti, dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada sebanyak 97 orang telah bekerja atau terserap dalam lapangan pekerjaan. Ditinjau dari pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan penduduk yang bekerja atau pekerja di Kabupaten Kepahiang umumnya masih rendah, sebanyak 48,71 persen pekerja di Kabupaten Kepahiang masih berpendidikan tingkat dasar SD ke bawah, sedangkan pekerja yang berpendidikan tinggi (diploma/sarjana/ke atas) hanya sekitar 7,69 persen.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Angka beban ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antara jumlah penduduk yang produktif dengan yang tidak produktif. *Dependency ratio* secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (<15 tahun) dan usia tua (65 tahun atau lebih).

Tabel 2.77
Rasio Ketergantungan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	8
1	Rasio Ketergantungan	46,52	46,11	45,77	45,47	45,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kepahiang

Tabel 2.78
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Kepahiang

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	<i>Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha</i>							
1.1.1.1	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	3280,55	3637,17	3981,49	4318,93	4409,81	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.1.1.2	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	2421,73	2545,97	2673,15	2803,87	2805,56	Semakin Menurun Semakin Membaik	Baik
1.1.1.3	Pertumbuhan Harga Berlaku (%)	11.09	10.87	9.47	8.55	-	Menurun Setiap tahunnya	Kurang
1.1.1.4	Pertumbuhan Harga Konstan (%)	5.63	5.13	5	4.89	0.06	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.1.1.2	<i>Pendapatan/ PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha</i>							
1.1.1.2	Pendapatan/ PDRB Perkapita Harga Berlaku (Juta RP)	24.54	26.95	29.25	31.5	29.45	Semakin Menurun Semakin Membaik	Baik
1.1.1.2.2	Pendapatan/ PDRB Perkapita Harga Konstan (Juta RP)	18.11	18.87	19.64	20.45	18.47	Semakin Menurun Semakin Membaik	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.1.2.3	Pertumbuhan Harga Berlaku (%)	10.02	9.86	8.53	7.68	-	Menurun Setiap tahunnya	Kurang Baik
1.1.1.2.4	Pertumbuhan Harga Konstan (%)	4.61	4.17	4.1	4.11	-	Tidak Stabil	Cukup
1.1.1.3	Laju Inflasi	5.9	5.17	5.46	3.39	-	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.1.1.4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0.3	0.33	0.3	-	-	Indeks Gini Nasional 0,323(2020) Bengkulu	Baik
1.1.1.5	Kemiskinan							
1.1.1.5.1	Persentase Masyarakat Miskin (%)	16.31	15.95	14.42	14.74	14.69	Persentase Masyarakat Miskin Nasional 15,03(Bengkulu)	Sedang
1.1.1.5.2	Jumlah Masyarakat Miskin (jiwa)	21750	21467	19582	20182	20270	Semakin Meningkatkan Setiap Tahunnya	Sedang
1.1.1.5.3	Garis Kemiskinan (Rp)	323333	348238	361281	374568	396184	Semakin Meningkatkan Setiap Tahunnya	Kurang Baik
1.2	Fokus Kesejahteraan sosial							
1.2.1.1	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	7.83	7.84	7.92	7.93	8.24	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.2.2.2	Angka Partisipasi Murni							

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
	(APM)							
1.2.2.2.1	APM SD / MI	99.13	99.51	100	99.45	99.14	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.2.2.2.2	APM SMP / MTs	80.24	81.18	77.85	78.68	78.56	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.2.2.2.3	APM SMA/MA/SMK	68.56	66.57	70.85	71.68	70.94	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
1.2.3.1	APK SD / MI	-	109.81	111.78	112.72	111.08	Fluktuatif	Baik
1.2.3.2	APK SMP / MTs	-	90.11	79.89	81.79	84.58	Menurun Setiap tahunnya	Kurang Baik
1.2.3.3	APK SMA/MA/SMK	-	84.31	91.45	81.79	92.98	SemakinMeningkat Semakin Membaik	Baik
1.2.4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67.03	67.12	67.39	67.78	67.65	Angka Harapan Hidup Nasional 69,35 (Bengkulu)	Baik
1.2.5	Angka Kematian Bayi (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	3	3	15.3	12.8	11,8	Angka Kematian Bayi Nasional 8 (Bengkulu)	Tercapai
1.2.6	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000)	79	162	0	177	81	Semakin Meningkatkan Semakin Buruk	Baik
1.2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66.35	66.6	67.14	67.67	68.17	Semakin Meningkatkan	Sangat Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
							Semakin Membaik	
1.2.8	Tenaga Kerja							
1.2.8.1	Angkatan Kerja	-	-	74639	76231	83787	Meningkat di Tahun 2020	Cukup
1.2.8.1.1	Bekerja	-	-	72341	74504	81675	Semakin Meningkatkan Setiap Tahunnya	Baik
1.2.8.1.2	Pengangguran Terbuka	-	-	2298	1727	2112	Semakin Meningkatkan Semakin Memburuk	Kurang
1.2.6.2	Bukan Angkatan Kerja	-	-	24857	24467	22021	Menurun Setiap Tahunnya	Cukup
1.2.6.2.1	Sekolah	-	-	8415	6673	6256	Menurun di Setiap Tahunnya	Kurang
1.2.6.2.2	Mengurus Rumah Tangga	-	-	13405	14365	12426	Menurun di Tahun 2020	Cukup
1.2.6.2.3	Lainnya	-	-	3037	3429	3339	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.3	Fokus Seni budaya dan Olah raga							
1.3.1	Bidang Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga							
1.3.1.1	Jumlah Klub Olahraga	5	5	5	5	2	Menurun di Tahun 2020	Cukup
1.3.1.2	Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1	Stabil	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.1.3	Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	10	9	8	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Kurang
1.3.1.4	Jumlah Organisasi Olahraga	15	15	15	15	11	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Cukup
1.3.1.5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	3	1	Menurun di Tahun 2020	Kurang
1.3.1.6	Jumlah Kegiatan Olahraga	2	1	3	1	11	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.3.1.7	Jumlah Prestasi di Bidang Olahraga	2	1	7	7	7	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
1.3.1.8	Jumlah Sanggar Kesenian	-	-	44	-	-	Semakin Menurun Semakin Membaik	Baik
1.3.1.9	Jumlah Seni Musik	-	-	5	-	-	Tidak Stabil	Cukup
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Bidang Urusan Pendidikan							
2.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah							
2.1.1.1.1	APS SD/MI (%)	100	99,51	99,31	99,10	77,99	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.1.1.1.2	APS SMP/MTs (%)	100	98,45	98,25	98,00	61,38	Semakin Menurun Setiap Tahunnya	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.2	Ketersediaan Sekolah							
2.1.1.2.1	Jumlah Gedung SD dan SMP (Unit)	1.414	1.524	1.591	1.671	129	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Kurang Baik
2.1.1.2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun (Orang)	15.165	15.279	15.388	14.529	15.541	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.1.1.2.3	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun (Orang)	7.367	7.968	8.068	7.118	7.697	Tidak stabil	Cukup
2.1.1.3	Jumlah Guru dan Murid							
2.1.1.3.1	SD/MI							
	Jumlah Guru	1.042	1.039	944	1.036	1.005	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
	Jumlah Murid	14.753	14.663	14.299	13.782	12.903	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.1.1.3.2	SMP/MTs							
	Jumlah Guru	443	492	438	436	431	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
	Jumlah Murid	5.442	5.675	5.827	4.889	5340	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.1.1.4	Angka Kelulusan							

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1..4.1	SD/MI (%)	100	100	100	100	100	Stabil	Baik
2.1.1..4.2	SMP/MTs (%)	99,91	99,96	99,86	99,84	100	Meningkat Setiap Tahunnya	Baik
2.1.2	Bidang Urusan Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	11,21	10,89	9,58	9,51	9,85	Fluktuatif	Cukup
2.1.2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Stabil	Baik
2.1.2.3	Rasio Poli klinik per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.1.2.4	Rasio pustu per satuan penduduk	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Stabil	Baik
2.1.2.5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,074	0,074	0	0	0	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Kurang Baik
2.1.2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	0,13	0,13	0,13	0,13	0,19	Meningkat di Tahun 2020	Baik
2.1.2.7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	Semakin Menurun Semakin Membaik	Baik
2.1.2.8	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0007	0,005	0	0,008	0	Semakin Menurun Semakin Membaik	Baik
2.1.2.9	Cakupan puskesmas	175	175	175	175	175	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2.10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	74,577	80,543	85,035	88,987	90,44	Semakin Meningkat Setiap Tahunnya	Baik
2.1.2.11	Jumlah tenaga Kesehatan	142	135	143	157	170	Semakin Meningkat Semakin Membaik	Baik
2.1.3	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
2.1.3.1	Jumlah polisi pamong praja	27	29	195	29	24	Tidak stabil	Cukup
2.1.3.2	Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	713	713	713	713	713	Semakin Menurun Semakin Baik	Baik
2.1.3.3	Jumlah penanganan unjuk rasa	1	-	1	1	1	Stagnan	Baik
2.1.3.4	Jumlah kegiatan pengamanan dalam setahun	5	5	5	6	8	Meningkat setiap Tahunnya	Baik
2.1.3.5	Persentase penegakan perda	90	90	90	80	90	Stabil	Baik
2.1.4	Bidang Urusan Sosial							
2.1.4.1	PMKS yang tertangani	-	-	-	17%	15,89%	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Buruk
2.1.4.2	Penyandang disabilitas	-	-	-	58%	65,15%	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Buruk
2.1.4.3	Anak korban tindakan	-	-	-	100%	67	Semakin Menurun	Buruk



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
	kekerasan/dalam panti asuhan						Semakin Memburuk	
2.1.4.4	Persentase KUBE aktif	-	5%	15%	-	-	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1	Bidang Urusan tenaga kerja							
2.2.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	70,89	73,80	75,48	77,24	79,48	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Sangat Baik
2.2.1.2	Tingkat tenaga kerja pengangguran terampil (%)	14,29	10,29	6,16	2,71	0,27	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Cukup
2.2.1.3	Angka pengangguran terbuka (Orang)	4.37	3.47	2.181	1.981	0,821	Semakin Menurun Semakin baik	Baik
2.2.1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	10	30	95	171	191	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Sangat Baik
2.2.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100	115	130	1500	1700	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Sangat Baik
2.2.1.6	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	63,12	67,12	77,92	75,22	80,23	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2.1.7	Jumlah lembaga pelatihan/penyiapan tenaga kerja	1	5	6	7	10	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.2	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak							
2.2.2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	5,68	5,94	6,34	5,33	Fluktuatif	Cukup
2.2.2.2.	Jumlah KDRT	-	9	18	25	8	Fluktuatif	Cukup
2.2.2.3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	120	120	0	Fluktuatif	Baik
2.2.2.4	Jumlah kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang terselesaikan dan tindak lanjut	-	26	53	120	30	Semakin menurun Semakin Baik	Baik
2.2.3	Bidang Pangan							
2.2.3.1	Persentase ketersediaan pangan utama	-	-	6,01	9	0,012	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Kurang
2.2.3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	-	1	2	2	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Baik
2.2.4	Bidang Lingkungan Hidup							
2.2.4.1	Indek kualitas air	65	65	65	70	50,83	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Baik
2.2.4.2	Indeks kualitas udara	89,53	90,61	90,84	90,85	87,11	Semakin Menurun Semakin Membaik	Cukup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.4.3	Jumlah tempat pembuangan sampah	15	10	4	19	15	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Buruk
2.2.4.4	Penegakan hukum lingkungan	0	1	2	0	2	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Baik
2.2.4.5	Persentase rumah tangga yang terlayani urusan persampahan dengan baik	56	56	56	57	50	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Baik
2.2.4.6	Jumlah TPA	1	1	1	1	1	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2.4.7	Volume sampah Per hari	189,81	191,98	194,17	196,38	168,28	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Buruk
2.2.5	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.2.5.1	Persentase kepemilikan e-KTP	76,21	84,64	89,34	95,2	97	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2.5.2	Persentase kepemilikan akta kelahiran	46	66,42	84,63	94,02	98,71	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Sangat Baik
2.2.5.3	Rasio bayi berakte kelahiran	96,65	97,60	96,80	98,56	99	Menurun di Tahun 2020	Kurang Baik
2.2.5.4	Rasio pasangan berakte nikah	5,5	6,3	11,4	17,29	23,41	Meningkat setiap tahunnya	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.6	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.6.1	Kelompok TTG	8	9	9	16	11	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2.6.2	Jumlah kelompok binaan PKK	10	12	16	16	32	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2.6.3	Jumlah BUMDes	0	105	105	105	105	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Baik
2.2.7	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.7.1	Prevalensi peserta KB aktif	90,47	83,98	73,87	73,57	73,72	Semakin Menurun semakin Memburuk	Memburuk
2.2.7.2	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	-	-	-	Pratama	Pratama	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Baik
2.2.7.3	Rata-rata jumlah anak Per keluarga	3-Feb	3-Feb	3-Feb	3-Feb	3-Feb	Stabil	Baik
2.2.7.4	Rasio asektor KB	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01		Tercapai
2.2.7.5	Jumlah kampung KB	1	9	15	15	15	Semakin Meningkatkan semakin Membaik	Baik
2.2.8	Bidang Urusan							

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
	Perhubungan							
2.2.8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	59.965	60.618	61.516	65400	60500	Menurun	Cukup
2.2.8.2	Persentase uji kir yang di terbitkan	60	64	67	89	-	Fluktuatif	Kurang
2.2.8.3	Jumlah terminal bus	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	2 (Tipe C)	Stagnan	Baik
2.2.8.4	Jumlah ketersediaan rambu rambu lalu lintas (Nasional, Provinsi, Kabupaten)	-	-	-	2.907	700	Menurun	Kurang
2.2.9	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika							
2.2.9.1	Cakupan layanan telekomunikasi	-	0	0	6	7	Meningkat	Sedang
2.2.9.2	Jumlah surat kabar lokal	-	-	-	30	31	Meningkat	Sedang
2.2.9.3	Jumlah penyiaran radio/tv lokal	-	-	-	1	-	Stagnan	Kurang
2.2.9.4	Website milik pemerintah daerah	-	1	-	1	10	Meningkat	Sedang
2.2.9.5	Pameran/expo	-	0	0	1	-	Menurun	Sangat Kurang
2.2.10	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.2.10.1	Persentase usaha mikro dan kecil	35	40	55	65	70	Semakin Meningkatkan Semakin Baik	Baik

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.2.10.2	Persentase koperasi aktif	80	82	90	91	99	Semakin Meningkatkan Semakin Baik	Sangat Baik
2.2.10.3	Jumlah produk ukm/ikm yang di promosikan lewat expo daerah	3	4	5	6	7	Semakin Meningkatkan Semakin Baik	Sedang
2.2.11	Bidang Urusan Penanaman Modal							
2.2.11.1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri	-	170	95	245	222	Semakin Menurun Semakin Memburuk	Kurang
2.2.11.2	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	-	23.413.000.000	427.899.953.141	58.175.649.000	30.231.248.000	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Sedang
2.2.11.3	Jumlah Investor Penanaman Modal Asing	-	-	1	-	-	Semakin menurun Setiap Tahunnya	Kurang Baik
2.2.11.4	Nilai Investasi Penanaman Modal Asing	-	-	7.750.000.000	-	-	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Kurang Baik
2.2.11.5	Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing	-	-	229	-	-	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Kurang Baik
2.2.11.6	Jumlah peraturan yang mendukung iklim usaha	-	-	1 (satu)	1 (satu)	-	Semakin Menigkat Semalin Membaik	Sedang
				Perbup RUPMK No 54 Tahun 2018-2025	Perda Tentang Penanaman Modal No 07			

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi Data
		2016	2017	2018	2019	2020		
					Tahun 2019			
2.2.11.7	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	-	-	742	694	-	Semakin Meningkatkan Semakin Membaik	Kurang Baik



2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal* (SDGs) merupakan agenda international yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

“No one left behind” merupakan tagline dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goal’s (SDG’s) yang mengartikan bahwa pembangunan dalam agenda SDG’s harus memberi manfaat bagi semua lapisan, kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dalam mewujudkan konsep ini semua aspek harus terlibat Pemerintah, Non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Filantropi bersama-sama memetakan indikator-indikator untuk pencapaian 17 (tujuh belas) goals yang harus dicapai dalam SDG’s. Kabupaten Kepahiang dalam mendukung pencapaian goals SDG’s dengan melibatkan banyak aspek pada tahun 2018 telah merampungkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (RADTBP/SDGs).

SDG’s dan RPJMD Kabupaten Kepahiang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Bengkulu yang dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang merupakan irisan dari 17 (tujuh belas) Goal’s yang tertuang dalam SDG’s.

Tabel 2.79
Kesesuaian Anantara RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021
Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang

RPJMD		PROGRAM PEMBANGUNAN	TPB/SDG's	
1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan	<p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak</p> <p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</p> <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</p> <p>Program Pendidikan Menengah</p> <p>Program Pendidikan Non Formal</p> <p>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</p>	T.1	Tanpa Kemiskinan
	2		Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi	T.2 T.3
3		Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	T.4	Pendidikan Berkualitas
			T.5	Kesetaraan Gender
		T.16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	
		T.17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	
		T.6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	
		T.11	Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	
		T.13	Penanganan Perubahan	

		Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup		Iklm
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)		
4	Mengembangkan Perekonomian Kabupaten Kepahiang Yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan		T.8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
5	Mendorong Peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Serta Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya		T.9 T.10	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Berkurangnya Kesenjangan

- T.1 Tanpa Kemiskinan
- T.2 Tanpa Kelaparan
- T.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- T.4 Pendidikan Berkualitas
- T.5 Kesetaraan Gender
- T.6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- T.7 Energi Bersih dan Terjangkau
- T.8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- T.9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- T.10 Berkurangnya Kesenjangan
- T.11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan
- T.12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab
- T.13 Penanganan Perubahan Iklim
- T.14 Ekosistem Lautan
- T.15 Ekosistem Daratan
- T.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
- T.17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pelaksanaan RAD SDGs Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 menjadi gambaran awal pencapaian target Indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Kepahiang Tahun 2020 disajikan pada table dibawah ini :



Tabel 2.80
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun						
Target Global : Pada Tahun 2030, Mengurangi Setidaknya Setengah Proporsi Laki-Laki Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Di Semua Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional.						
1.2.1	Persentase Kemiskinan	Publikasi BPS Kepahiang Dalam Angka 2021	%		14,69	Tercapai
Target Global : Menerapkan Secara Nasional Sistem dan Upaya Perlindungan Sosial Yang Tepat Bagi Semua, Termasuk Kelompok Yang Paling Miskin, dan Pada Tahun 2030 Mencapai Cakupan Substansial Bagi Kelompok Miskin dan Rentan.						
1.3.1 (a)	Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	100	76	Akan Tercapai
Target Global : Pada Tahun 2030, Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk kkeuangan mikro.						
1.4.1 (a)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	90	83	Akan Tercapai
1.4.1 (b)	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHANG	%	94	96	Tercapai
1.4.1 (c)	Persentase Rasio Akseptor KB	DP3A,PP & KB	%	1:1	1:1	Tercapai

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	RPJMD	%		88,42	Akan Tercapai
1.4.1 (e)	Persentase akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kepahiang	%	77,05	76,88	Akan Tercapai
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	RPJMD	%		80,10	Akan Tercapai
1.4.1 (g)	Angka partisipasi murni (APM) SD	RPJMD	%	89,00	98,55	Tercapai
1.4.1 (h)	Angka partisipasi murni (APM) SLTP	RPJMD	%	67,00	98,04	Tercapai
1.4.1 (i)	Angka partisipasi murni (APM) SMA	RPJMD	%		70,94	Tercapai
1.4.1 (j)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun		%		98,71	
Target Global : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1 (e)	Persentase desa tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepahiang	%	0	0	Recofusing

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
1.5.3*	Persentase Ketersediaan Peta Resiko Bencana Skala Besar	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepahiang	Dokumen	1 Paket	1 Paket	Tercapai
Target Global : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi						
1.5.2 (a)	Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	Tercapai
Tujuan SDG's 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1 (a)	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	RPJMD	%	<10%	8	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang diseakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.2*	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	RPJMD	%	<10%	8	Tercapai
Tujuan SDG's 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	<162/100.000	<81/100.000	Tercapai
3.1.2*	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	90	83	Akan Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH(Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000						
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Kejadian		1,6/1000	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Kejadian		8,5/1000	Tercapai
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup	Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	<13/1000	11,8/1000	Tercapai
3.2.2 (b)	Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	94%	96%	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, turberkulosi, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1(a)	Prevalensi HIV	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Kejadian	<0,5	0.1	Tercapai

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
3.3.2*	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Kejadian	447	447	Tercapai
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	<1%	0.1	Tercapai
3.3.5(*)	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Laporan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	100	100	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1 (a)	Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	0,5		
3.4.1 (b)	Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) mendapat pelayanan sesuai standart	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	100	81	Akan Tercapai
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	%	29.9	7.26	Akan Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						



KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
3.7.2*	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	DP3A,PP & KB	%	37%	28.45%	Tercapai
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	DP3A,PP & KB	%	2.15%	1.98%	Tercapai
Target Global : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan rasio keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksिन dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2. (a)	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Laporan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Jumlah	16000	15.729	Akan Tercapai
Target Global : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksिन dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						
3.b.1	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai Standart	Laporan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	Puskesmas	35,71	37,71	Tercapai
Tujuan SDG's 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua						
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
4.1.1 (a)	Persentase SD yang terakreditasi	RPJMD		96%	96.97	Tercapai
4.1.1 (b)	Persentase SLTP yang terakreditasi	RPJMD		89,6%	93.33	Tercapai
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK1 SD/MI/ sederajat.	RPJMD		-	111,08	Tercapai
4.1.1 €	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	RPJMD		-	84,58	Tercapai
4.1.1(g)	Angka Rata-rata Lama sekolah	RPJMD		-	8,24	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki, memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang	%	95.50	65.84	Tidak Tercapai
Thjuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan kaum Perempuan						
Target Global : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1*	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak	DP3A,PP & KB	Kasus	18	21	Akan Tercapai

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
5.2.2.(a)	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	DP3A,PP & KB	%	100	100	Tercapai
Target Global : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
5.3.1*	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	RPJMD	%	28,45		Akan Tercapai
Target Global : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.6.1 (a)	Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana atau KB yang Tidak Terpenuhi).	DP3A,PP & KB	%	5%	21.30%	Tidak Tercapai
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua						
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kepahiang	%		81.5	Tercapai
6.1.1.(b)	Persentase akses air minum aman dengan sistem perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kepahiang	%		67.02	Akan Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
6.2.1.(b)	Persentase akses sanitasi layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kepahiang	%	77.5	77	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kepahiang	%	117	117	Tercapai
6.2.1 (e)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	RPJMD	%	80,10	100	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.2.(b)	Indeks kualitas air	RPJMD	%	50,83	50,83	Tercapai
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua						
Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai kondisi nasional dan, Khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto/tahun di negara kurang berkembang						
8.1.1*	Pertumbuhan PDRB	RPJMD	%		0,06	Tercapai



KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
Target Global : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	%		L (23,33) P (29,38)	
8.3.1. (a)	persentase tenaga kerja formal	Badan Pusat Statistik	%		22,27	
8.3.1. (b)	persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Badan Pusat Statistik	%		73,97	
8.3.1.(c)	persentase pertumbuhan kelompok usaha Baru (KUB)/wira usaha baru (WUB)	Dinas Koprasi dan UKM	%			
Target Global : Pada tahun 2030, Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin	Badan Pusat Statistik	Orang		L (1374) P (738)	
Tujuan SDGs 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi						
Target Global : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan						

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1. (a)	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik/sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Kepahiang			49,56	
Target Global : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang dalam berkembang.						
9.2.1.(a)	laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Badan Pusat Statistik			-2,92	Akan Tercapai
Target Global : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.						
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Badan Pusat Statistik			39,83	
9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Badan Pusat Statistik			70,35	
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi kesenjangan intra-dan antar negara						
Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
10.1.1*	Indeks gini	Badan Pusat Statistik			0,307	Tercapai
10.1.1.(a)	Persentase kemiskinan	Publikasi BPS Kepahiang Dalam Angka 2021	%		14,69	Tercapai
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Kepahiang	Desa	13	12	Tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang	Desa	1	1	Tercapai
Target Global : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(c)	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	RPJMD	%	33,3		
Tujuan SDGs 15 : Melindungi, merestoral dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan Ekosistem Daratan, mengelola Bhutan secara Lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan Degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keragaman Hayati.						
Target Global : Pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15.1.1(a)	Persentase luas tutupan lahan didalam kawasan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang	Poin	30	31	Tercapai

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan						
Target Global : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1.(a)	Opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten.	RPJMD	-	WTP	WTP	Tercapai
16.6.1.(c)	Persentase Penyelenggaraan lelang secara elektronik.	Biro Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepahiang	%	100	100	Tercapai
16.6.2.(b)	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten.	Inspektorat	Nilai	B	C	Akan Tercapai
16.6.2.(a)	Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang	Biro Organisasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepahiang		Hijau	Hijau	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(b)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.	DUKCAPIL	%	100	98,71	Akan Tercapai
Tujuan SDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
Target Global : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang mapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.						

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Badan Pusat Statistik			39,83	Tercapai
<p>Target Global : Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>						
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa puas dengan Kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik			85,85	Tercapai
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik			91,94	Tercapai
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Badan Pusat Statistik			3	Tercapai

KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN 2020	CAPAIAN SDG's 2020	STATUS
Target Global : Pada Tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung Eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik			5,832	



2.6 Capaian SPM Kabupaten Kepahiang

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM harus mengintegrasikan SPM dalam perencanaan daerah lima tahunan dan tahunan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam LPPD serta melaksanakan SPM sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial. Pemerintah Daerah.

Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah pada table dibawah.

A. SPM Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Kabupaten Kepahiang berdsarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Kabupaten, Kabupaten terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memeberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta memepersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar.

3. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. Ada juga program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk melayani warga yang buta huruf.

2. Realisasi SPM Urusan Pendidikan

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang yang telah terealisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang pendidikan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target SPM Nasional/Prov	Target SPM Kabupaten	Capaian 2020
1.	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	95.50%	65.84%
2.	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	100 %	89.00%	98.55%
3.	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100 %	67.00%	98.04%
4.	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	0%	70.50%

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, Tahun 2020

Berdasarkan diatas dapat dideskripsikan bahwa dari rencana target capaian kabupaten untuk jumlah penduduk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dari 95.50% yang terlayani sebanyak 65.84%. Rencana target capaian jumlah penduduk 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dari target 89.00% tercapai sebanyak 98.55%. Rencana target capaian jumlah penduduk 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar SMP dari target 67.00% tercapai sebanyak 98.04%. Rencana target capaian penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dari target 0% tercapai sebanyak 70.50%.

3. Permasalahan Dan Solusi

Pembangunan bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang berjalan dengan baik, namun demikian dalam penyelenggaraan masih adanya permasalahan yang harus dihadapi. Berikut tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan SPM bidang pendidikan.

Tabel 2.82
Permasalahan dan Solusi Penerpan SPM
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya APK PAUD yang sesuai dengan target yang diharapkan 2. APK PAUD rendah terjadi karena jumlah anak pada usia 5-6 tahun yang terdata pada DUKCAPIL berjumlah lebih besar dari anak usia sekolah yang terdata pada DAPODIK 	Perbaiki sinkronisasi kependidikan dan data DUKCAPIL
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan tinggi dari orang tua dan minat siswa untuk menyekolahkan anak pada sekolah tertentu pada luar Kabupaten 2. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan rendah minat untuk sekolah 3. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pada sekolah 4. Tenaga pendidik pada sekolah yang belum mencukupi 	Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang dalam perbaikan sarana prasarana, Kualitas dan Tenaga Pendidik yang memadai
3	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan tinggi dari orang tua dan minat siswa untuk menyekolahkan anak pada sekolah tertentu pada luar Kabupaten 	Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kab. Kepahiang dalam perbaikan sarana prasarana, Kualitas dan Tenaga Pendidik yang

	dasar (SMP/MTs)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan rendah minat untuk sekolah 3. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pada sekolah 4. Tenaga pendidik pada sekolah yang belum mencukupi 	memadai
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Masih tingginya angka putus sekolah yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pendataan terpadu Anak Putus Sekolah pada setiap kecamatan dan penggratisan pendidikan kesetaraan dari pemerintah daerah, sehingga pencapaian nilai partisipasi pada pendidikan kesetaraan bisa maksimal

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

B. SPM Bidang Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Kepahiang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang memiliki tugas didalam urusan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan mutu pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan Standar Pelayanan Daerah Kabupaten terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan usia produktif
7. Pelayanan kesehatan usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)

10. Pelayanan kesehatan ODGJ berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB)
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV

2. Realisasi SPM Urusan Kesehatan

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.83
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Kabupaten	Capaian 2020
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	81%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	83%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	94%
Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	58%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	47%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	83%
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%	100%	50%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	81%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	100%	100%	83%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	100%	100%	96%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	100%	100%	58%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	100%	100%	63%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belum ada indikator yang mendapatkan capaian 100% sesuai dengan target capaian 100% Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 2.84
Permasalahan Dalam Penerapan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> * Masih ada ibu hamil yang datang kunjungan K1 tidak di triwulan 1 * Masih ada ibu hamil yang datang kunjungan K4 tidak triwulan ke 3 * Masih Kurangnya pemahaman dan integrasi petugas tentang ANC terpadu * Masih ditemukannya petugas yang belum melakukan 10 T yaitu pemeriksaan HB 	<ul style="list-style-type: none"> * Monitoring petugas tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat (Bumil) tentang pentingnya pemeriksaan bumil dan jadwal pemeriksaan * OJT peningkatan kapasitas petugas tentang ANC sesuai standar, ANC terpadu dan integrasi program yang terkait seperti program gizi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> * Masih adanya persalinan Nakes di non fasyankes * Masih adanya persalinan di non fasyankes seperti dukun dan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> * Rapat koordinasi pelaksanaan jampersal * Monitoring kepada petugas pelayanan kesehatan tentang pentingnya persalinan di fasyankes * Pendampingan petugas dalam advokasi kepada kades tentang persalinan sesuai standar yaitu di fasyankes dengan nakes
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> * Masih adanya bayi yang tidak berkunjung lagi pada jadwal KN lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> * Monitoring kepada petugas tentang bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat (Bulin) tentang pentingnya kunjungan KN lengkap
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none"> * Saat pandemi karena posyandu beberapa bulan tidak dilaksanakan ada beberapa kriteria tidak terpenuhi (sesuai Standar) seperti usia 0-11 bulan, 12-23 bulan, 24 dan 59 bulan mereka tidak melakukan penimbangan sampai 8 kali setahun jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan pelayanan sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> * Melakukan monitoring kepada petugas tentang bagaimana balita mendapatkan pelayanan kesehatan kepada balita sesuai standar walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang



5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> * Tidak semua sekolah melaksanakan penjangkaran karena belajar sistem daring 	<ul style="list-style-type: none"> * Penjangkaran dan berkala hanya dilakukan pada sekolah yang siswanya masuk
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> * Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> * Melaksanakan penkes ke masyarakat melalui kampanye PTM untuk usia 15 tahun ketas * Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di posbindu, puskesmas, desa dll seperti melaksanakan OJT faktor resiko PTM dll
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> * Pelayanan lansia diposyandu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi pandemi covid-19 * Pelayanan kesehatan lansia dipuskesmas hanya yang bermasalah kesehatan saja 	<ul style="list-style-type: none"> * Pelayanan kesehatan lansia (Screening) melalui kunjungan rumah termasuk kunjungan lansia resti * Monitoring kepada petugas lansia tentang antar jemput obat untuk lansia yang mempunyai penyakit kronis
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none"> * Masih adanya pasien yang tidak teratur untuk kontrol tekanan darah * Masih adanya masyarakat kita yang kurang pengetahuan mengenai hipertensi * Tingginya sasaran penderita hipertensi yang di tetapkan pusat sehingga kabupaten tidak bisa mencapai target yang telah di tetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> * Melaksanakan penkes, * Melaksanakan pelacakan kasus hipertensi yang belum terdata * Melaksanakan lp/lr untuk deteksi hipertensi lebih lanjut dan pengaturan nutrisi bagi penderita hipertensi * Telah dilaksanakan dialog dengan pusat kesehatan RI dan disepakati untuk merubah sasaran tahun 2020 sesuai dengan juknis dan menurunkan prevalensi HT kabupaten sehingga pelayanan hipertensi dapat di penuhi untuk seluruh penderita HT * Melaksanakan OJT bagi penderita untuk aktif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	<ul style="list-style-type: none"> * Masih adanya penderita DM yang belum sepenuhnya melakukan pengobatan secara medis / masih menggunakan obat tradisional * Tingginya sasaran penderita hipertensi yang di tetapkan pusat sehingga kabupaten tidak bisa mencapai target yang telah di tetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> * Penkes untuk penderita DM dan keluarga agar cek gula darah sewaktu untuk memantau kadar gula dalam darah * Bekerja sama dengan program gizi untuk mengatur menu makanan bagi penderita DM * Telah dilaksanakan dialog dengan pusat kesehatan RI dan disepakati untuk merubah sasaran tahun 2020 sesuai dengan juknis dan menurunkan prevalensi DM kabupaten sehingga pelayanan hipertensi dapat di penuhi untuk seluruh penderita DM * Melaksanakan OJT bagi penderita untuk aktif dalam

			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	* Masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa penyakit gangguan jiwa adalah penyakit yang bisa disembuhkan bukan penyakit yang dapat menyebabkan aib dan terus menerus di tutupi karena malu	* Melaksanakan koordinasi dengan gudang farmasi tentang penyediaan obat ODGJ, * Bekerjasama dengan dinas sosial untuk penanganan kasus ODGJ , * Meningkatkan penkes kepada keluarga pasien untuk terlibat aktif dalam memberikan pelayanan jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	* Pelacakan TBC masih dilakukan secara pasif * Investigasi Kontak (IK) belum dilakukan secara menyeluruh * Ketersediaan SDM analis untuk pemeriksaan TBC masih kurang dari 14 PKM yang ada baru 7 PKM * Program Kolaborasi TBC/HIV, TBC/DM masih rendah	* Melakukan pelacakan kasus / penyisiran kasus dengan turun langsung ke desa-desa * Pembinaan kader pada post tb desa * Mengajukan penambahan SDM untuk di PKM
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	* Stigma masyarakat yang mempunyai faktor resiko penularan HIV masih menganggap penyakit HIV merupakan penyakit yang menjadi aib bagi mereka sehingga mereka menutup diri secara individu dan kelompok untuk mendapatkan skrining dari petugas, * Pasien yang diduga terjadi penularan masih mengabaikan standar pelayanan pengobatan sehingga tidak dapat melacak penularan lain dan sumber penularan yang terjadi disuatu populasi, * Standar pelayanan konseling yang ada masih terbatas yaitu VCT dipuskesmas yang baru ada di puskesmas Ujan mas dan RSUD Kepahiang	* Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV * Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pemeriksaan HIV terutama untuk orang dengan faktor resiko penularan HIV seperti ibu hamil

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Kabupaten dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

2. Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target SPM Nasional/Prov	Target SPM Kabupaten	Capaian 2020
1.	Jumlah warga /SR yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100%		200 SR
2.	Jumlah warga / KK yang memperoleh pengelolaan air limbah domestik	100%		140 KK

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Tahun 2020

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.86
Permasalahan Dalam Penerapan SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah SR Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;	Perlunya dukungan dari pemerintah daerah untuk menganggarkan urusan dan program dalam penerapan dan pencapaian SPM.
2.	Jumlah KK yang memperoleh pengelolaan air limbah domestik		

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Kabupaten dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target SPM Nasional/Prov	Target SPM Kabupaten	Capaian 2020
1.	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%		
2.	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Tahun 2020

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.88
Permasalahan Dalam Penerapan SPM
Bidang perumahan Rakyat Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga korban bencana yang	Masih terbatasnya SDM dalam menunjang	Dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi ASN



	memperoleh rumah layak huni	pelaksanaan kegiatan	dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
2.	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	Belum sinerginya upaya implementasi SPM	Perlu adanya monitoring, evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan dan implementasi SPM

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Tahun 2020

E. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



2. Realisasi SPM Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kemanan, ketertiban Umum dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.89
Realisasi Capaian SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target SPM Nasional/Prov	Target SPM Kabupaten	Capaian 2020
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	100%	75%
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP Damkar dan BPBD , Tahun 2020

3. Permasalahan dan Solusi

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas Kabupaten Kepahang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.90
Permasalahan Dalam Penerapan SPM Keamanan, Ketertiban Umum Dan Linmas Kabupaten Kepahang Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Masih tingginya pelanggaran Perda dan Perkada dan masih minimnya ASN berkualifikasi PPNS	Perlu ditingkatkan sosialisasi Perda dan Perkada serta penambahan ASN yang berkualifikasi PPNS
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	Belum optimalnya pelayanan kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat kota	Akan dibentuk relawan pemadam kebakaran di setiap Kecamatan yang jauh dari pusat kota





	evakuasi korban kebakaran		
--	---------------------------	--	--

Sumber : Satpol PP Damkar dan BPBD , Tahun 2020

F. SPM Bidang Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota

2. Realisasi SPM Bidang Sosial

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang sosial Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.91
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial
Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target SPM Nasional/Prov	Target SPM Kabupaten	Capaian 2020
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	660 Jiwa/Tahun	43 Jiwa (6,52%)/Tahun
2.	Jumlah anak terlantar	100%	122	89 Jiwa



	yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		Jiwa/Tahun	(72,95)/Tahun
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	4748 Jiwa/Tahun	373 Jiwa/(7,86%)/Tahun
4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	-
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	33 KK, 36 Jiwa/Tahun	33 KK,36 Jiwa/Tahun (100%)

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Tahun 2020

Tabel 2.92
Permasalahan Dalam Penerapan SPM Keamanan, Ketertiban Umum Dan Linmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang tidak dapat diprediksi dan yang terbantu masih belum memadai, hal ini disebabkan keterbatasan dari anggaran APBD yang tersedia.	Melaksanakan jejaring kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, baik itu Lembaga Kesejahteraan Sosial/ yayasan Sosial yang ada di Kabupaten Kepahiang serta Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
		Lembaga Disabilitas di Kabupaten Kepahiang telah didirikan dan mulai berjalan, namun masih sangat memerlukan	Memberikan dukungan kepada Lembaga Sosial Disabilitas, agar dapat berjalan maksimal, dalam hal ini diperlukan juga dukungan dana APBD

		perhatian dan bimbingan untuk mengembangkan lembaga tersebut.	
		Kurangnya kepedulian masyarakat dan aparat pemerintahan desa dalam kelengkapan administrasi kependudukan pasien penyandang disabilitas	Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait, baik aparat pemerintahan desa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kepahiang.
2.	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dukungan Dana Operasional bagi Petugas Sosial belum seimbang dengan beban kerja.	Mengupayakan dukungan Dana APBD guna mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan anak di Kabupaten Kepahiang.
		Kurangnya kepedulian antar sesama, sehingga menyebabkan keluarga rentan sosial lengah dalam melindungi anggota keluarga mereka.	Menumbuhkembangkan rasa kepedulian antar sesama, dimulai dari perangkat agama dan instansi terkait agar lebih mengembangkan program yang pro terhadap keluarga rentan sosial
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Belum adanya lembaga sosial yang secara khusus menangani lanjut usia	Menjaring SDM yang berkompeten dan berjiwa sosial tinggi guna menumbuhkembangkan rasa kepedulian sosial terhadap lanjut usia.
		Kurangnya kepedulian masyarakat dan aparat pemerintahan desa dalam kelengkapan administrasi kependudukan lanjut usia aktif dan tidak produktif lagi	Diperlukan Tenaga SDM yang handal dan berjiwa sosial yang tinggi.

4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah orang terlantar tidak dapat diprediksi	Menumbuhkembangkan rasa kepedulian antar sesama, dimulai dari perangkat agama dan instansi terkait agar lebih mengembangkan program yang pro terhadap orang terlantar
		Jumlah mayat terlantar tidak dapat diprediksi	Diperlukan Tenaga SDM yang handal dalam pengurusan mayat terlantar.
5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Kurangnya dana untuk pengadaan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial.	Perencanaan dalam anggaran yang lebih efektif sesuai dengan prioritas kegiatan
		Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kegiatan bencana alam dan sosial	Perencanaan dalam anggaran untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana
		Kurangnya biaya operasional saat pendataan pasca bencana alam dan bencana sosial bagi tenaga relawan yang ikut membantu dilapangan	Penambahan Jasa Tali Asih untuk Tenaga Relawan Siaga Bencana.

Sumber : Dinas Sosial , Tahun 2020

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah untuk menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat kebijakan.

Kebijakan tersebut berupa kebijakan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik berdasarkan informasi keuangan yang meliputi:

- a. informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, dan pembiayaan. Dalam menyajikan informasi keuangan, untuk menyusun suatu kebijakan hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 masih berdasarkan aturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Pendapatan Daerah

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- (b) Dana perimbangan dan
- (c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Selama tahun 2016 hingga 2020, rata-rata rasio kemandirian fiskal Kabupaten Kepahiang sebesar 4.8 % yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan masih sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pola hubungan seperti ini disebut sebagai pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan karena daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahang
Tahun Anggaran 2016-2020*)

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,455,382,716.17	30,212,642,457.48	34,444,903,015.92	36,278,690,193.33	37,337,766,411.64
	Pendapatan Pajak Daerah	5,420,235,319.09	5,727,430,852.86	6,101,689,361.00	6,927,038,573.80	6,105,164,433.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	1,399,705,440.00	1,065,066,078.00	846,269,830.00	762,160,100.00	386,017,175.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,736,507,941.73	3,634,148,977.12	2,881,073,606.47	2,001,704,255.53	2,172,111,294.34
	Lain-lain PAD Yang Sah	19,898,934,015.35	19,785,996,549.50	24,615,870,218.45	26,587,787,264.00	28,674,473,524.30
2	PENDAPATAN TRANSFER	650,996,024,189.07	650,589,925,014.02	632,481,877,468.87	677,216,159,917.24	635,101,622,249.50
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	566,217,094,247.00	546,319,382,894.00	534,765,881,190.00	574,572,735,472.00	535,970,456,286.00
	Bagi Hasil Pajak	12,654,270,584.00	8,428,092,345.00	7,631,968,018.00	5,602,919,600.00	7,031,689,497.00

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5,344,197,976.00	4,203,908,885.00	6,165,760,631.00	5,852,041,219.00	7,073,081,062.00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	421,122,369,000.00	413,724,603,000.00	414,396,205,000.00	437,111,102,000.00	396,946,604,000.00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	127,096,256,687.00	119,962,778,664.00	106,571,947,541.00	126,006,672,653.00	124,919,081,727.00
	Dana Perimbangan dari Provinsi					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0.00	81,496,592,000.00	74,957,867,800.00	85,736,940,000.00	86,691,075,000.00
	Dana Penyesuaian - LRA	0.00	81,496,592,000.00	74,957,867,800.00	85,736,940,000.00	86,691,075,000.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	84,778,929,942.07	22,773,950,120.02	22,758,128,478.87	16,906,484,445.24	12,440,090,963.50
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20,530,550,073.07	22,773,950,120.02	22,758,128,478.87	16,906,484,445.24	12,440,090,963.50
	Pendapatan	64,248,379,869.00				

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	Bagi hasil Lainnya					
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,019,000,000.00	13,000,000,000.00	16,433,863,136.00	17,352,969,049.00	51,086,272,159.00
	Pendapatan Hibah	2,019,000,000.00	13,000,000,000.00	16,433,863,136.00	17,352,969,049.00	41,115,379,159.00
	Pendapatan Dana Darurat					
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi					
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
	Pendapatan Lainnya					9,970,893,000.00
	TOTAL	684,470,406,905.24	693,802,567,471.50	683,360,643,620.79	730,847,819,159.57	723,525,660,820.14

Sumber : LKPD Kabupaten Kepahang 2016-2020

*) TA. 2020 Unaudited

Pada Tahun 2017 realisasi riil PAD Kabupaten Kepahiang mengalami penurunan sebesar 3,5%, dimana pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 31,46 miliar menjadi Rp. 30,21 miliar pada tahun 2017. Penurunan realisasi riil PAD ini akibat berkurangnya penerimaan PAD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan. Pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 4,7 miliar sedangkan pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp. 3,6 miliar.

Hal yang sama juga terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang turun sebesar 3,5% dimana pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 566,21 miliar sedangkan pada tahun 2017 berkurang menjadi Rp. 546,31 miliar. Penurunan ini disebabkan berkurangnya pendapatan dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Trend penurunan ini terus berlangsung hingga tahun 2018, pada tahun 2018 total pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp. 683,36 miliar sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 693,80 miliar atau mengalami penurunan sebesar 1,5%. Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya penerimaan pada pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan, bagi hasil pajak, bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan DAK.

Realisasi penerimaan riil pendapatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2019 mengalami peningkatan hampir mendekati 7%. Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 730,84 miliar. Kenaikan realisasi ini terjadi karena adanya kenaikan pada pos Lain-lain PAD yang sah, DAU, DAK, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Hibah.

Sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi penerimaan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan realisasi penerimaan DAU dan DAK sebagai akibat kebijakan *refocusing*

anggaran belanja pemerintah untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia.

Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan Kabupaten Kepahang baik PAD, Pendapatan Transfer Pusat dan Lain-lain Pendapatan yang Sah selama tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 1,45%.

Sejak tahun 2015 pemerintah menggelontorkan kebijakan Dana Desa yang dituang kedalam bentuk transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. TKDD terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Dana Desa. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan valid. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

2. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

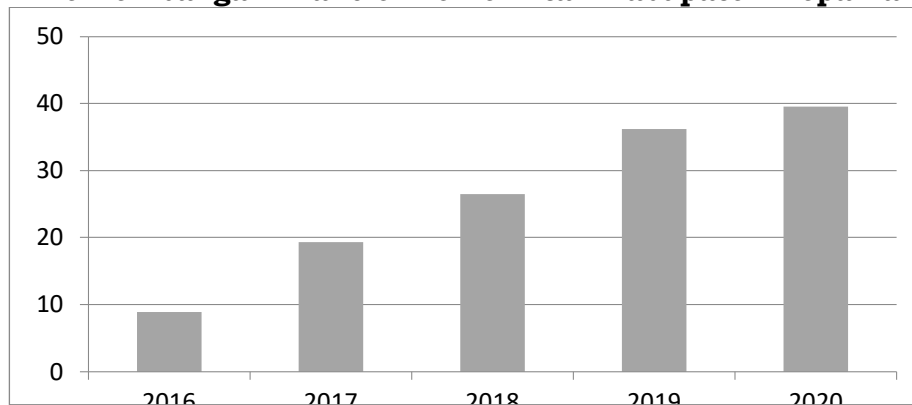
Daerah yang telah diberikan oleh Tuhan kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertical (*vertical imbalance*) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai horizontal imbalance.

3. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan performance atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

Dalam beberapa hal, perhitungan TKDD menggunakan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai salah satu komponen perhitungan, maka daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dan luas wilayahnya akan maka mendapatkan alokasi TKDD yang lebih daripada daerah yang jumlah penduduknya sedikit dan luas wilayahnya kecil.

Grafik 3.1
Perkembangan Transfer Pemerintah Kabupaten Kepahang



Pada tahun 2018, terjadi penurunan dana transfer pusat untuk Dana Desa menjadi Rp. 120,5 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 127,7 miliar. Kenaikan Dana Desa pada tahun 2019 disebabkan kebijakan kenaikan alokasi APBN sebesar 16,6 persen. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi Dana Desa hanya naik sebesar 2 persen dari tahun sebelumnya atau Rp 71,2 triliun. Kenaikan anggaran sebesar 2 persen tersebut, selain digunakan untuk pembangunan di desa, juga untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

B. Belanja Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian

wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya pada bidang tertentu bisa dilaksanakan antar pemerintah daerah dengan ketentuan undang-undang. Tujuan belanja daerah adalah :

1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
2. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

Klasifikasi jenis belanja daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Sedangkan klasifikasi belanja daerah didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dikelompokkan kedalam fungsi Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan sosial.

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2020*)

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	BELANJA OPERASI	429,214,191,335.35	409,681,496,498.04	449,482,892,619.60	498,711,998,806.70	533,329,893,797.42
	Belanja Pegawai	262,343,577,936.35	241,087,547,949.04	248,034,552,427.60	267,130,146,210.00	265,926,929,533.00
	Belanja Barang dan Jasa	164,079,613,399.00	165,439,848,549.00	197,988,138,192.00	225,898,393,224.70	220,097,499,159.42
	Belanja Bunga					687,015,105.00
	Belanja Hibah	2,791,000,000.00	3,154,100,000.00	3,460,202,000.00	5,673,459,372.00	40,081,150,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	0.00			10,000,000.00	6,537,300,000.00
2	BELANJA MODAL	143,440,990,642.28	148,289,579,963	102,985,195,324	98,486,748,260.73	83,709,787,737.81
	Belanja Modal Tanah	0.00	2,817,680,000.00	135,879,000.00	3,720,000,000.00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,136,855,315.28	29,038,219,320.20	18,496,132,714.00	27,691,295,485.30	35,404,483,165.38
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,327,458,758.00	39,443,820,265.00	32,127,700,160.00	19,798,167,738.70	18,496,288,836.59
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	89,510,089,569.00	75,012,594,378.00	48,422,043,450.00	36,050,362,906.73	15,604,860,125.84
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,466,587,000.00	1,977,266,000.00	3,803,440,000.00	11,226,922,130.00	14,204,155,610.00

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	Belanja Modal Aset Lainnya					
3	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	196,655,230.00	625,895,900.00	136,424,000.00	2,974,123,000.00
	Belanja Tak Terduga	0.00	196,655,230.00	625,895,900.00	136,424,000.00	2,974,123,000.00
	TOTAL	572,655,181,977.63	558,167,731,691.24	553,093,983,843.60	597,335,171,067.43	620,013,804,535.23

Sumber : LKPD Kab. Kepahiang 2016-2020

*)Unaudited

Tren belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan grafik yang meningkat walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,6 %. Selama kurun waktu tersebut juga, rata-rata realisasi belanja pegawai mencapai 47,45% dari seluruh belanja yang ada. Hal ini berbanding terbalik terhadap belanja modal hanya sebesar 21,1% dari total belanja. Belanja pegawai yang mendekati 50% dari jumlah belanja, tidak terlalu baik bagi daerah karena belanja ini dipandang tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah untuk jangka panjang.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.3
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kepahiang TA 2016-2020 (dalam jutaan)

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020*) (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	12.156,73	21.391,96	27.517,36	36.287,00	39.577,53
Pengeluaran Pembiayaan	3.193,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0
Pembiayaan Netto	8.963,43	19.391,96	26.517,36	35.287,00	39.577,53

Sumber : LKPD Kab. Kepahiang TA 2016-2020

*) *unaudited*



Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp.12,15 miliar. Realisasi penerimaan ini berasal dari SilPA tahun 2015 sebesar Rp. 12,14 miliar dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya berupa pengembalian pokok dana bergulir pada TA 2016 sebesar Rp. 13,53 juta. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 3 miliar merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dan pengembalian dana kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 193,3 juta.

Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp. 21,39 miliar yang berasal dari SiLPA tahun 2016 sebesar Rp. 21,36 miliar ditambah dengan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya berupa pengembalian pokok dana bergulir pada TA 2017 sebesar Rp. 28,45 juta. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2 miliar merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu.

Selanjutnya, pada tahun 2018 realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp. 27,51 miliar yang berasal dari SiLPA tahun 2017 sebesar Rp. 27,27 miliar ditambah dengan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya berupa pengembalian pokok dana bergulir pada TA 2018 sebesar Rp. 15,07 juta serta SILPA Kas bendahara Dana BOS tahun 2017 sebesar Rp. 231,14 juta. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1 miliar merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 36,28 miliar yang berasal dari SiLPA tahun 2018 sebesar Rp. 36,24 miliar ditambah dengan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya berupa pengembalian

pokok dana bergulir pada TA 2019 sebesar Rp. 46,08 juta. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1 miliar merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Kepahang

No	URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	684,470,406,905.24	693,802,567,471.50	683,360,643,620.79	730,847,819,159.57	723,519,894,074.55	0.0145
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,455,382,716.17	30,212,642,457.48	34,444,903,015.92	36,278,690,193.33	37,331,999,666.05	0.0457
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	5,420,235,319.09	5,727,430,852.86	6,101,689,361.00	6,927,038,573.80	6,105,164,433.00	0.0347
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1,399,705,440.00	1,065,066,078.00	846,269,830.00	762,160,100.00	386,017,175.00	-0.2594
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,736,507,941.73	3,634,148,977.12	2,881,073,606.47	2,001,704,255.53	2,172,111,279.34	-0.165
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19,898,934,015.35	19,785,996,549.50	24,615,870,218.45	26,587,787,264.00	28,668,706,778.71	0.0992
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	566,217,094,247.00	546,319,382,894.00	534,765,881,190.00	574,572,735,472.00	535,970,456,286.00	-0.0123
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17,998,468,560.00	12,632,001,230.00	13,797,728,649.00	11,454,960,819.00	14,104,770,559.00	-0.0361
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	421,122,369,000.00	413,724,603,000.00	414,396,205,000.00	437,111,102,000.00	396,946,604,000.00	-0.0133
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	127,096,256,687.00	119,962,778,664.00	106,571,947,541.00	126,006,672,653.00	124,919,081,727.00	0.0015
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	86,797,929,942.07	117,270,542,120.02	114,149,859,414.87	119,996,393,494.24	150,217,438,122.50	0.1569
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	2,019,000,000.00	13,000,000,000.00	16,433,863,136.00	17,352,969,049.00	41,115,379,159.00	1.7821
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20,530,550,073.07	22,773,950,120.02	22,758,128,478.87	16,906,484,445.24	12,440,090,963.50	-0.1032
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	64,248,379,869.00	81,496,592,000.00	74,957,867,800.00	85,736,940,000.00	86,691,075,000.00	0.0858

4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						
5		672,070,332,826.63	685,923,382,807.24	673,637,092,503.60	731,066,462,749.43	760,513,764,961.23	0.032
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	364,188,639,785.35	370,323,699,295.04	372,102,458,987.60	406,150,670,664.00	456,154,074,564.00	0.059
5.1.1	Belanja Pegawai	261,982,488,936.35	239,217,292,949.04	247,473,252,427.60	266,599,495,610.00	265,368,929,533.00	0.005
	Belanja Bunga				0	687,015,105.00	
5.1.4	Belanja Hibah	2,791,000,000.00	3,154,100,000.00	3,460,202,000.00	5,812,747,372.00	40,081,150,000.00	1.701
	Belanja Bantuan Sosial				10,000,000.00	6,537,300,000.00	163.183
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	99,415,150,849.00	127,755,651,116.00	120,543,108,660.00	133,592,003,682.00	140,532,556,926.00	0.097
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	196,655,230.00	625,895,900.00	136,424,000.00	2,947,123,000.00	5.501
5.2	BELANJA LANGSUNG	307,881,693,041.28	315,599,683,512.20	301,534,633,516.00	324,915,792,085.43	304,359,690,397.23	-0.001
5.2.1	Belanja Pegawai	32,976,979,687.00	26,198,688,725.00	26,123,425,250.00	29,750,392,044.00	30,346,673,994.00	-0.012
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131,463,722,712.00	141,111,414,824.00	172,426,012,942.00	196,670,651,780.70	190,303,228,665.42	0.101
5.2.3	Belanja Modal	143,440,990,642.28	148,289,579,963.20	102,985,195,324.00	98,494,748,260.73	83,709,787,737.81	-0.116
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,156,739,189.45	21,391,964,949.06	27,517,366,371.32	36,287,005,474.10	39,576,569,884.24	0.364
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12,143,204,097.45	21,363,509,018.06	27,502,290,431.32	36,240,917,488.51	35,207,649,884.24	0.334
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				0	4,368,920,000.00	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	13,535,092.00	28,455,931.00	15,075,940.00	46,087,985.59		0.422

6.1.7	Penarikan Penyertaan Modal						
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,193,304,250.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		-0.468
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		-0.458
6.2.5	Pengembalian Dana ke Pemerintah Pusat	193,304,250.00					
	PEMBIAYAAN NETTO	8,963,434,939.45	19,391,964,949.06	26,517,366,371.32	35,287,005,474.10	39,576,569,884.24	0.496
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	21,363,509,018.06	27,271,149,613.32	36,240,917,488.51	35,068,361,884.24	2,582,698,997.56	-0.088

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahang

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, rata-rata pertumbuhan pendapatan APBD Kabupaten Kepahiang setiap tahun selama tahun 2016 hingga 2020 sebesar 1,85%. Pendapatan APBD ini terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari sisi kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih sangat tergantung dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Rata-rata PAD Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 – 2020 sebesar Rp. 33,94 miliar, sedangkan pendapatan rata pendapatan transfer pada periode yang sama sebesar Rp. 551,56 miliar. Dari data tersebut diatas, dapat dihitung nilai rasio rata-rata kemandirian yang dimiliki Kabupaten Kepahiang sebesar 4,83 %.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah juga menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Kepahang 2016 – 2020*)

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	Pertumbuhan (%)
1	TOTAL ASET	1,090,132,992,354	1,154,799,874,872	1,214,275,007,121	1,281,086,977,233	1,210,117,246,532	2.8
11	ASET LANCAR	50,373,417,404	48,177,336,256	75,246,696,165	81,317,769,462	36,630,485,701	1.2
111	Kas dan Setara Kas	21,921,101,702	27,922,530,672	44,592,173,463	35,639,202,531	2,998,094,816	-6.1
112	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
113	Piutang Pendapatan	1,910,359,849	14,042,093,493	15,786,761,648	27,044,229,652	26,201,107,740	178.9
114	Piutang Lainnya	9,130,334,183	2,261,010,342	1,655,157,056	-	783,220,616	-50.5
115	Penyisihan Piutang	-	(1,608,113,946)	(2,033,959,049)	(2,343,802,651)	(3,927,132,817)	27.3
116	Beban dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
117	Persediaan	17,411,621,670	5,559,815,694	15,246,563,047	18,634,337,279	10,575,195,344	21.3
118	Aset untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-	-
119	Aset Lancar Lainnya	-	-	-	-	-	-
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	35,710,929,748	36,712,083,661	36,703,650,959	36,622,093,434	35,403,094,160	-0.2
121	Investasi Nonpermanen	-	-	-	-	-	-
122	Investasi Permanen	35,710,929,748	36,712,083,661	36,703,650,959	36,622,093,434	35,403,094,160	-0.2
13	ASET TETAP	978,368,803,221	1,057,344,304,753	1,087,399,345,777	1,128,551,575,770	1,125,070,352,920	3.6
131	Tanah	80,429,827,438	78,247,972,438	78,385,701,438	102,662,291,438	99,615,025,842	6.4
132	Peralatan dan Mesin	214,831,701,840	233,064,910,923	244,442,595,504	268,017,158,585	298,927,615,224	8.6
133	Gedung dan Bangunan	434,465,661,288	444,464,903,328	477,871,099,203	525,942,051,403	534,766,687,119	5.4
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	800,496,903,846	865,563,785,043	916,483,932,173	1,030,206,049,308	1,035,620,188,957	6.7

135	Aset Tetap Lainnya	37,977,616,016	35,770,179,276	37,142,364,368	38,336,620,498	39,286,650,308	0.9
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	80,979,229,171	85,352,928,498	90,831,482,798	2,917,317,000	10,231,206,388	41.4
137	Akumulasi Penyusutan	(670,812,136,377)	(685,120,374,754)	(757,757,829,707)	(839,529,912,462)	(893,377,020,919)	7.5
14	DANA CADANGAN	-	-				
141	Dana Cadangan	-					
15	ASET LAINNYA	25,679,841,980	12,566,150,202	14,925,314,220	20,140,576,864	13,013,313,750	-8.2
151	Tagihan Jangka Panjang	-					
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-					
153	Aset Tak Berwujud	129,245,000	129,245,000	129,245,000	129,245,000	129,245,000	
154	Aset Lain-Lain	25,550,596,980	12,436,905,202	14,796,069,220	34,466,293,567	18,498,184,843	13.6
155	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				(14,454,961,702)	(5,614,116,093)	
2	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,090,132,992,354	1,154,799,874,872	1,214,275,007,121	1,281,086,977,233	1,210,117,246,531	2.8
21	KEWAJIBAN	10,959,270,529	3,050,692,295	13,584,890,521	7,103,495,442	9,363,413,474	64.3
211	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,959,270,529	3,050,692,295	13,584,890,521	7,103,495,442	4,994,493,474	48.9
212	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	395,617,548	334,485,242	314,386,667	689,082,190	671,790,862	23.8
213	Utang Bunga	-					
214	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-					
215	Pendapatan Diterima di Muka	-					
216	Utang Belanja	-	2,340,943,321	11,119,549,138	6,123,377,816	4,079,667,177	74.2
217	Utang Jangka Pendek Lainnya	10,563,652,981	375,263,732	2,150,954,716	291,035,436	243,035,435	68.4
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-			4,368,920,000	
221	Utang Dalam Negeri	-				4,368,920,000	

222	Utang Jangka Panjang Lainnya	-					
3	EKUITAS	1,079,173,721,824	1,151,749,182,577	1,200,690,116,600	1,273,983,481,792	1,200,753,833,056	2.8
311	EKUITAS	1,079,173,721,824	1,151,749,182,577	1,200,690,116,600	1,273,983,481,792	1,200,753,833,056	2.8
312	Ekuitas	1,079,173,721,824	1,151,749,182,577	1,200,690,116,600	1,273,983,481,792	1,200,753,833,056	2.8

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang

Berdasarkan neraca daerah pada tabel 3.5 diatas dapat diperoleh beberapa informasi berkaitan dengan beberapa hal antara lain rasio lancar, rasio cair (*quick rasio*), rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal. Uraian masing-masing rasio adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Lancar} \\ \text{(Current Ratio)} \end{array} = \frac{\text{Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

b. Rasio Cair

Rasio Cair (*Quick Ratio*) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan/penerimaan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

$$\begin{array}{l} \text{Rasio Cair} \\ \text{(Quick Ratio)} \end{array} = \frac{\text{(Aset Lancar - Peresediaan)}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$$

c. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*)

Rasio hutang terhadap aset adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap total aset dihitung

dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

$$\text{Rasio Utang Terhadap Aset} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

(Debt Ratio)

d. Rasio Hutang terhadap Modal

Rasio hutang terhadap Modal adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka panjangnya menggunakan modal yang dimilikinya. Rasio hutang terhadap modal dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga.

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

Tabel 3.6
Perkembangan Penghitungan Neraca Daerah
Kabupaten Kepahang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio Lancar (Kas/hutang Jangka Pendek)	4.60	15.79	5.54	11.45	7.33
2.	Rasio Cair (Aset Lancar-Persediaan)/Hutang Jangka Pendek	3.01	13.97	4.42	8.82	5.22



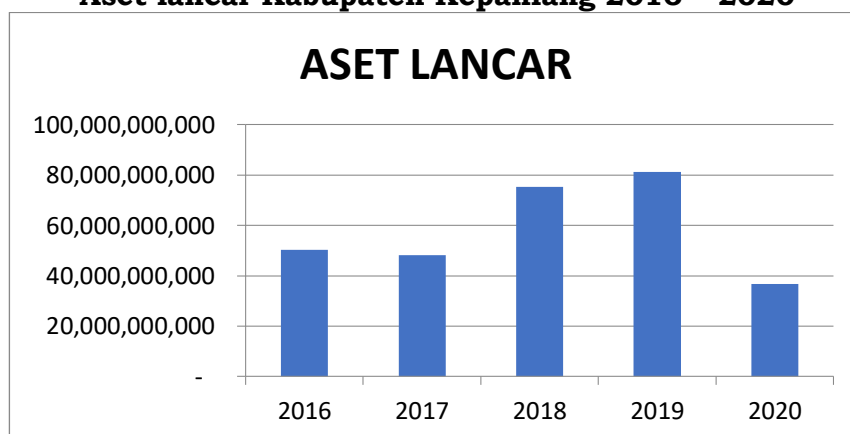
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Hutang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>) (Total kewajiban/Total Aset)	0.010	0.003	0.011	0.006	0.008
2	Rasio Hutang Terhadap Modal	0.010	0.003	0.011	0.006	0.008

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang (data diolah)

Sementara itu, rata-rata total aset pertahun Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu 2016 – 2020 sebesar Rp. 1.190 miliar. Total Aset ini terdiri atas rata-rata aset lancar dengan nilai Rp. 58,34 miliar, Investasi jangka panjang dengan rata-rata Rp. 36,23 miliar, rata-rata Aset Tetap Rp. 1.075 miliar dan Aset Lainnya Rp. 17,26 miliar

Berikut grafik perkembangan aset lancar Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu 2016 – 2020. Aset lancar yang dimaksud adalah aset jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Grafik 3.2
Aset lancar Kabupaten Kepahiang 2016 – 2020



Penurunan drastis atas aset lancar Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh

penurunan jumlah Kas di Kas Daerah dimana pada tahun 2019 tercatat Rp. 33,16 miliar turun menjadi Rp. 18,48 miliar. Jumlah persediaan pada tahun 2019 sebesar Rp. 18,63 miliar menjadi Rp. 10,57 miliar. Begitu juga dengan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Jumlah investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang hingga akhir periode pelaporan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 35,40 miliar. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Investasi permanen Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam bentuk penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu dan PDAM

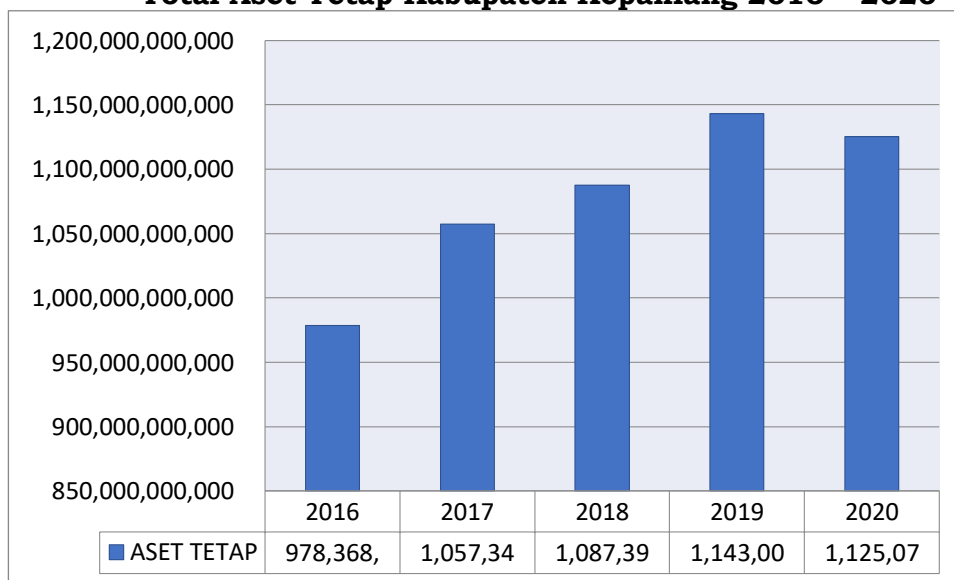
Grafik 3.3
Investasi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2016 – 2020



Aset tetap yang dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu 2016 – 2020 sebesar Rp. 1,125 miliar. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan , irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (*unaudited*) pada tahun 2020, aset tanah senilai Rp. 99,61 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp. 298,92 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp. 534,76 miliar, jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp. 1,035.62 miliar, aset tetap lainnya senilai Rp. 39,28 miliar, dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 10,23 miliar.

Berikut ini grafik yang menggambarkan perkembangan total aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang periode tahun 2016 hingga 2020.

Grafik 3.4
Total Aset Tetap Kabupaten Kepahiang 2016 – 2020

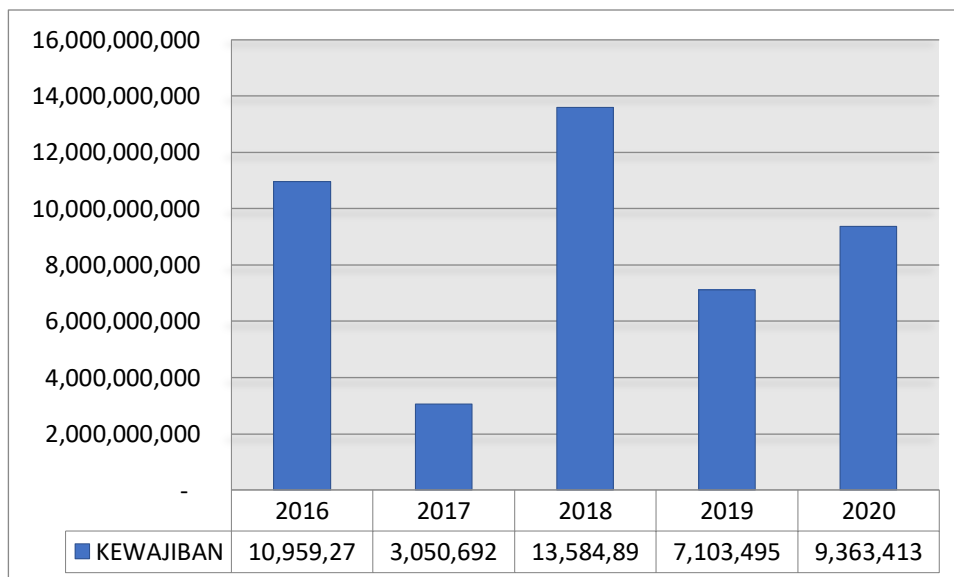


Dari tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang meningkat dengan rata-rata prosentase pertumbuhan sebesar 3,6%. Sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah aset tetap sebesar 2%. Penurunan ini akibat

akumulasi penyusutan sebesar Rp. 893,37 miliar serta rendahnya serapan belanja modal dimana pada tahun 2020 hanya tercatat Rp. 83,70 miliar dari anggaran Rp. 165,67 miliar atau hanya terserap sebesar 50.53%. Hal ini diduga akibat *refocusing* dana APBD dalam rangka penanganan COVID-19 sesuai dengan instruksi pemerintah.

Kewajiban yang tercatat pada neraca daerah per 31 Desember 2020, kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 9,36 miliar. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Grafik 3.5
Kewajiban Kabupaten Kepahiang 2016 – 2020

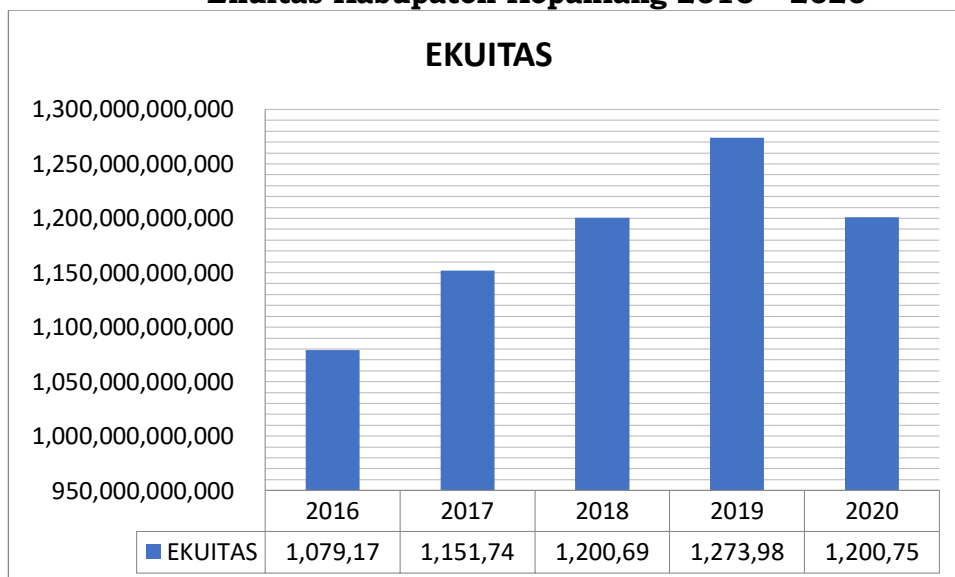


Kewajiban yang tercatat selama tahun 2016 hingga 2020 didominasi oleh kewajiban jangka pendek dan pada tahun 2020 tercatat kewajiban sebesar Rp. 9,36 miliar dimana kewajiban

jangka pendek sebesar Rp. 4,99 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 4,36 miliar.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pertanggal 31 Desember 2020, saldo ekuitas pemerintah Kabupaten kepahiang sebesar Rp. 1,200 miliar. Berikut ini grafik yang menggambarkan perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2016 hingga 2020.

Grafik 3.6
Ekuitas Kabupaten Kepahiang 2016 – 2020



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2016 sampai dengan tahun 2020 pengelolaan keuangan daerah mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;

- c. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan; dan
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta sistem dan prosedur pelayanan.

Untuk mencapai target dan hasil yang optimal, maka upaya-upaya yang dilaksanakan dituangkan dalam strategi pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen melalui teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan;
- b. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pendapatan;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi atas pendapatan dan penerimaan daerah;
- e. Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan

- f. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

2. Kebijakan Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, memedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Secara umum tentang belanja daerah yang menginformasikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kepahang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Kepahiang TA. 2021-2026

URAIAN	2016			2017			2018		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA	725,527,297,047.96	672,070,332,826.63	92.63	741,544,050,469.57	685,923,382,807.24	92.499	714,759,230,552.76	673,637,092,503.60	94.247
BELANJA TIDAK LANGSUNG	384,203,810,772.79	364,188,639,785.35	94.79	386,665,591,749.19	370,323,699,295.04	95.774	395,536,216,749.76	372,102,458,987.60	94.075
Belanja Pegawai	279,409,403,992.79	261,982,488,936.35	93.76	254,039,154,869.19	239,217,292,949.04	94.166	268,813,935,569.76	247,473,252,427.60	92.061
Belanja Bunga									
Belanja Hibah	4,357,000,000.00	2,791,000,000.00	64.06	3,711,600,000.00	3,154,100,000.00	84.98	4,709,800,000.00	3,460,202,000.00	73.468
Belanja Bantuan Sosial									
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	100,037,406,780.00	99,415,150,849.00	99.38	128,414,836,880.00	127,755,651,116.00	99.487	121,112,481,180.00	120,543,108,660.00	99.53
Belanja Tidak Terduga	400,000,000.00			500,000,000.00	196,655,230.00	39.331	900,000,000.00	625,895,900.00	69.544
BELANJA LANGSUNG	341,323,486,275.17	307,881,693,041.28	90.2	354,878,458,720.38	315,599,683,512.20	88.932	319,223,013,803.00	301,534,633,516.00	94.459
Belanja Pegawai	35,166,182,952.00	32,976,979,687.00	93.77	27,929,887,750.00	26,198,688,725.00	93.802	27,892,503,000.00	26,123,425,250.00	93.658
Belanja Barang dan Jasa	143,200,730,136.17	131,463,722,712.00	91.8	161,005,685,153.38	141,111,414,824.00	87.644	183,086,182,904.00	172,426,012,942.00	94.178
Belanja Modal	162,956,573,187.00	143,440,990,642.28	88.02	165,942,885,817.00	148,289,579,963.20	89.362	108,244,327,899.00	102,985,195,324.00	95.141

URAIAN	2019			2020		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA	851,780,778,237.73	731,066,462,749.43	86	864,246,570,901.22	760,513,764,961.23	88
BELANJA TIDAK LANGSUNG	432,707,950,692.73	406,150,670,664.00	94	466,608,878,817.60	456,154,074,564.00	98
Belanja Pegawai	287,402,602,912.73	266,599,495,610.00	93	271,011,287,577.60	265,368,929,533.00	98
Belanja Bunga	1,000,000,000.00	0		930,000,000.00	687,015,105.00	74
Belanja Hibah	8,235,180,000.00	5,812,747,372.00	71	41,461,970,000.00	40,081,150,000.00	97
Belanja Bantuan Sosial	200,000,000.00	10,000,000.00	5	6,600,000,000.00	6,537,300,000.00	99
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa	135,370,167,780.00	133,592,003,682.00	99	142,105,621,240.00	140,532,556,926.00	99
Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	136,424,000.00	27	4,500,000,000.00	2,947,123,000.00	65
BELANJA LANGSUNG	419,072,827,545.00	324,915,792,085.43	78	397,637,692,083.62	304,359,690,397.23	77
Belanja Pegawai	31,768,859,050.00	29,750,392,044.00	94	31,721,907,838.00	30,346,673,994.00	96
Belanja Barang dan Jasa	210,419,103,253.00	196,670,651,780.70	93	200,241,414,348.62	190,303,228,665.42	95
Belanja Modal	176,884,865,242.00	98,494,748,260.73	56	165,674,369,897.00	83,709,787,737.81	51

Trend realisasi belanja daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2016 hingga 2020 menunjuk trend fluktuatif. Trend fluktuatif didukung oleh rata-rata pertumbuhan realisasi belanja terhadap anggaran belanja Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu diatas sebesar 3,2%. Belanja daerah pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 673,63 miliar dan jika dibandingkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,8 % atau sebesar Rp. 685,92 miliar menjadi. Penurunan ini terjadi akibat menurunnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan realisasi Belanja Modal.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kepahiang 2016 s/d 2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	294,959,468,623.35	675,263,637,076.63	43.68
2	2017	265,415,981,674.04	687,923,382,807.24	38.58
3	2018	273,596,677,677.60	674,637,092,503.60	40.55
4	2019	296,349,887,654.00	732,066,462,749.43	40.48
5	2020	295,715,603,527.00	760,513,764,961.23	38.88

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Diolah

Rata-rata realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2016 – 2020 sebesar 40,4%. Belanja ini mengambil porsi yang cukup besar dalam realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang anggarannya bersumber dari dana PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah terhadap belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur PNSD. Semakin besar rasionya maka semakin besar belanja daerah yang

dibelanjakan untuk membayar pemenuhan kebutuhan aparatur daerah dan sebaliknya, semakin kecil angka rasionya maka semakin kecil belanja daerah yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit, komposisi penutup defisit dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam kurun tahun 2018-2020 dapat digambarkan pada Tabel di bawah.

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kepahiang

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	683,360,643,620.79	730,847,819,159.57	723,519,894,074.55
	Dikurangi Realisasi			
2	Belanja Daerah	673,637,092,503.60	731,066,462,749.43	760,513,764,961.23
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
	Defisit Riil	8,723,551,117.19	(1,218,643,589.86)	(36,993,870,886.68)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang

Secara umum, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepahiang dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikan realisasi pendapatan pada periode tersebut sebesar 2,9 %. Sementara itu rata-rata kenaikan belanja daerah pada periode tersebut sebesar 6 %. Defisit riil Kabupaten Kepahiang selama periode tersebut mengalami tren penurunan dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar surplus Rp. 8,72 miliar kemudian menjadi defisit sebesar Rp 1,21 miliar pada tahun 2019 dan tahun 2020 tercatat defisist sebesar Rp. 36,99 miliar.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kepahang

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	312.6%	297.4%	95%
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekaayaan Daerah Yang Dipisahkan	33.0%	16.4%	6%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			12%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.2%	4%	
6	Penerimaan Piutang Daerah			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahang (diolah)

Sedangkan perkembangan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah Kabupaten Kepahang pada kurun waktu 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Kepahang

No	URAIAN	2017		2018		2019	
		(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA	(Rp)	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	27,271,149,613.32	100%	36,240,917,488.51	100%	35,068,361,884.24	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD						
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan						
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah			2,064,395,049.83	5,7%		
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya						
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	3.050.692.295	11,1%	13.584.890.521	37,4%	7,103,495,442	20,3%
7	Kegiatan lanjutan						

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahang (diolah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SILPA Pemerintah Kabupaten Kepahang tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 27.271.149.613,32 miliar. SILPA Pemerintah Kabupaten Kepahang berupa gabungan kas diantaranya:

1. Kas di Kas Daerah	Rp. 24.643.508.820,32
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 591.557.244,00
3. Kas di BLUD	Rp. 71.261.300,00
4. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp. 1.650.971.004,00
5. Kas di Bendahara Dana BOS	Rp. 313.851.245,00

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2017 belum terselesaikan berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 334.485.242,00, Utang beban Rp. 2.340.943.321,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 375.263.732.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SILPA Pemerintah Kabupaten Kepahang tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 36.240.917.488,51 miliar. SILPA Pemerintah Kabupaten Kepahang berupa gabungan kas diantaranya:

1. Kas di Kas Daerah	Rp. 34.591.976.653,51
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 93.666.495,00
3. Kas di BLUD	Rp. 918.582.035,00
4. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp. 374.522.363,00
5. Kas di Bendahara Dana BOS	Rp. 262.169.942,00

Selain hal diatas juga, terjadi pencapaian over target penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari semula yang dianggarkan Rp. 19,884,829,365.04 terealisasi sebesar Rp. 22,758,128,478.87.

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2018 belum terselesaikan berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)



sebesar Rp. 314.386.667,00, Utang beban Rp. 11.119.549.138,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 2.150.954.716,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SILPA Pemerintah Kabupaten Kepahang tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 35.207.649.884,24 miliar. SILPA Pemerintah Kabupaten Kepahang berupa gabungan kas diantaranya:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Kas di Kas Daerah | Rp. 33.165.295.976,58 |
| 2. Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. 612.975.815,36 |
| 3. Kas di BLUD | Rp. 966.529.116,30 |
| 4. Kas di Bendahara Dana Kapitasi
JKN | Rp. 329.907.863,00 |
| 5. Kas di Bendahara Dana BOS | Rp. 132.941.113,00 |

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2019 belum terselesaikan berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 689.082.190,00, Utang beban Rp. 6.123.377.816,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 291.035.435,95

3.3. Kerangka Pendanaan

Tujuan dari Analisis kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahap awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan



Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyusunan proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2021-2026 mempertimbangkan dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian nasional terutama dengan melambannya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan serta angka pengangguran yang semakin meningkat. Disisi lain, pemerintah telah memproyeksikan penerimaan negara pada tahun 2020 turun 15%. Hal ini disebabkan penerimaan pajak yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, diproyeksikan penerimaan negara hanya akan mencapai Rp 1.663,62 triliun atau 85% dari realisasi tahun 2019 yang senilai Rp 1.957,2 triliun. Penerimaan negara untuk beberapa tahun kedepan diperkirakan masih tertekan dikarenakan belum pulihnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19. Penerimaan negara ini meliputi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Implikasinya bagi daerah adalah berkurangnya dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan ini sangat berdampak bagi daerah-daerah yang sangat tergantung terhadap transfer pemerintah pusat dalam kegiatan pemerintahannya. Sementara itu PAD yang menjadi wewenang pemerintah daerah belum mampu menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan fiskal bagi pemerintah daerah. Penyusunan proyeksi APBD untuk tahun 2021 – 2026 menggunakan data APBD Tahun 2021 sebagai tahun dasar proyeksi, maka diperoleh proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kepahang untuk tahun anggaran 2021-2026 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahang
Tahun 2022 s/d Tahun 2026

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.00	PENDAPATAN DAERAH	795,097,076,658.00	993,997,611,804.91	1,111,446,023,381.23	1,227,241,614,856.92	1,316,256,192,444.21	1,365,159,898,072.86
4.10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39,930,446,749.00	42,336,547,986.31	43,895,031,471.06	46,025,712,475.86	48,309,550,772.16	50,233,669,651.64
4.1.01	Pajak Daerah	7,213,924,703.00	7,307,988,416.42	7,541,006,369.45	7,748,252,371.55	8,267,244,521.75	8,379,754,354.22
4.1.02	Retribusi Daerah	702,165,750.00	396,519,793.30	330,778,202.64	259,849,851.26	227,949,495.99	57,921,883.62
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,083,579,733.00	2,211,493,325.68	2,392,806,914.77	2,618,815,311.11	2,556,551,886.38	2,378,629,321.84
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28,930,776,563.00	32,420,546,450.91	33,630,439,984.19	35,398,794,941.94	37,257,804,868.04	39,417,364,091.95
4.20	PENDAPATAN TRANSFER	737,967,129,909.00	920,716,566,742.90	1,034,281,410,577.11	1,146,740,814,312.26	1,235,708,982,798.95	1,275,218,890,729.30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	692,843,717,000.00	869,783,731,940.80	972,632,055,924.30	1,071,933,922,781.60	1,176,247,460,563.90	1,215,018,255,089.18
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45,123,412,909.00	50,932,834,802.10	61,649,354,652.81	74,806,891,530.66	59,461,522,235.05	60,200,635,640.12
4.30	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,199,500,000.00	30,944,497,075.70	33,269,581,333.06	34,475,088,068.80	32,237,658,873.11	39,707,337,691.93

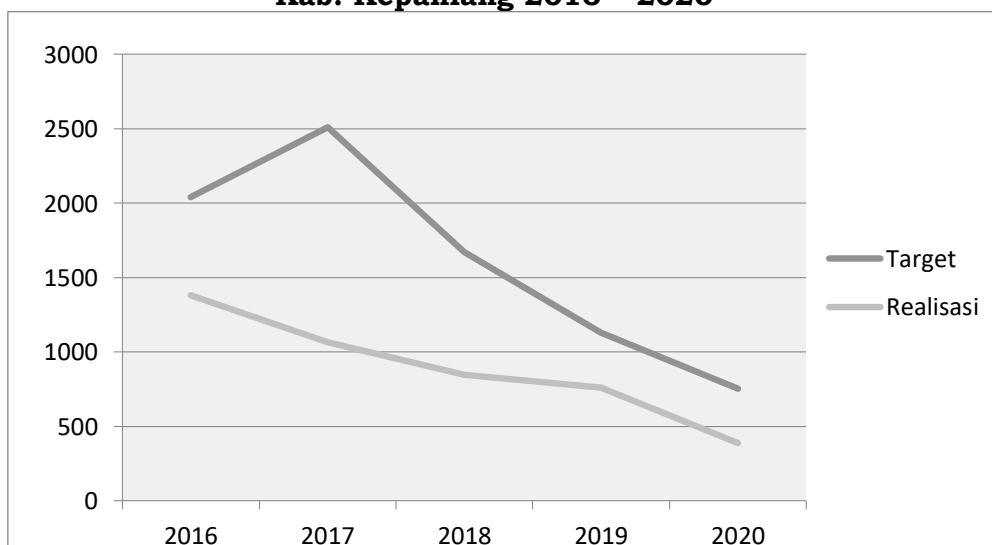
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17,199,500,000.00	30,944,497,075.70	33,269,581,333.06	34,475,088,068.80	32,237,658,873.11	39,707,337,691.93
5.00	BELANJA	777,798,810,158.00	1,080,057,678,637.91	1,026,438,158,798.22	1,148,501,458,606.92	1,316,256,192,444.21	1,365,159,898,072.86
5.10	BELANJA OPERASI	500,664,516,111.00	558,795,478,520.17	503,814,624,387.98	508,778,535,682.46	538,485,840,859.40	544,337,862,778.90
5.20	BELANJA MODAL	139,797,785,607.00	376,205,290,860.73	371,054,261,391.64	486,311,087,258.48	621,370,387,505.72	658,122,585,895.68
5.30	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	2,959,594,618.00	3,693,099,534.40	4,484,995,036.52	4,647,615,520.02	5,603,250,379.35
5.40	BELANJA TRANSFER	135,336,508,440.00	142,097,314,639.00	147,876,173,484.20	148,926,840,629.46	151,752,348,559.07	157,096,199,018.93
	Total Surplus/(Defisit)	17,298,266,500.00	(86,060,066,833.00)	85,007,864,583.00	78,740,156,250.00	0.00	0.00
6.00	PEMBIAYAAN						
6.10	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	150,000,000,000.00	0	0	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
	Penerimaan Kembali Investasi non Permanen						
	Penerimaan Kembali piutang						
	Penerimaan Pinjaman daerah		150,000,000,000.00				

	SilPA Bendahara BOS						
6.20	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17,298,266,500.00	63,939,933,167.00	85,007,864,583.00	78,740,156,250.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal						
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17,298,266,500.00	25,939,933,167.00	75,000,000,000.00	75,000,000,000.00		
	Pembayaran Bunga Pinjaman			10,007,864,583.00	3,740,156,250.00		
	Pembayaran hutang pekerjaan pihak III		38,000,000,000.00				
	Pembiayaan Netto	-17,298,266,500.00	86,060,066,833.00	-85,007,864,583.00	-78,740,156,250.00	0.00	0.00
6.30	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahang (diolah)

Dari tabel 3.12 tersebut diatas diproyeksikan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 hingga 2025 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat dengan nilai rata-rata sebesar 4,51%. Sementara itu diproyeksikan penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2021-2025 mengalami trend penurunan atau pelemahan. Hal tersebut berkaca dengan periode sebelumnya tahun 2016 hingga 2020, PAD kabupaten Kepahiang yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2017, target penerimaan dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2,51 miliar sementara terealisasi sebesar Rp. 1,06 miliar atau terealisasi sebesar 42,2 %.

Grafik 3.7
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kab. Kepahiang 2016 - 2020



Kurang maksimalnya penerimaan retribusi daerah selama periode tersebut diduga akibat adanya regulasi pemerintah

pusat yang menghapus penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah seperti izin HO, Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP dan hal ini berdampak terhadap realisasi penerimaan PAD Kabupaten Kepahiang. Untuk tahun 2020, rendahnya realisasi penerimaan retribusi lebih banyak diakibatkan oleh kebijakan stimulus pemerintah untuk meringankan beban pelaku ekonomi didaerah seperti penggratisan kios, los pasar, pedagang kaki lima. Diperkirakan kebijakan ini akan tetap berlanjut untuk beberapa tahun kedepan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat untuk menggerek pertumbuhan ekonomi, penanggulangan pengangguran akibat COVID-19 serta penguatan sektor UKM yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Sementara itu, belanja daerah yang terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer untuk tahun 2021 s.d 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,96%. Adapun belanja yang dikategorikan kedalam belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai yang dianggarkan adalah belanja kompensasi berdasarkan ketentuan peraturan. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas daerah dalam RPJMD. Belanja bunga yang dianggarkan adalah belanja bunga atas utang pinjaman daerah dimana anggaran belanja bunga ini tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang serta dianggarkan

pada SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD. Selain jenis belanja tersebut, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dimasukkan juga kedalam kategori belanja operasi.

Belanja modal yang dimaksud kedalam kategori belanja daerah adalah belanja yang memenuhi kriteria memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah dan memenuhi batas minimal kapitalisasi asset yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Belanja tak terduga yang dimaksud adalah belanja yang mendesak dan tidak diprediksi sebelumnya seperti keadaan darurat seperti bencana alam, bencana non alam, bencana social dan kejadian luar biasa. Kegiatan SAR dan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Salah satu segmen aktif di Sumatera dan berada di Propinsi Bengkulu adalah segmen Musi terletak atau melintasi Kabupaten Kepahiang. Pada sesar ini setidaknya telah tercatat 2 kali gempa bumi yakni 15 Desember 1979 dengan kekuatan 6 skala magnitudo dan 15 Mei 1997 dengan kekuatan 5 skala magnitudo. Dengan melihat data dan fakta tersebut, perencanaan penganggaran untuk belanja disesuaikan dengan kondisi riil seperti jumlah penduduk, bangunan dan rumah, infrastruktur dan penanganan pasca bencana alam. Belanja transfer yang dianggarkan adalah berupa belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepahiang berencana mengajukan pinjaman daerah kepada PT. Bank Bengkulu sebesar Rp. 150 miliar dalam rangka mempercepat pembangunan didaerah Kabupaten Kepahiang. Hingga saat ini, realisasi pencairan pinjaman

tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Penggunaan pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian 3 paket proyek pembangunan jalan Eks PT. SMI dan beberapa pembangunan jalan lingkungan dan penataan wajah kota.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepahiang

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	795,097,076,658.00	993,997,611,804.91	1,111,446,023,381.23	1,227,241,614,856.92	1,316,256,192,444.21	1,365,159,898,072.86
2	Pencairan dan cadangan (sesuai perda)						
3	Sisa lebih rill perhitungan anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total penerimaan	795,097,076,658.00	993,997,611,804.91	1,111,446,023,381.23	1,227,241,614,856.92	1,316,256,192,444.21	1,365,159,898,072.86
	Dikurangi						
4	Belanja tidak langsung	293,785,166,413.00	308,629,851,987.32	313,865,925,665.32	316,053,184,394.22	323,836,722,693.40	331,492,103,720.96
5	Pengeluaran pembiayaan	17,298,266,500.00	63,939,933,167.00	85,007,864,583.00	78,740,156,250.00	0.00	0.00
	Kapasitas rill kemampuan keuangan	484,013,643,745	621,427,826,651	712,572,233,133	832,448,274,213	992,419,469,751	1,033,667,794,352

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.14
Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Kepahiang

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Kapasitas rill kemampuan keuangan	484,013,643,745.00	621,427,826,650.59	712,572,233,132.91	832,448,274,212.70	992,419,469,750.81	1,033,667,794,352
1	Prioritas I	290,408,186,247.00	372,856,695,990.35	427,543,339,879.75	499,468,964,527.62	595,451,681,850.49	620,200,676,611.14
2	Prioritas II	193,605,457,498.00	248,571,130,660.24	285,028,893,253.17	332,979,309,685.08	396,967,787,900.33	413,467,117,740.76

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan, maka perumusannya dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada didaerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada didaerah kepada provinsi.

Perumusan masalah dilakukan secara partisipatif baik melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maupun rapat-rapat pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Kerangka logis perumusan masalah dan perumusan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah serta hasil capaian rencana pembangunan yang lalu sebagaimana telah disajikan pada Bab II. Analisis dilakukan dengan melihat faktor internal dan eksternal serta permasalahan pembangunan daerah.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang Bidang Urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa Bidang Urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan Bidang Urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Permasalahan pembangunan yang disajikan dalam bab ini adalah permasalahan pada penyelenggaraan Bidang Urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan kinerja daerah sebagaimana telah disajikan pada Bab II. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bidang Urusan Pendidikan & Kebudayaan			
1	Masih rendahnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan	Masih kurangnya satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar belum dalam kondisi baik 2. Kurangnya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD 3. Masih kurangnya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum tercapainya target Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP	1. Tingginya Angka Putus Sekolah
		Masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai profesionalisme pendidik masih dibawah rata-rata 2. Masih rendahnya kompetensi tenaga kependidikan 3. Penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar belum maksimal 4. Distribusi tenaga pendidik yang belum
Bidang Urusan Kesehatan			
1	Masih rendahnya Angka Harapan hidup (AHH) di Kabupaten Kepahiang	Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya ibu hamil dengan resiko tinggi 2. Masih rendahnya catin yang mendapatkan konseling kespro (83,47%)
		Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) (4 orang atau 178)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendah Persentase Persalinan di Fasyankes (80,34 %) 2. Masih tinggi persentase Bumil Kekurangan Energi Kronik (KEK) (11,98%) 3. Masih rendahnya Ibu Bersalin sesuai standar (80,34%) 4. Masih rendahnya pelayanan Ibu Hamil sesuai standar (83,20%) 5. Masih rendahnya Skrinning Faktor resiko penyakit menular dan tidak menular pada ibu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>hamil (61,33%)</p> <p>6. Masih rendahnya cakupan ketersediaan tenaga kesehatan (bidan desa)</p> <p>7. Masih rendahnya persentase pemberdayaan masyarakat</p>
2	Masih rendahnya Status Gizi Balita (32,51%)	Masih tingginya kasus stunting pada balita 10,3%	<p>1. Masih kurangnya cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (79,4%)</p> <p>2. Masih rendahnya cakupan ANC dan pemberian Tablet Fe pada ibu hamil</p>
3.	Masih belum optimalnya pelayanan, serta pendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepahiang	Masih rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	<p>1. Masih tingginya insidensi TB (56,17%)</p> <p>2. Masih tingginya insidensi HIV</p> <p>3. Masih rendahnya jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar</p> <p>4. Masih rendahnya deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular</p> <p>5. Masih tingginya penyakit tular vektor dan zoonotik</p>
		Masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	<p>1. Masih rendahnya persentase kepesertaan JKN</p> <p>2. Masih rendahnya ketersediaan fasilitas sarana dan prasana kesehatan yang sesuai standar</p> <p>3. Masih rendahnya</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>persentase tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi</p> <p>4. Masih rendahnya jenjang akreditasi pusat pelayanan kesehatan</p>
Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Permukiman			
1.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan strategis	Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas jalan menuju pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Kepahiang dalam kondisi baik	<p>1. Masih minimnya sistem informasi / database jalan dan jembatan</p> <p>2. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan</p>
		Belum optimalnya penyediaan air minum bagi masyarakat	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber air sebagai sumber air baku bagi masyarakat</p> <p>2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk masyarakat perkotaan dan perdesaan</p>
		Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem sanitasi masyarakat (SANIMAS) di daerah	<p>1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</p> <p>2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</p> <p>3. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan persampahan</p>
		Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi untuk lahan	<p>1. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pertanian dalam meningkatkan hasil produksi pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. sumber daya air untuk irigasi 2. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang 2. Belum optimalnya pengembangan perumahan dan permukiman dengan penataan bangunan serta lingkungannya 3. Masih kurangnya pengawasan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi
Bidang Urusan Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1.	Masih rendahnya tingkat ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan masih rendahnya kepedulian sosial dan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimalnya fungsi personil linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat 2. Masih tingginya tingkat pelanggaran Perda
2.	Masih rendahnya kesadaran mitigasi bencana masyarakat	Masih tingginya indeks resiko bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berkembangnya sistem informasi kebencanaan 2. Belum maksimalnya pelayanan penanganan terhadap kawasan rawan bencana 3. Masih rendahnya cakupan ketersediaan sarana prasarana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			penanganan bencana alam
Bidang Urusan Sosial			
1.	Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepahiang	Masih Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani di Kabupaten Kepahiang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS melalui pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial 2. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia PSKS dalam menangani PMKS. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penanganan PMKS
Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB			
1.	Masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Belum optimalnya implementasi hak-hak perempuan dan anak dalam mewujudkan Kabupaten layak anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak 2. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender
2.	Masih rendahnya tingkat reproduksi kesehatan masyarakat	Belum berhasilnya program kampung KB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya kegiatan Pokja Kampung KB 2. Masih rendahnya cakupan akseptor KB 3. Masih tingginya angka determinan unmeet
Bidang Urusan Lingkungan Hidup			
1.	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Masih rendahnya indeks kualitas air, udara dan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya dokumen dan ketetapan hukum sebagai sarana pengendalian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Belum maksimalnya pelayanan pengelolaan persampahan 3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan izin terhadap izin usaha dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Masih rendahnya kualitas layanan publik	Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan dan pelayanan catatan sipil	1. Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan 2. Masih kurangnya inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil 3. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Masih rendahnya Indeks Desa Membangun (IDM)	Masih rendahnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa	1. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam peningkatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ekonomi
Bidang Urusan Perhubungan			
	Masih rendahnya tingkat pelayanan dan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Kepahiang	Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya dokumen yang mengatur tentang sistem transportasi lokal (TATRALOK) 2. Masih kurangnya fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas 3. Belum optimalnya fungsi terminal sebagai pengawasan, pengatur, pengoperasian lalu lintas kendaraan umum
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Perhubungan	
Bidang Urusan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
	Masih rendahnya nilai investasi di Kabupaten Kepahiang	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum teridentifikasinya peluang investasi daerah 2. Belum adanya jaminan iklim usaha 3. Belum optimalnya promosi investasi daerah 4. Belum optimalnya pengawasan dan pelaporan terkait perizinan usaha
Bidang Urusan Pariwisata Pemuda dan Olahraga			
1.	Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya penerapan terhadap dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPAR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya daya tarik dan pemasaran destinasi pariwisata 2. Kurangnya pengembangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	daerah		sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika			
1.	Masih belum tercapainya target dalam pengelolaan SPBE	Masih belum optimalnya pemerataan infrastruktur TIK untuk peningkatan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya variable indikator tata kelola SPBE dan layanan SPBE 2. Masih rendahnya tingkat pelayanan dan penyediaan akses informasi publik 3. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian di lingkungan daerah Kabupaten Kepahang 4. Belum terselenggaranya pelaksanaan data statistik sektoral
Bidang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan			
1.	Masih rendahnya minat baca masyarakat	Belum terkelolanya koleksi bahan pustaka secara sistematis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya bahan pustaka 2. Rendahnya pengelolaan perpustakaan
Bidang Urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan			
1.	Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Menurunnya kontribusi sektor perikanan Kabupaten Kepahang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produksi ikan budidaya
2.	Masih rendahnya tingkat kemandirian pangan	Masih rendahnya ketahanan pangan dan diversifikasi pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan pangan di kabupaten Kepahang 2. Adanya potensi kerawanan pangan
Bidang Urusan Pertanian			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian terhadap perekonomian daerah	1. Kurangnya produksi dan produktifitas tanaman pertanian
Bidang Urusan Perdagangan Koperasi dan UMKM			
1.	Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Daerah	Masih rendahnya pengelolaan pemberdayaan ekonomi kerakyatan UKM dan Koperasi	1. Masih rendahnya pemasaran dan promosi produk UMKM 2. Masih rendahnya komoditi ekspor 3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman SDM pengelola dan pengurus koperasi
Bidang Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja			
1.	Masih rendahnya kontribusi dan pertumbuhan sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Menurunnya kontribusi PDRB sektor manufaktur	1. Masih rendahnya peningkatan kapasitas produksi Industri 2. Masih rendahnya jumlah IKM yang memperoleh stimulus produksi
2.	Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepahiang	Masih rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang	1. Kurangnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Masih tingginya angka pengangguran dan pekerja sektor informal di Kabupaten Kepahiang	1. Terbatasnya peluang/ lowongan/ kesempatan kerja 2. Penurunan pergerakan ekonomi akibat pandemic COVID- 19
Bidang Urusan Sekretariat Daerah			
1.	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintah	Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan	1. Belum efektifnya penataan ketatalaksanaan 2. Masih lemahnya akuntabilitas kinerja 3. Masih rendahnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	daerah		kualitas pelayanan publik 4. Belum optimalnya pengendalian pembangunan 5. Masih kurangnya penataan hukum dan budaya taat hukum 6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah 7. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 8. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah 9. Belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat
Bidang Urusan Sekretariat DPRD			
1.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi DPRD sebagai pengawasan terhadap Pemerintah Daerah	Belum optimalnya anggota DPRD menjalankan tugas dan sebagai pengawasan terhadap pemerintah daerah	1. Masih rendahnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung Kualitas Layanan DPRD
Bidang Urusan Perencanaan			
1.	Belum terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas	Masih rendahnya penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kualitas dokumen perencanaan	1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang terkait urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		strategis	Mitigasi Bencana, Perhubungan, Kelitbangan, Perekonomian dan Pembangunan Manusia 2. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah 3. Masih perlunya optimalisasi diklat teknis dan belum tersedianya fungsional perencanaan Kabupaten Kepahiang
Bidang Urusan Keuangan			
1.	Masih rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 3. Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik daerah (BMD) 4. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
Bidang Urusan Kepegawaian			
1.	Belum terwujudnya indeks profesionalitas ASN	Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN	1. Belum optimalnya penataan ASN sesuai dengan kualifikasi 2. Masih rendahnya ASN yang mengikuti kompetensi manajerial teknis dan fungsional

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bidang Pengawasan			
1.	Belum optimalnya pengawsan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan standart operasional pengendalian internal 2. Rendahnya tingkat kapabilitas APIP
Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik	Masih rendahnya pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya persentase kasus konflik sosial dan keagamaan 2. Masih rendahnya persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih

4.2 ISU STRATEGIS NASIONAL DAN DAERAH

4.2.1 RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik, dengan menghadapi tantangan yang besar akibat adanya pandemic COVID-19 pada awal tahun 2020.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang

selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik;

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

4.2.2.1 Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pada tahun 2020-2021, akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 mungkin akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. Baseline capaian pembangunan Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dimulai pada titik yang sangat rendah.

Banyak sektor yang menjadi penyebab stagnannya ekonomi Bengkulu. Kondisi infrastruktur dan konektivitas Bengkulu, masih belum mampu medongkrak perekonomian sehingga perlu dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur yang merata serta peningkatan BAB IV - 42 aksesibilitas dan konektivitas Bengkulu baik antar kabupaten dalam daerah maupun antar provinsi. Diharapkan dengan akses dan konektivitas yang terbuka, nilai investasi Bengkulu akan meningkat. Secara nominal Penanaman Modal Asing di Bengkulu hanya sebesar USD 192 juta atau 0,67% dari nasional peringkat 25 nasional, dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 1,31% dari nasional yaitu 5,3 triliun

rupiah dan menempati peringkat 18 nasional.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi Neraca Perdagangan Digital Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, berada disisi barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan 4 (empat) provinsi besar di Sumatera. Dengan proyek jalan Tol Trans Sumatera ruas Bengkulu – Lubuk Linggau yang saat ini sedang dibangun, maka jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ekonomi Bengkulu akan berkembang dan meningkat dengan pesat. Selain itu, investasi juga dapat diandalkan oleh Bengkulu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Share PMTB dalam PDRB Provinsi Bengkulu mencapai 40% lebih, yang menggambarkan bawah pembentukan modal di Provinsi Bengkulu cukup besar. Hal ini menandakan BAB IV - 45 bahwa Bengkulu memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai tujuan investasi.

4.2.2.2 Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih cukup rendah. Walaupun sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bengkulu pada maret tahun 2021 mencapai 15,22%, jauh berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 10,14%.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan daerah lain pembangua manusia Provinsi Bengkulu masih berjalan lambat. Pada tahun 2020, IPM Bengkulu adalah

sebesar 71,40 masih berada dibawah capaian nasional. Selain itu, pemerataan kualitas SDM antar wilayah masih timpang. Dari 10 kabupaten dna kota, hanya Kota Bengkulu yang masuk kategori IPM Sangat Tinggi.

Selain itu, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMA, SMK, Diploma dan Universitas, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 44,19%. Ini bearti sebesar 50% lebih pekerja di Bengkulu bekerja dengan latar pendidikan yang rendah. Selain itu sebesar 69,23% angkatan kerja bekerja pada sektor informal, yang sangat rentan terhadap kelayakan upah. Per bulan rata-rata pendapatan pekerja informal adalah sekita 1,5 juta, masih jauh dibawah UMP. Hal ini menggambarkan bahwa daya saing tenaga kerja di Bengkulu masih minim, dan tingkat kesejahteraan pekerja masih rendah.

ada sektor pendidikan, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 adalah sebesar 8,84 tahun, masih dibawah target wajib belajar 9 tahun. Rasio jumlah penduduk per Universitas masih cukup rendah, yang mengakibatkan banyak penduduk yang bermigrasi keluar untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi.

Pada sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 masih berada dibawah capaian nasional yaitu sebesar 69,35 tahun sedangkan nasional mencapai 71,47 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Bengkulu perlu melakukan akselerasi dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutamak peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah

terpencil, peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis, kepastian layanan jaminan kesehatan, pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

4.2.2.3 Pengembangan Konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

a. Infrastruktur

Pada sektor infrastruktur strategis, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlu peningkatan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai seperti pembangunan/pengembangan terminal curah cair, terminal curah kering, terminal peti kemas, conveyor belt dan pengerukan alur. T BAB IV - 48
2. Perlu Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Perlu Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan/ASDP seperti Pelabuhan Linau, Pelabuhan Enggano (Malakoni dan Kahyapu), pelabuhan pengumpan di Mukomuko dan pelabuhan di Pino Raya, Bengkulu Selatan;
4. Perlu pengembangan fasilitas Bandara Fatmawati, Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano;
5. Perlu pengembangan dan pembangunan infrastruktur tenaga listrikan meliputi pengembangan PLTP Hulu Lais, PLTU Pulau Baai, pembangunan PLTP di Kabupaten Kepahiang dan jaringan transmisi sutt dan gardu induk;

b. Ketahanan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

Keadaan geografis wilayah Provinsi Bengkulu yang

berhadapan dengan zona subduksi pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia menyebabkan wilayah Provinsi Bengkulu memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan 2 (dua) Samudera dan dengan pertemuan 2 (dua) Lempeng Benua yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa bumi berpotensi tsunami. Selain itu, wilayah Provinsi Bengkulu juga dilewati oleh Patahan Semangko yang memanjang dari Aceh sampai Lampung yang sewaktu menimbulkan gempa bumi.

Kejadian gempa bumi besar pernah terjadi pada zona subduksi wilayah Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2000 dengan skala kekuatan 7,3 SR yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Tanggal 12 September 2007 Bengkulu kembali diguncang oleh gempa bumi dengan kekuatan lebih besar yaitu 7,9 SR. Gempa bumi ini telah mengakibatkan 17.695 rumah hancur, 21.035 rumah rusak parah, dan 49.496 rumah mengalami kerusakan ringan, serta mengakibatkan setidaknya 25 orang meninggal dunia dan 100 orang terluka (Laporan Situasi OCHA No.8). Berdasarkan data kejadian Bencana Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2017, urutan bencana alam dengan kejadian tertinggi sampai terendah adalah Banjir (302 kejadian), Cuaca Ekstrem (94 kejadian), Gempa Bumi (67 kejadian), Banjir Bandang (34 Kejadian) dan Tsunami (belum ada kejadian) (BPBD Provinsi Bengkulu, 2018). Kejadian bencana tanah longsor paling sering terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu

Utara. Penyebab utamanya adalah kondisi topografi daerah yang berbukit dan banyak lereng yang curam. Sedangkan kejadian banjir paling sering terjadi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun wilayah dengan kerawanan tinggi bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Bengkulu, Kota Curup, serta Kota Kepahiang. Menurut data, Kota Bengkulu sendiri juga seringkali mengalami gempa, serta pernah mengalami kejadian tsunami pada tahun 1833. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2020 Provinsi Bengkulu, jenis bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Bengkulu adalah tanah longsor (386 kejadian) dan banjir (269 kejadian). Kejadian Bencana dengan urutan tertinggi terjadi di Kota Bengkulu (164 kejadian), Kabupaten Rejang Lebong (163 kejadian) dan Kabupaten Bengkulu Utara (112 kejadian).

Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya yang cukup melimpah. Sekitar 56 persen wilayah Bengkulu terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Saat ini dari luasan 924 ribu hektare, seluas 410.843 hektare atau 45 persen hutan Bengkulu di bentang Bukit Barisan mengalami kerusakan.

Selain itu masih ada 53.000 hutan Bukit Barisan yang juga akan dilepaskan. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan. Keberadaan bentang alam Bukit Barisan sebagai “tulang punggung” Pulau Sumatera

sepanjang 1.650 km dari ujung Aceh hingga Lampung, sangat penting. Jika rusak, bencana alam yang memakan korban jiwa manusia dan satwa bisa terjadi. Selain itu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan

c. Pengembangan Konektivitas Daerah

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antarwilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. BProvinsi Bengkulu perlu membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.

d. Pengembangan Rendah Karbon dan Emisi GRK

1. Bidang Pertanian

Permasalahan emisi GRK sektor pertanian adalah perlunya komitmen kebijakan dan konsistensi untuk mendukung program PPRK dari pemerintah daerah

khususnya pada perubahan penggunaan lahan dan manajemen lahan pertanian yang baik.

2. Permasalahan Kehutanan dan Lahan Gambut

Permasalahan emisi GRK di Provinsi Bengkulu merupakan dampak dari perubahan penggunaan lahan baik di kawasan hutan maupun non hutan untuk Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan (Hutan).

3. Bidang Energi dan Transportasi Mengacu pada dokumen IPCC 2006, aktivitas di sector energy terdiri dari 4 (empat): 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber energi primer 2) Konversi sumber energi primer menjadi energy sekunder melalui proses pengolahan pada kilang minyak dan pembangkit listrik, 3) Transmisi dan distribusi bahan bakar, dan 4) Penggunaan bahan BAB IV - 54 bakar yang digunakan pada peralatan stasioner (Tidak bergerak) dan mobile (bergerak).

4. Bidang Limbah

Limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestik maupun industri) menjadi penghasil emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik.

4.2.2.4 Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif

a. Hilirisasi Komoditas Unggulan

Bengkulu memiliki banyak potensi komoditas unggulan yang dapat diolah melalui industri hilirisasi, yaitu: 1. Batubara yang memiliki potensi sumber mencapai 292 juta ton; 2. Geothermal yang berpotensi sebesar 1.352 Watt; 3. Kelapa Sawit dengan produksi sebesar 799.891 ton untuk perkebunan rakyat, 357.109 ton untuk

perkebunan besar swasta dan 11.942 ton untuk perkebunan negara; 4. Kopi dengan produksi yang mencapai 62.759 ton (perkebunan rakyat); 5. Karet yang mencapai 101.246 ton (perkebunan rakyat); 6. Perikanan laut dengan potensi produksi 126.217 ton; Ekonomi Bengkulu kurang stabil karena tergantung dengan fluktuasi harga komoditas unggulan. Sehingga, hilirasi produk unggulan menjadi produk-produk turunannya menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Industri pengolahan yang mampu menjadi sektor hilirasi di Bengkulu, terletak pada industri pengolah minyak kelapa sawit, perikanan, hilirisasi karet, batubara dan panas bumi. Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi, yang seharusnya lebih meningkat. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang Pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi, serta Kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik.

b. Pembangunan Kemaritiman yang Integratif

Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benar-benar mampu

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan, infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benar-benar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan. Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan antara lain (1) Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olah raga; (3) Sektor Transportasi Laut yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Bengkulu; (4) Industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan industri pariwisata bahari; pengembangan industri kreatif kebaharian; pembangunan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan (Energi

dan Sumberdaya Mineral) yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) Sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualitas, BAB IV - 58 kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan; (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.

c. Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

Pariwisata yang dikembangkan sebagai sebuah industri usaha diharapkan kedepannya, tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan kemakmuran rakyat, namun industri pariwisata dengan segala potensi yang ada didalamnya, diharapkan juga menjadi mesin yang efektif untuk pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dalam berbagai aspek, termasuk dari aspek kebijakan dan perencanaan yang kuat. Oleh karenanya Bengkulu perlu berfokus kepada pengembangan sektor pariwisata yang tematik, holistik, integratif dan spasial dalam aspek: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Daya Tarik Wisata, B BAB IV - 59 Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Pengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata, Pengembangan

Kemitraan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Promosi Pariwisata, Penguatan Struktur Industri dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Penguatan Organisasi Kepariwisata dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

4.2.2.5 Peningkatan Kinerja Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan daerah, Bengkulu termasuk daerah yang belum mandiri. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Bengkulu. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang terus meningkat setiap tahunnya. Kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

4.2.2.6 Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19

Mengembalikan ekonomi Bengkulu keposisi semua seperti sebelum terjadinya pandemic Covid-19 memerlukan langkah strategis yang terpadu untuk menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk masa depan. Penyesuaian-

penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu: 1. Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di fasilitas umum; 2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat; 3. Perpaduan pembelajaran melalui daring dan luring; P BAB IV - 62 4. Digitalisasi keuangan daerah dan UMKM; 5. Pembatasan jumlah pengunjung pada pelayanan kesehatan dan fasilitas umum; 6. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik; dan 7. Efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu dan memastikan masyarakat kembali memiliki ketahanan sosial pada diri, keluarga, dan masyarakat

4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

Isu strategis dalam Perda RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026 ini merupakan penggabungan dari telaah gambaran umum yang disajikan pada Bab II, permasalahan-permasalahan dalam bidang urusan pemerintahan serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) forum perangkat daerah.

Hasil kolaborasi dari hal-hal tersebut diatas selanjutnya diharapkan akan diperoleh *Critical Decision Factors* (CDF) yang merupakan serangkaian pertimbangan untuk menentukan akar masalah yang bersifat holistik, terpadu dan fokus, menggunakan kata kunci sederhana agar mudah dipahami, dan dapat mencerminkan makna yang terpadu.

Gambaran Umum Kabupaten Kepahiang pada Bab II yang didalamnya menyajikan capaian pembangunan lima tahun sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa capaian pembangunan Kabupaten Kepahiang yang masih harus ditingkatkan terutama terkait dengan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan layanan umum

lainnya. Serta indikator makro lainnya seperti tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata domestik bruto dan angka kemiskinan yang masih harus diperbaiki. Secara umum isu-isu strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang dapat dikatakan cukup rendah. Walaupun sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun masih dibawah rata-rata nasional. Persentase masyarakat miskin Kepahiang mencapai 14,69% pada tahun 2020, jauh berada diatas rata-rata nasional sebesar 10.14%.

Selain itu, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan setiap tahunnya, penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 mencapai 149.737 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kepahiang mampu bersaing secara nasional maupun global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Kepahiang yang ditunjukkan dengan nilai IPM Kabupaten Kepahiang sebesar 68.17 persen masih berada dibawah Provinsi Bengkulu sebesar 71,40.

Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih

relatif rendah. Standart pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Kepahiang hanya mencapai 5.36 dengan jumlah guru SD/MI sebanyak 1.181 orang dan SMP/MTs sebanyak 505 orang pada tahun 2020. Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti akreditasi sekolah, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarannya, koleksi, sumber daya manusia maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat. Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kepahiang pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal. Pada sektor kesehatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020 masih berada dibawah nasional yaitu sebesar 67,95 tahun sedangkan nasional mencapai 71,74 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Kepahiang perlu melakukan akselerasi dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutamak peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis, kepastian layanan jaminan kesehatan, pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan pemantapan

kesejahteraan dokter dan paramedis.

2. Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintahan Desa, dan Belum Efektifnya Reformasi Birokrasi

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tatakelola pemerintahan, terutama pada tatakelola sumberdaya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolak ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hasil survei ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kabupaten Kepahiang, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kepahiang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Nilai

SAKIP Kabupaten Kepahiang, berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN RB, nilai sakip masih di predikat C pada tahun 2020.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Kepahiang masih rendah. Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN baru mencapai.

3. Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, dan Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan

Infrastruktur merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kabupaten Kepahiang, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada tahun 2020 permukaan jalan beraspal hotmix sepanjang 201,38 Km, jalan aspal lapen 184,77 Km, jalan kerikil 53,54 Km, jalan tanah 68,50 Km dengan total panjang 511,49 Km. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri, karena tingkat kualitas infrastruktur dasar belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terlebih, masih terdapat kesenjangan pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Selain itu, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum sebesar 63.82% jauh dibawah nasional yang mencapai 90.21%. termasuk juga untuk rumah tangga yang menempati rumah layak huni yang masih rendah mencapai 51.3% pada tahun 2020.

Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Kepahiang. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sampai

dengan saat ini dikategorikan dalam prioritas pembangunan. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan, dikarenakan pemenuhan sarana transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan pergerakan orang, barang dan jasa. Revitalisasi pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi fokus untuk pembangunan kedepan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di Kepahiang.

Kecenderungan ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, pelayanan air bersih yang belum mencukupi. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna.

4. Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah

Dengan modal dasar pembangunan yang sangat besar dan bonus demografi yang kita miliki hingga 2030, Indonesia mestinya

mampu melaksanakan transformasi struktural ekonomi dengan gemilang termasuk di Kabupaten Kepahiang. Untuk itu, pertama yang harus dilakukan adalah dengan merevitalisasi seluruh sektor ekonomi yang ada saat ini supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan cara memastikan bahwa seluruh unit usaha, khususnya UMKM, harus memenuhi skala ekonomi, menerapkan teknologi mutakhir yang tepat, manajemen sistem rantai suplai secara terpadu dari hulu (produksi) sampai hilir (pasar), dan ramah lingkungan, sementara itu UMKM Kabupaten Kepahiang sebesar 33.37 pada tahun 2020 dengan cakupan bina UKM sebesar 30%. Kedua, mengembangkan sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif, berdaya saing, menyerap banyak tenaga kerja, adil, dan ramah lingkungan. Dalam jangka menengah – panjang, kita mesti mengembangkan industri teknologi informasi, robotics dan drones, material baru (*new materials*), bioteknologi, nanoteknologi, dan industri berbasis inovasi teknologi lainnya yang produknya dibutuhkan umat manusia saat ini dan di masa depan.

Ketiga, infrastruktur, logistik, konektivitas antar wilayah, pembangkit listrik, dan suplai energi harus terus diperbaiki dan dibangun yang baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan industrialisasi seperti diuraikan di atas. Keempat, iklim investasi dan kemudahan berbisnis (khususnya terkait dengan pembebasan lahan, perizinan, konsistensi kebijakan pemerintah, keadilan serta kepastian hukum) juga mesti terus diperbaiki dan ditingkatkan supaya sama dengan *emerging economies* yang sukses atau negara-negara maju.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat, belum

maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi desain pembangunan dan dirancang sebagai bagian dari upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang sedang berkembang. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026, beberapa dokumen penting yang menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 - 2032 Dan Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021–2026.

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Kepahiang dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021 - 2026. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang juga telah mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

5.1 VISI

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai cita – cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kepahiang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021 - 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Kepahiang yang akan diwujudkan pada



akhir Tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha (swasta), dan masyarakat pada umumnya. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021 – 2026 adalah:

“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”

Visi Kabupaten Kepahiang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kepahiang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang harus dapat dijabarkan dalam rangkaian misi, tujuan, sasaran, dan target yang selaras, terukur serta akuntabel.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, sangat tergantung dari capaian pada indikator-indikator sasaran, tujuan, dan misi yang tercermin pada program, kegiatan, hingga pada tataran sub-sub kegiatan (target). Oleh karena itu perlu untuk menjabarkan makna yang terkandung dari pernyataan Visi di atas agar dapat diterjemahkan pada upaya pencapaian indikator yang tepat.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju** adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil – hasil pembangunan;
2. **Mandiri** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan Memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
3. **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai dalam menjalani kehidupan yang ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks pembangunan manusia;

4. **Berdaya saing** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditujukan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produksi barang dan jasa. Pemerintah Daerah harus memiliki daya saing yang kuat, karena sebagai unit administrasi pemerintah berupaya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Kepahiang. Dengan mengintegrasikan konsep daya saing dengan aspek kelestarian lingkungan, pembangunan sosial inklusif dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Pilar kelestarian lingkungan merupakan dimensi pembangunan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Pilar ekonomi yang kuat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pilar sosial inklusif yang dapat menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di semua lapisan.

5.2 MISI

Mempedomani Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Upaya ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah yang berwujud kondisi yang ingin dicapai dalam upaya mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2021 - 2026. Pada dasarnya tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran sebagai target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

**HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN KEPALA DAERAH
DENGAN TUJUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

MISI I : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan

No	Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran Kada	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	Sub Kegiatan	Indikator	OPD Penanggung Jawab		
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan.	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya akses dan Mutu pendidikan Dsar	APK PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Indikator: Persentase Pemerataan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)	Indikator: Jumlah dan Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa PAUD	Indikator:	Dinas Pendidikan		
						Harapan Lama Sekolah								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Indikator: Jumlah kegiatan	
														Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan PAUD		Indikator : Jumlah THL yang diadakan	
														Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		Indikator: Jumlah dan Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD	
																Penambahan Ruang Kelas Baru (SD)	Indikator:
																Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah (SD)	Indikator:
																Rehab Sedang/ berat ruang kelas (SD)	Indikator:
					Pengadaan Mebeluer Sekolah (SD)	Indikator : jumlah pengadaaan											



								APM SMP	Menengah Pertaman (SMP)	dan Prasarana PAUD		
											Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah (SMP)	Indikator : Jumlah dan jenis yang dibangun
											Rehab Sedang/berat ruang kelas sekolah (SMP)	Indikator: Jumlah Bangunan yang direhab
											Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Indikator:
											Rehabilitasi sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Indikator:
											Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Indikator:
											Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Indikator:
											Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Indikator:
											Rehabilitasi	Indikator:



													(SMP)		
													Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indikator : Jumlah THL yang diadakan	
												Pengelolaan Pendidik Non-formal/kesetaraan	Indikator: Jumlah dan Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Non-formal/kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Kepala Sekolah/ TU	Indikator:
													Penyediaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	Indikator : Jumlah THL yang diadakan	
													Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Indikator : Jumlah Peserta Paket B dan C	
												Pengelolaan Pendidik dan Tenaga kependidikan	Indikator: Persentase pendidik minimal D3/S1 dan Bersertifikat Pendidik	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan	Indikator : Jumlah guru yang mengikuti UKG



													Nonformal	
													Penataan pendistribusi an pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal	Indikator : 1 dokumen
													Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indikator : Jumlah Guru yang tersertifikasi, Jumlah Guru yang mengikuti PPPG, Jumlah Guru yang Mengikuti KKG, Jumlah Guru yang mengikuti OGN, Jumlah Guru dan Siswa Berprestasi
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Partisipasi dan Mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	Mengembangkan dan Mengelola Kebudayaan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Mengembangkan dan Mengelola Kebudayaan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Program Pengembangan kesenian Tradisional	Indikator :Persentase Festival yang diikuti	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat at	Indikator :Jumlah jenis Festival yang diikuti	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya	Indikator : festival yang diikuti

	(SDM) masyarakat Kabupaten Kepahang.		kan.								pelakunya dalam Kabupaten/Kota		Manusia Kesenian Tradisional		
									Program Pembinaan Sejarah	Indikator : Persentase BMA yang dibina	Pembinaan Sejarah lokal dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : jumlah BMA yang dibina	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Indikator : 8 BMA	
									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Indikator : Persentase Cagar budaya yang telah terdaftar dan dilindungi	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Jenis Cagar Budaya teregistrasi	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Indikator : Cagar Budaya yang didaftarkan	
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			Indikator : Jumlah jenis Cagar Budaya yang Dilindungi	Perlindungan Cagar Budaya	Indikator : Cagar Budaya yang Dilindungi		
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahang.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahang.	Indeks Pendidikan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Indikator : Persentase Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten	Indikator: Jumlah Jenis Pengelolaan Perpustakaan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indikator: Jumlah e-book 1500 Judul PC penyimpanan e-book 1 unit	Dinas Perpustakaan
													Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indikator: Jumlah bahan pustaka	

														rahan 400 orang 8 kali di 8 kecamatan
													Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indikator : Jumlah Peserta
													Pemelihan Duta Baca Tingkat Kab/Kota	Indikator : Jumlah Peserta
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahang.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahang.	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Persentase Jumlah OPD yg menerapkan Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip OPD	Persentase Jumlah OPD yg menerapkan Pengelolaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Indikator : Persentase pengelolaan arsip	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	Indikator : Terlaksananya Jumlah 3 kali Sosialisasi 900 Peserta , Diklat arsiparis 4 orang, Supervisi dan evaluasi 21 OPD 5 Badan 8 Kecamatan, Ormas, 109 SD/MI, 36 SMP	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi
											Pengelolaan Arsip Dinamis Kab/kota	Indikator:	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Indikator:



								Program Perizinan Penggunaan Arsip	Indikator : Jumlah Perizinan Penggunaan Kearsipan	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kab/Kota	Indikator : Jumlah 21 OPD 5 Badan 8 Kecamatan 9 bagian	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Indikator : Jumlah 21 OPD 5 Badan 8 Kecamatan 9 bagian		
										Pengelolaan Arsip Statis	Indikator:	Akusisi, Pengolahan, Perserpassi dan akses arsip statis	Indikator:		
												Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yg bersifat tertutup	Indikator : Jumlah Perbup		
					Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Program pemenuhan upaya kesehatan perorang dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan 4 Kali selama periode kehamilan (K Lengkap)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil K1	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Tablet Fe 90		



											an 10T		Jumlah ibu hamil mendapatkan TT2
													Jumlah ibu hamil mendapatkan pemeriksaan laboratorium triple eliminasi
													Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan Perawatan
											Jumlah WUS yang mendapatkan pelayanan reproduksi		Jumlah Remaja Putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah
													Jumlah WUS yang mendapatkan TT
													Jumlah Calon Pengantin yang mendapatkan konseling Kespro
								Persentase Ibu Bersalin			Jumlah ibu bersalin di	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah ibu bersalin di





										Mendapat kan Pelayan an Kesehat an Sesuai Standar	Fasyankes	Ibu Bersalin	Fasyankes Pemerinta h
													Jumlah ibu bersalin di Fasyankes Swasta
													Jumlah ibu bersalin dengan komplika si kebidanan yang ditangani
													Jumlah ibu nifas KF Lengkap
													Jumlah ibu nifas yang mendapat kan vit A
													Jumlah peserta KB pasca salin
											Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang dimanfaat kan		Jumlah ibu bersalin yang memanfaa tkan RTK
											Jumlah ibu hamil yang mendapat		Jumlah ibu hamil miskin yang tidak





								upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	GERMAS		dilakukan	Kesehatan	yang dilakukan
													Jumlah penyuluhan kelompok yang dilakukan
													Jumlah penyuluhan massal yang dilakukan
											Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas
								Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Kecamatan GERMAS	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa GERMAS	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah advokasi yang dilakukan
										Pelaksanaan Sehat dalam		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	Jumlah kegiatan promotif dan





													Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK	
													Jumlah balita sakit yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
													Jumlah balita mendapatkan pelayanan pendekatan MTBS	
												Pengelolaan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk dan kurang yang mendapatkan perawatan	
								Persentase desa UCI (Universal Children Immunization)				Persentase IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap
								Kabupaten Sehat				Jumlah Kecamatan Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa Sehat
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa STBM
													Jumlah Desa ODF	
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang				Jumlah anak usia pendidikan dasar yang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang





													rehabilitasi dan pemeliharaan	
													Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan
												Jumlah Puskesmas yang mempunyai Prasarana sesuai Standar	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penambahan prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
													Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
												Jumlah Puskesmas yang	Pengadaan Alat Kesehatan/A	Jumlah Puskesmas yang





											mempunyai Alat Kesehatan sesuai Standar	lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	mendapatkan Alat Kesehatan Sesuai Standar
												Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang dilakukan kalibrasi
												Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan
								Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan vaksin Esensial	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan obat puskesmas sesuai dengan Fornas Kabupaten	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin	
											Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai	
											Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Puskesmas	

														<p>, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang melaksanakan Pengelolaan pelayanan kefarmasian sesuai standar</p> <p>Jumlah Puskesmas dengan pelayanan manajemen kefarmasian sesuai standar</p> <p>Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kefarmasian sesuai standar</p>
														<p>Jumlah Rekomendasi SPPIRT yang diterbitkan</p>
														<p>Persentase TPM dan IRTTP yang memenuhi syarat</p> <p>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan</p> <p>Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan</p> <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan</p>

											Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
											Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah pemberdayaan konsumen/masyarakat dalam bentuk Kursus/Sosialisasi tentang Hygiene Sanitasi pengolahan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum

													(DAM)	
											Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPM yang memenuhi syarat	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang dilakukan pengawasan
											Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Sampel PIRT yang dikirim Jumlah PIRT yang mendapatkan Pengawasan
							PROGRAM PEMEN UHAN UPAYA	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Persentase Puskesmas yang melakukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur,	Jumlah Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional		

									KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	standar	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya sesuai standar	Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1 di Puskesmas	
												Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Telemedicine	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang memiliki Fasilitas Telemedicine	
												Persentase Puskesmas dengan jenjang akreditasi meningkat	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi Paripurna	
														Jumlah Puskesmas terakreditasi Utama	
														Jumlah Puskesmas terakreditasi Madya	
														Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PPI	



													rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2%	
										Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Kelas C dan D dan Fasyankes berizin	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah rekom izin fasyankes	
												Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSI	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktik	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Nakes yang Mendapatkan Izin Praktik	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah rekom izin praktik tenaga kesehatan





									A KESEHA TAN				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah nakes mendapat pembinaan dan pengawasan
										Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan mengikuti uji kompetensi
										Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di	Jumlah Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Renbut SDMK	
												Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	Jumlah SDMK yang direkrut	





									Wilayah Kabupaten/Kota		Manusia Kesehatan sesuai Standar	
									Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk miskin mendapatkan Jaminan Kesehatan
									Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining penyakit menular dan tidak menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pengukuran Tekanan darah dan gula darah
						3. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Cakupan pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			Jumlah WUS usia 30-50 tahun mendapatkan pemeriksaan Sadanis dan IVA



													Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining faktor risiko penyakit menular
													Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
													Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining penyakit menular dan tidak menular
													Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pemeriksaan gangguan mental, kognitif dan tingkat kemandirian usia lanjut
													Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining tekanan darah dan gula darah
													Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pemeriksaan gangguan mental, kognitif dan tingkat kemandirian usia lanjut



													Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining faktor risiko penyakit menular
													Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
													Jumlah penderita hipertensi yang dilakukan pengukuran tekanan darah dan edukasi
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
													Jumlah penderita hipertensi yang dilakukan pengukuran tekanan darah minimal 1 kali sebulan
													Jumlah penderita hipertensi yang dilakukan edukasi
													Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
													Jumlah penderita DM yang dilakukan pengukuran gula darah dan edukasi
													Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
													Jumlah penderita DM yang dilakukan pengukuran gula darah minimal 1 kali sebulan
													Jumlah penderita



													Jumlah penderita TBC baru yang ditemukan
								Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			Jumlah penderita HIV dilakukan Konseling	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (8 populasi berisiko) yang dilakukan edukasi perilaku berisiko
								Jumlah KLB yang ditanggulangi <24 Jam			Jumlah ODHA yang masih mendapat ARV		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (8 populasi berisiko) yang dilakukan skrining
											Peta Risiko Penyakit Infeksi Emerging	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penduduk yang terdampak KLB
												Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah penduduk terdampak





										Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
										Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah kasus kewaspadaan dini yang direpson		
										Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular Langsung		Jumlah kasus Hepatitis B atau C	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang yang dilakukan deteksi dini Hepatitis B atau C
										Jumlah puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai standar		Jumlah penderita Pneumonia Balita yang dilakukan tatalaksana Pneumonia sesuai standar		
										Jumlah puskesmas yang melaksanakan tatalaksana Diare sesuai standar		Jumlah penderita diare yang dilakukan tatalaksana diare sesuai standar		
										Jumlah kasus kusta		Jumlah kasus kusta		





											baru tanpa cacat		
											Jumlah puskesmas yang melakukan eradikasi frambusia		Jumlah penemuan kasus frambusia
											AFP Rate yang ditemukan pada penduduk usia <15 tahun		Jumlah penduduk usia <15 tahun yang memiliki gejala AFP yang dilakukan pemeriksaan
									Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik		Insiden Rate DBD		Jumlah kasus DBD yang ditangani
											Angka Kesakitan Malaria		Jumlah suspect malaria yang dilakukan pemeriksaan Lab (Mikroskop dan RDT)
											Insiden Rate Rabies		Jumlah kasus rabies yang ditangani





							4. Meningkatkan kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Persentase Dokumen Administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan yang berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Informasi Kesehatan yang berkualitas	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pukesmas yang memiliki dokumen perencanaan sesuai standar
														Jumlah Dokumen pembahasan APBN
														Jumlah dokumen renstra
													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA
													Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP
													Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA
													Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA
													Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sakin yang berkualitas



													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas tepat waktu	
													Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase benda pos dan pengiriman dokumen yang tersedia	
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase tagihan komunikasi/air dan listrik yang dibayar	
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang layak pakai	
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan		Persentase terpeliharanya kendaraan dinas jabatan yang layak	



													Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	pakai	
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan kantor	
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Indikator :	
													Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Indikator :	
													Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Indikator :	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat	Indeks Kesehatan	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Perlindungan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Perempuan	Persentase Pemenuhan dan Perlindungan hak-hak Perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak	Indikator: Persentase kasus kekerasan terhadap anak mendapat pendampingan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga-Lembaga Penyedia Layanan	Indikator: Jumlah jenis pendampingan	Kordinasi dan sinkronisasi Penguatan jaringan antar Lembaga penyedia	Indikator : Jumlah Pendampingan	DPPKB3A

at Kabupate n Kepahian g.		akat Kabupa ten Kepahia ng.		an dan Pemenuha n Hak Anak		n dan Anak	n dan Anak		ngan	Peningka tan Kualitas Hidup Anak Kewenan gan Kab/Kota		layan an anak yang memerlukan perlindunga n khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
										Program Perlindu ngan Perempu an		Indikator: Persentase kasus kekerasan terhadap perempua n mendapat pendampi ngan		Penguata n dan Pemb ngan Lembaga Penyedia Layanan Perlindun gan Perempu an Tingkat Daerah Kabupate n / Kota	Indikator: Jumlah Jenis sosialisasi	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Indikator: Jumlah Peserta sosialisasi
										Penyedia an Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempu an Korban Kekerasa n yg memerlu kan koordina si kewenan gan		Indikator:		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi korban kekerasan keweangan Kab/Kota	Indikator: Penyediaan Kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Indikator : Jumlah Pendampi ngan	

										Kab/Kota		kewenangan Kabupaten/Kota			
										Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indikator:	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Tingkat Daerah Kab/Kota	Indikator:	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Indikator:
										Program peningkatan kualitas keluarga	Indikator:	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Indikator : Jumlah Jenis sosialisasi	Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kab/kota	Indikator : Jumlah Peserta sosialisasi
										Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Indikator: Indeks Pemberdayaan Gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indikator: Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Indikator: Jumlah Peserta sosialisasi

									ayaan Perempu an		pada Lembaga Pemerint ah Kewenan gan Kab/Kota			
											Pemberd ayaan Perempu an Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisa si Kemasya rakatan Kewenan gan Kabupate n/ Kota	Indikator : Jumlah pelaksana an sosialisasi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Indikator : Jumlah Peserta sosialisasi
2	Meningka tnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarak at Kabupate n Kepahian g.	Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)	Mening katnya kualitas sumber daya manusi a (SDM) masyar akat Kabupa ten Kepahian g.	Indeks Kesehata n	Terwujudn ya Keluarga Berencana	Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)	Meningkat nya Keperserta an Keluarga Berencana	Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB)	Program Pembina an Keluarga Berenca na	Indikator : Ratio Akseptor KB	Pelaksana an Advokasi, Komunika si, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengenda lian Pendudu k dan KB sesuai	Indikator : Jumlah jenis pelatihan	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja	Indikator : Jumlah Peserta pelatihan

										Kearifan Budaya Lokal			
										Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB di Kabupaten/ Kota	Indikator: Jumlah Jenis sosialisasi	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Indikator: Jumlah Peserta sosialisasi Indikator: jumlah kampung KB
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indikator :Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator : Jumlah Jenis pelatihan dan sosialisasi	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Indikator : Jumlah Peserta pelatihan dan sosialisasi



												Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indikator : Jumlah Surat Izin Belajar dan tugas belajar yang dikeluarkan
						Meningkatkan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator : Persentase pengembangan kompetensi aparatur	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Indikator : Jumlah jenis Diklat PIM	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM II, III dan IV
								Program Kepegawaian Daerah	Indikator :	Pengembangan Kompetensi ASN	Indikator : Jumlah Dokumen Indeks Profesional Aparatur Kabupaten Kepahiang	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indikator : Jumlah OPD yang dikutsertakan dalam penilaian Indeks Profesional Aparatur
						Meningkatkan Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin	Program Kepegawaian Daerah	Indikator : Persentase pembinaan dan disiplin	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Indikator : Jumlah jenis Pelanggaran Disiplin	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian	Indikator : Jumlah Pelanggaran Disiplin PNS yang



							ASN		ASN	Aparatur	PNS yang terselesaikan	Pelanggaran Disiplin ASN	terselesaikan
											Indikator : Jumlah jenis Sertifikat/Lencana SLKS yang dikeluarkan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Indikator : Jumlah Sertifikat Satya Lencana Karya Satya yang dikeluarkan
						Meningkatkan Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan Nilai SKP Katagori Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator : Persentase ASN dengan nilai SKP berkategori baik	Kegiatan Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah jenis dokumen ASN	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator : Jumlah dokumen SKP ASN
												Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Indikator : Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan
												Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator : Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan
								Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indikator :	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran	Indikator : Jumlah jenis Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen	Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan

									ah Daerah Kabupate n/Kota		ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencana an yang diselesaika n	perencanaa n perangkat daerah	an yang diselesaika n	
2	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Penataan Pejabat Struktural Berdasarkan Kualifikasi Tingkat Pendidikan	Persentase Penataan Pejabat Struktural berdasarkan Kualifikasi Tk. Pendidikan/ Latar Belakang Pendidikan	Program Kepegawaian Daerah	Indikator : Persentase penataan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan	Kegiatan Pengadaan , Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Indikator : Jumlah Jenis Penerimaan CPNS dan P3K berdasarkan kualifikasi pendidikan Indikator : Jumlah jenis data PNS yang diolah berdasarkan kualifikasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indikator : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan Indikator : Jumlah Penerimaan CPNS dan P3K berdasarkan kualifikasi pendidikan Indikator : Jumlah Penerimaan PNS dan PPPK berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	DUKCAPIL

												Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indikator : Jumlah SK Pangkat yang dikeluarkan
												Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indikator : Jumlah Surat Izin Belajar dan tugas belajar yang dikeluarkan
						Meningkatkan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indikator : Persentase pengembangan kompetensi aparatur	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Indikator : Jumlah jenis Diklat PIM	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM II, III dan IV
								Program Kepegawaian Daerah	Indikator :	Pengembangan Kompetensi ASN	Indikator : Jumlah Dokumen Indeks Profesional Aparatur Kabupaten Kepahang	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indikator : Jumlah OPD yang dikutsertakan dalam penilaian Indeks Profesional



												Aparatur	
						Meningkatkan Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indikator : Persentase pembinaan dan disiplin ASN	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indikator : Jumlah jenis Pelanggaran Disiplin PNS yang terselesaikan	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Indikator : Jumlah Pelanggaran PNS yang terselesaikan
										Indikator : Jumlah jenis Sertifikat/Lencana SLKS yang dikeluarkan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Indikator : Jumlah Sertifikat Satya Lencana Karya Satya yang dikeluarkan	
						Meningkatkan Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan Nilai SKP Katagori Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator : Persentase ASN dengan nilai SKP berkategori baik	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah jenis dokumen ASN	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indikator : Jumlah dokumen SKP ASN
											Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Indikator : Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	
											Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Perundang-	Indikator : Jumlah Peraturan Perundang-undangan	



													undangan	yang disosialisasikan
									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator :	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah jenis Dokumen perencanaan yang diselesaikan	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indikator : Jumlah Dokumen perencanaan yang diselesaikan
													Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan
3.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat .(SKM)	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Indikator: nilai survei indeks kepuasan masyarakat	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Indikator: jumlah jenis koesioner yang dibagikan	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Indikator: Jumlah Koesioner yang dihasilkan
									Program pengelolaan profil kependudukan	Indikator: persentase data kependudukan	Penyusunan profil kependudukan	Indikator: jumlah jenis buku kependudukan	Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Indikator: Jumlah dokumen
											Penyusunan Profil Data Perkembangan	Indikator: Jumlah buku		

										gan Dan Proyeksi Kependudu kan Serta Kabupaten Lain				
									Program pendaftar an pendudu k	Indikator : persentase penduduk yang sudah merekam ktp-el	Penlayana n pendaftar an penduduk	Indikator : jumla	Pencatatan, penatausah aan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Indikator : Jumlah KTP yang tercetak
									Indikator : Persentase dalam kepemilika n Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator : Jumlah jenis Pelayanan yang di laksana n dalam Dana Alokasi Khusus (DAK)		FASILITASI TERKAIT PENGELOL AAN INFORMASI ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN	Indikator : Jumlah KIA yang tercetak	
									Program pencatata n sipil	Indikator : persentase kepemilika n akta kependud ukan	Pelayanan pencatata n sipil	Indikator : jumlah jenis kepemilika n akta pencatata n sipil	Pencatatan, penatausah aan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Indikator : Jumlah Akta yang diterbitkan
									Program pengelolan informasi admoinis trasi kependu	Indikator : nilai survey indeks kepuasan masyaraka t	Penyelengg araan pengelolan n informasi kependud ukan	Indikator : jumlah jenis kuisoner yang dibagikan	Kerjasama dan pe,manfaat an data	Indikator : jumlah asn yang mengikuti bimtek didang piak

4.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Level Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	dukun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator: Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan kompetensi dibidangnya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator: Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	INSPEKTOR AT										
																	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indikator: Persentase OPD yang mengimplementasikan SOP	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indikator: Persentase kebijakan teknis pengawasaan yang diterbitkan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Indikator: Jumlah Kebijakan (SOP, Surat Keputusan, dll) yang diterbitkan				
																							Pendampingan dan Asistensi	Indikator: Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Indikator: Jumlah laporan money																									



												serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	aksi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi						
												Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja	Level Kapabilitas APIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indikator: Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indikator: Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator: Jumlah laporan hasil audit / pemeriksaan
												Reviu Laporan Keuangan	Indikator: Jumlah pelaksanaan reviu keuangan						
												Reviu Laporan Kinerja	Indikator: Jumlah pelaksanaan reviu						
												Pengawasan Desa	Indikator: Jumlah desa yang diaudit						
												Kerjasama Pengawasan Internal	Indikator: Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti						
												Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	Opini LKPD	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indikator: Persentase temuan audit yang bersifat material	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indikator: Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Indikator: Jumlah rekomendasi BPK RI dan APIP berstatus



							h			nihil		an	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	selesai		
											Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Indikator: Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Indikator: Jumlah kasus kerugian negara/daerah yang ditindaklanjuti		
													Pengawasan dengan tujuan tertentu	Indikator: Jumlah pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu		
5.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Indikator: Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Indikator: Jumlah Jenis Sosialisai peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Indikator: Jumlah Peserta Sosialisasi	KESBANGPOL	



								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Indikator: Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Indikator: Jumlah Jenis Hak masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilukada	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Peilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Indikator: Jumlah Peserta Sosialisasi
												Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Indikator: Jumlah laporan penggunaan bantuan Parpol



												Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantaua n Situasi Politik di Daerah di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n					
											Program Penguata n Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa an	Indikator: Persentase Peningkat an Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indikator: Jumlah Jenis Sosialisasi ideologi pancasila	Pelaksanaa n Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pe mbauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Indikator: Jumlah Peserta Sosialisasi Ideologi Pancasila	



									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indikator: Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indikator: Jumlah Jenis Sosialisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Indikator: Jumlah Peserta Sosialisasi Peredaran Narkotika	
6.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indikator: Persentase Pelayanan Administrasi dan manajemen yang tercapai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Indikator: Jumlah dokumen pelaporan perencanaan dan program yang disusun	RSUD
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator: Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Indikator: Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		
												<i>Koordinasi dan Penyusunan</i>	Indikator: Jumlah Dokumen		

													<i>n Laporan Keuangan Bulanan/TW/Semesteran SKPD</i>	laporan keuangan RSUD, Laporan Akhir tahun dan pemeriksaan rutin dan BLUD yang disusun		
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Penyediaan Bahan Logistik</i>	Indikator : Jumlah atau alat Kebersihan dan tenaga Cleaning Service selama 1 Tahun
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	indikator : Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</i>	<i>indikator : Jumlah Jasa Listrik, Air, Telepon dan Website yang terbayarkan dalam 1 Tahun</i>
													Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	indikator : Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan</i>	<i>Indikator : Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara</i>

											Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Dinas Operasional atau lapangan</i>		
											Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Indikator : Jumlah Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>	<i>Indikator : Jumlah pelaksanaan Promosi Kesehatan Yang dilaksanakan 1 Tahun</i>	
													<i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	<i>Indikator : Jumlah Dokumen SPI,PPI,Formularium Obat, IKM,Nursing staf by laws,Audit keperawatan,Clinical Pathway,S OP/SAK</i>	
7.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam kondisi yg Kondusif	Rasio Satlinmas	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Satlinmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indikator: Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Indikator: Jumlah Jenis Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli	Indikator: Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) Satpol PP (125 Orang)	SATPOL PP

							Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	Tingkat Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah			Penegakan PERDA Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota	Indikator: Jumlah Jenis Penegakan Pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati	n dan Ketertiban Umum Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Indikator: 100 orang Peserta Sosialisasi	
							Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten yg dilayani	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indikator: Persentase Penanggulangan Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah jenis penanganan kebakaran dalam daerah	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Tenaga Lepas Damkar (55 Orang)	
8.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pelayanan Penanaman Modal	Indikator: Persentase Izin Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang	Indikator: Jumlah Jenis Perizinan yang dikeluarkan	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi	Indikator: Jumlah Izin Elektronik yang di dapat di selesaikan.	DPMPTSP

											Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		secara Elektronik.		
													Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.	Indikator: Jumlah Pelaku usaha yang memenuhi komitmen Perizinan berusaha	
								Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan yg ditindaklanjuti					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indikator: Jumlah laporan Pengaduan masyarakat yang dapat terselesaikan.	
9.	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaaan	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	BAPPEDA
									Program Perencanaan, Pengendalian dan	Indikator: Persentase prioritas kecamatan yang			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaaan	Indikator: Jumlah Prioritas Kecamatan yang	



								Evaluasi Pembangunan Daerah	diakomosi r dalam RKPD	n	diusulkan		ng RKPD
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat ketersediaan aplikasi perencanaan yang terintegrasi	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Jumlah Aplikasi yang dikelola dan jumlah laporan pelaksanaan satu data
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang disusun



								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA yang disusun
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia yang disusun
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur yang disusun
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	Indikator: Tingkat konsistensi program RKPD	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Indikator: Jumlah dokumen perencanaan

									Perencanaan Pembangunan Daerah	terhadap RPJMD	Kewilayahan	perencanaan pembangunan bidang Kewilayahan	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	pembangunan bidang Kewilayahan yang disusun	
									Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indikator: Persentase ketersediaan pedoman penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Indikator: Tingkat ketersediaan dokumen hasil kajian	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Indikator: Jumlah dokumen yang disusun	
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pemerintahan dengan RKPD dan RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indikator: Tingkat ketersediaan laporan pelayanan publik yang tersedia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Indikator: Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepahang	
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Indikator: Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangu	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	Indikator: Tingkat ketersediaan laporan terkait IPM dan IPG	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Indikator: Jumlah Laporan yang terkait untuk meningkat	



									Pembangunan Daerah	Manusia dengan RKPd dan RPJMD	Manusia		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kan IPM dan IPG
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dengan RKPd dan RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indikator: Jumlah dokumen ekonomi kabupaten yang tersusun	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Indikator: Jumlah dokumen Study Kelayakan Bisnis produk ekonomi
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Persentase sinergitas rencana pemangunan tingkat Kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional Bidang SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indikator: Tingkat ketersediaan laporan asistensi bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Indikator: Jumlah laporan dokumen yang diasistensi kan untuk sinkronisasi dokumen perencanaan bidang SDA
									Program Koordinasi Dan	Indikator: Persentase tercapainya	Koordinasi Perencanaan Bidang	Indikator: Jumlah ketersediaan	Pelaksanaan Monitoring	Indikator: Jumlah laporan

									Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	a rencana kerja daerah Bidang SDA	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	n laporan monitoring dan evaluasi Bidang SDA	dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang SDA di RKPD dan RPJMD yang terealisasi
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	Indikator: Jumlah ketersediaan laporan asistensi bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktu r	Indikator: Jumlah laporan dokumen yang diasistinsi kan untuk sinkronisasi dokumen perencanaan bidang Infrastruktur
									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Persentase tercapainya rencana kerja daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an	Indikator: Jumlah ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Indikator: Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Infrastruktur di RKPD dan



													Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	RPJMD yang terealisasi
													Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kewilayahannya	Indikator: Jumlah laporan dokumen yang diasistensikan untuk sinkronisasi dokumen perencanaan bidang Kewilayahannya
													Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kewilayahannya	Indikator: Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Kewilayahannya di RKPD dan RPJMD yang terealisasi





									Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan Manusia dengan RKPD dan RPJMD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indikator: Jumlah kebijakan tentang kemiskinan dan SDGs yang tersusun	Koordinasi pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Indikator: Jumlah dokumen dan laporan (LP2KD dan SDGs)
									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat ketrcapaian target kinerja pembangunan tahun berjalan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Laporan
									Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator: Tingkat ketrcapaian target kinerja pembangunan tahun berjalan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indikator: Jumlah Laporan
									Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indikator: Persentase ketersediaan	Administrasi Kepegawaian	Indikator: Jumlah ASN yang terlatih/te	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Indikator: Jumlah ASN yang mengikuti



									ahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang urusan pemerintahan pada BAPPEDA	Perangkat Daerah	rdidik	berdasarkan Tugas dan Fungsi	pelatihan pendidikan formal dan non formal	
10.									Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kegiatan yang mendukung Sekretaris DPRD untuk pelayanan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kepahang	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Sinkronisanya Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD dengan capaian target dokumen laporan	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan dalam 1 Tahun	DPRD
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
												Penyusunan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	Indikator : Jumlah Laporan dan Pronogsis Realisasi Anggaran		
											Administrasi Kepegawaian Perangkat	Indikator : Meningkatnya wawasan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Indikator : Jumlah Stel pakaian dinas	

												Daerah	Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan DPRD	kelengkapannya	Anggota DPRD dan ASN
														Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indikator : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat
														Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator : Jumlah peraturan yang akan disosialisasikan
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator : Meningkatnya pelaksanaan penyediaan pelayanan terhadap penunjang kinerja administrasi umum	Penyed. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator : Jumlah penyediaan instalasi listrik dan peralatan listrik kantor
														Penyed. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator : Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam mendukung tupoksi kinerja Sekretariat DPRD
														Penyed. Peralatan Rumah	Indikator : Jumlah peralatan

											ASN dengan tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jabatan		
												Penyed. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator : Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam pemenuhan biaya pemeliharaan jasa pajak	
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator : Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan service	
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator : Jumlah gedung DPRD yang di rehabilitasi/pemeliharaan	
										Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indikator : Tercapainya pelayanan DPRD baik dalam kesehatan dan penunjang dalam	Penyed. Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Indikator : Jumlah Stel Pakaian Dinas Anggota DPRD	
												Pelaksanaan Medical Check UP	Indikator : Jumlah pelaksanaan	

												melaksana kan Tugas dan Kewenang an		an medical check up untuk anggota DPRD		
												Layanan Administra si DPRD	Indikator : Tercapai nya pelayanan DPRD baik dalam administra si maupun penyediaan kebutuhan Rumah Dinas Unsur Pimpinan	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Indikator : Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksana an	
													Penyed. Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator : Jumlah kebutuhan rumah tangga rumah dinas		
													Pembantu kan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indikator : Terealisasi nya Peraturan Daerah sebagai salah satu kebijakan dari Eksekutif dan Inisiatif.	Pembahasa n Rancangan Peraturan Daerah	Indikator : Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda
														Penyelengg araan Kajian Perundang -undangan	Indikator : Jumlah Kajian Perundang -undangan yang dikaji ulang/pem bahasan ulang	
														Fasilitasi Penyusuna n Penjelasan/ Keterangan	Indikator : Jumlah Naskah Akademik yang	



												dan/atau Naskah Akademik	disiapkan Tim Ahli
												Pembahasan KUA dan PPAS	Indikator : Jumlah fasilitasi rapat pembahasan KUA PPAS
												Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indikator : Jumlah fasilitasi rapat pembahasan KUA PPAS Perubahan
												Pembahasan APBD	Indikator : Jumlah Fasilitasi rapat APBD
												Pembahasan APBD Perubahan	Indikator : Jumlah Fasilitasi rapat APBD Perubahan
												Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Indikator : Jumlah Fasilitasi rapat Pertanggung jawaban APBD
												Pengawasan Penyelenggaraan	Indikator : Terlaksananya penyeleng
												Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang	Indikator : Jumlah Pengawasan pada



											Pemerintah	garaan pengawasa n Anggota DPRD terhadap Pemerintah h Daerah agar tercapiany a nilai SAKIP yang baik	Pemerintah an dan Hukum	OPD/lemb aga Mitra Kerja
													Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Infrastruktur	Indikator : Jumlah Pengawasa n pada OPD/lemb aga Mitra Kerja
													Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomi an	Indikator : Jumlah Pengawasa n pada OPD/lemb aga Mitra KerjaJuml ah Pengawasa n pada OPD/lemb aga Mitra Kerja
													Pengawasa n Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indikator : Jumlah Fasilitasi Pembahas an rapat terhadap TLH BPK
													Penyed. Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Indikator : Jumlah penyediaa n Tim ahli/ kelompok pakar



													Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indikator : Jumlah melaksanakan hearing/sidak pada OPD Pemerintah Daerah/Mitra Kerja
													Penyusunan Program Kerja DPRD	Indikator : Jumlah dokumen RENJA DPRD
													Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Indikator : Tercapainya aspirasi masyarakat yang dirumuskan dalam Porkir Anggota DPRD untuk direalisasikan di APBD
													Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Indikator : Jumlah Kunjungan Kerja/Sidak
													Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indikator : Jumlah Dokumen Porkir DPRD
													Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik	Indikator : Meningkatnya kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang dengan adanya Pengawasan Kode Etik DPRD
													Pengawasan Kode Etik DPRD	Indikator : jumlah pengawasan kode etik terhadap kinerja DPRD





											n Badan Kehormatan Dewan (BKD)			
											Pembahasan Kerjasama Daerah	Indikator : Terkoordinasinya kerjasama daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan adanya persetujuan dan pengawasaan oleh anggota DPRD	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Indikator : Jumlah Kerjasama Daerah yang akan di verifikasi
											Fasilitasi Tugas DPRD	Indikator : Terlaksananya tugas - tugas dan wewenang DPRD sebagai wakil rakyat	Koordinasi Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Indikator : Jumlah Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
											Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Indikator : Jumlah laporan kinerja DPRD	
											Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Indikator : Jumlah undangan yang di hadiri oleh unsur pimpinan	





11									Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: presentase terlaksananya program pemerintahan dalam urusan penunjang pemerintahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator: jumlah pengadaan BMD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	indikator : jumlah kendaran dinas/operasional yang diadakan	SETDA
													Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	indikator : jumlah meublair dan komputer yang diadakan	
										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Indikator: presentase terlaksananya program pemerintahan dalam urusan penunjang pemerintahan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
program perekonomian dan pembangunan	Indikator:	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indikator: jumlah OPD yang menyampaikan laporan kegiatan pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Indikator: jumlah rapat/pertemuan untuk kegiatan yang memfasilitasi kegiatan kerjasama program pembangunan										
													Pengendalian dan	Indikator: presentase	

													Evaluasi Program Pembangunan	pembangunan yang dikendalikan dan terevaluasi
													Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Indikator: presentase keakuratan data Realisasi Anggaran yang dilaporkan OPD
													program perekonomian dan pembangunan	Indikator: presentase terlaksana dan terwujudnya tata kelola OPD yang mendukung meningkatkan pembangunan dan perekonomian
													Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Indikator: presentase kebijakan untuk meningkatkan perekonomian
													Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Indikator: presentase kegiatan yang termonitor dan terevaluasi yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan BUMD dan BLUD
													Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Indikator: jumlah rapat untuk kegiatan pertemuan perusahaan / corporate social responsibility BUMN,

									Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indikator: besarnya peningkatan presentase pendukung pemerintahan dan pendukung kesejahteraan rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indikator: besarnya peningkatan presentase produk hukum yang terfasilitasi dan tersosialisasikan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	indikator : Jumlah Dokumen kajian akademis untuk produk hukum
													Fasilitasi Bantuan Hukum	indikator : Jumlah bantuan hukum, sengketa hukum dan RANHAM yang terlaksana dan terselesaikan
													Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	indikator : Jumlah produk hukum yang disosialisasikan dan produk hukum yang dipublikasikan ke Website JDIH
									Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator: presentase terlaksananya program	Penataan Organisasi	Indikator: meningkatnya kualitas, pemahaman	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	indikator : Jumlah Dokumen ABK

								Daerah Kabupaten/Kota	pemerintah dalam urusan penunjang pemerintahan		an tentang tugas fungsi masing-masing organisasi OPD	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
												Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	indikator : Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepahang
								program perekonomian dan pembangunan	Indikator: presentase terlaksana dan terwujudnya tata kelola OPD yang mendukung meningkatkan pembangunan dan perekonomian	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Indikator: jumlah OPD yang menyampaikan laporan kegiatan pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Indikator: jumlah rapat/pertemuan untuk kegiatan yang memfasilitasi kegiatan kerjasama program pembangunan
								Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indikator: besarnya peningkatan presentase pendukung pemerintah	Administrasi Pemerintahan	Indikator: Presentase administrasi pemerintahan yang terselesaikan	Penataan Administrasi Pemerintahan	indikator : jumlah rapat FORKOPI MDA dan fasilitasi asosiasi pemerintah

										han dan pendukung kesejahteraan rakyat			h	
												Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	indikator : jumlah Sertifikat tanah dan dokumen perencanaan pengadaan tanah	
												Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	indikator : jumlah kerjasama daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga, dan jumlah Laporan LPPD	
										Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indikator:		indikator : pemberangkatan dan pemulangan haji Kabupaeten Kepahiang terselenggaraanya perayaan hari-hari besar islam.	
												Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		

													<p>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial</p> <p>indikator : terlaksananya hibah untuk kesejahteraan sosial</p>
													<p>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>indikator : terlaksananya isbat nikah bagi masyarakat tidak mampu terpilihnya peserta MTQ tingkat provinsi</p>
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indikator:	Fasilitasi Keprotokolan	<p>indikator : jumlah terfasilitasinya kegiatan untuk memfasilitasi rangkaian acara pimpinan</p>
												Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	<p>indikator : jumlah komunikasi pertemuan rapat-rapat untuk</p>



														tamu pimpinan dan fasilitasnya	
													Pendokumentasian Tugas Pimpinan	indikator : jumlah dokumentasi informasi pembangunan dan kinerja pimpinan di website kepahang.go.id	
12			Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	Opini LKPD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu	Koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Indikator: 2 Dokumen KUA dan PPAS	BKD
												Jumlah dokumen KUA dan PPAS perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	Indikator: 2 Dokumen KUA dan PPAS perubahan	
												Jumlah dokumen Raperda dan Raperbup tentang APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran	Indikator: 2 Dokumen Perda APBD dan Perda penjabaran APBD	
												Jumlah dokumen pedoman Penyusunan APBD			



											Jumlah evaluasi anggaran dan rencana kerja SKPD, Jumlah dokumen penyusunan anggaran belanja tidak langsung SKPD dan SKPKD, Jumlah Bimtek penyusunan RKA, Jumlah dokumen penyusunan sistem informasi dan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	APBD		
											Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Indikator: 2 Dokumen Perda APBD dan Perda penajbaran APBD		
											Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja daerah	Indikator: 6 Dokumen/kali Koordinasi perencanaan anggran belanja daerah		
										Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi dan konsultasi kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Indikator: 4 Kali koordinasi dan pemeliharaan kas daerah	



											online		
											Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian TKUD	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Indikator: 1 dokumen pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
											Jumlah dokumen pelaporan transfer daerah DAK	Koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Indikator: 1 dokumen Koordinasi, fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya
											Terlaksananya pemutahiran data ASN dan rekonsiliasi gaji pemkab. Kepahang	koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas	Indikator : 1 dokumen koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan

											si keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pemantauan dan pertanggungjawaban (SPJ)	dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	si keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	
											Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO dan beban	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO dan beban	Indikator: 4 kali Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO dan beban
											Jumlah dokumen dan Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Indikator: 1 dokumen dan Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	



												Jumlah dokumen dan Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten /Kota	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten/ Kota	Indikator: 2 dokumen, Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi dan kabupaten /Kota
												Jumlah dokumen regulasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Indikator: 1 dokumen regulasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah
												Jumlah dokumen Penyusunan sistem dan prosedur Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah	Penyusunan sistem dan prosedur Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah	Indikator: 1 dokumen Penyusunan sistem dan prosedur Akuntansi dan pelaporan keuangan

											Daerah	tentang standar Harga,ASB ,HSPK dan standar perjalanan Dinas		standar harga
												Terlaksanaan peningkatan manajemen aset/barang daerah	Penatausahaan Barang Milik daerah	Indikator : 1 laporan barang milik daerah
												Jumlah dokumen inventarisasi aset BMD	Inventarisasi Barang Milik daerah	Indikator: 1 dokumen inventarisasi barang milik daerah
												Jumlah pemusnahan dan penghapusan BMD	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Indikator: 2 dokumen Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah

												Jumlah pemindahtanganan BMD	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Indikator: 1 dokumen Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---	--	--

Misi III : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur.

No	Tujuan kada	Indikator tujuan kada	Sasaran kada	Indikator sasaran kada	Tujuan perangkat daerah	Indikator tujuan perangkat daerah	Sasaran perangkat daerah	Indikator sasaran perangkat daerah	Program	Indikator kinerja program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator sub kegiatan	OPD Penanggung Jawab	
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis dengan memperhatikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Kepuasan masyarakat bidang infrastruktur	Percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.	Kepuasan masyarakat bidang infrastruktur	Pemenuhan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur strategis	kepuasan masyarakat bidang infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan budaya	Persentase jalan dalam kondisi baik	Program penyelenggaraan jalan	Persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan yang terselenggara baik ditataran perencanaan maupun pelaksanaan fisik jalan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jalan	Dinas pupr	
													Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun		
													Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi		
													Pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara baik secara rutin atau		

													berkala		
													Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	
													Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	
													Rehabilitasi jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	
													Pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara baik secara rutin atau berkala	
													Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam	Jumlah dokumen teknis, rencana, kebijakan spam	
													Pembangunan spam di kawasan perkotaan	Jumlah / titik spam yang dibangun di kawasan perkotaan	
													Pembangunan spam di kawasan perdesaa	Jumlah / titik spam yang dibangun di kawasan	
						Meningkatnya jumlah penduduk yang berakses air minum	Persentase penduduk yang berakses air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah kk / unit rumah yang berakses air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota	Jumlah unit spam yang dikelola dan dikembangkan baik di kawasan perkotaan atau pedesaan				Dinas pupr

												n	perdesaan		
												Peningkatan spam di kawasan perkotaan	Jumlah / titik spam yang ditingkatkan di kawasan perkotaan		
												Perluasan spam di kawasan perkotaan	Jumlah / titik / jumlah pelanggan spam yang dilayani di kawasan perkotaan		
												Perbaikan spam di kawasan perdesaan	Jumlah / titik spam yang diperbaiki di kawasan perdesaan		
												Operasi dan pemeliharaan spam di kawasan perkotaan	Jumlah / titik spam yang dipelihara di kawasan perkotaan		
							Meningkatnya kualitas dan kuantitas drainase	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung	Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan baik ditataran perencanaan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Dinas pupr

										dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	maupun pelaksanaan fisik drainase	n						
												Pembangunan sistem drainase perkotaan dan lingkungan	Panjang drainase yang dibangun					
												Peningkatan saluran drainase perkotaan dan lingkungan	Panjang drainase yang ditingkatkan					
												Rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan	Panjang drainase yang direhabilitasi					
												Operasi dan pemeliharaan sistem drainase	Panjang drainase yang dipelihara					
										Meningkatnya panjang irigasi dan daerah yang dilayani irigasi	Persentase irigasi dalam keadaan baik	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase irigasi dalam keadaan baik dan berfungsi	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer	Luas irigasi primer dan sekunder yang dikelola	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan	Jumlah dokumen teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk	Dinas pupr

										baik	dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dan dikembankan baik ditataran perencanaan maupun pelaksanaan fisik	an hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	konstruksi irigasi dan rawa
													Pembangunan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun
													Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan
													Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi
													Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara
													Operasional unit pengelola irigasi	Jumlah operasional personil penjaga (pengelola) pintu air

							Meningkatnya fasilitas perkantoran dan gedung daerah	Ratio gedung dan kantor	Program penataan bangunan gedung	Persentase dinas atau opd yang terlayani bangunan gedung daerah	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah dinas atau opd yang memiliki fasilitas perkantoran dan gedung	Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubahsuai, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah kantor yang dibangun dan diubahsuai	Dinas pupr
							Meningkatnya jumlah rumah tinggal yang bersantitas layak	Persentase rumah tinggal bersantitas layak	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentasi wilayah padat yang terlayani oleh spald	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah rumah yang dilayani oleh spald	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan sistem pengelolaan spald	Dinas pupr
												Pembangunan sistem	Jumlah unit spald atau		

												pengelolaan air limbah daerah	jaringan yang dibangun	
												Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Jumlah unit spald atau jaringan yang dipelihara	
						Meningkatnya jumlah yang terlayani sistem pengolahan sampah dan tersedianya sarana persampahan	Presentase wilayah yang terlayani sistem dan pengolahan persampahan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase kecamatan yang terlayani sistem persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	Ratio sampah yang tertampung	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan tpa/tpst/spa/tps-3r/tps kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengolahan persampahan	
											Pembangunan tpa/tpst/spa/tps-3r/tps	Jumlah / unit tpa/tpst/spa/tps-3r/tps yang dibangun		
											Rehabilitasi tpa/tpst/	Jumlah / unit tpa/tpst/sp		
														Dinas pupr



											spa/tps-3r/tps	a/tps-3r/tps yang direhabilitasi							
											Peningkatan tpa/tpst/spa/tps-3r/tps	Jumlah / unit tpa/tpst/spa/tps-3r/tps yang ditingkatkan							
											Penyediaan sarana persampahan	Jumlah sarana sistem persampahan yang disediakan							
											Meningkatnya kualitas kawasan hunian	Persentase peningkatan kualitas kawasan hunian	Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh disatu wilayah kabupaten	Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Persentase kawasan kumuh di satu wilayah kecamatan	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Jumlah rtlh yang diperbaiki dan pengurangan terhadap pemukiman kumuh	Dinas pupr
											Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta	Jumlah rtlh dan unit psu yang diperbaiki							



											erat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	dan utilitas sekolah yang rehabilitasi	
											Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan sarana, prasarana serta utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dipelihara	
	Meningkatnya hasil pertanian dan menekan biaya transportasi	Luas wilayah yang dialiri irigasi dan kemudahan pencapaian lokasi	Tersedianya akses dan sarana prasarana pertanian	Persentase peningkatan jumlah panen dan akses	Meningkatnya jumlah pertanian dan perkebunan	Ratio infrastruktur pertanian dalam keadaan baik	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase sarana, prasarana serta utilitas pertanian yang disediakan dan dikembangkan	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah sarana, prasarana serta utilitas pertanian yang dikembangkan	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah panjang jaringan irigasi yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Dinas pertanian
										Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		
										Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan	Jumlah embung yang dibangun, direhabilitasi		



											raan embung pertanian	si dan di pelihara	
											Pembang unan, rehabilita si dan pemeliha raan prasaran a pertanian lainnya	Jumlah sarana prasarana pertanian, yang direhabilita si dan di pelihara	
											Pembang unan, pengemb an, rehabilita si rumah sakit beserta sarana dan prasaran a penduduk ngnya	Jumlah sarana prasarana pertanian, yang direhabilita si dan di pelihara	Dinas kesehatan
											Pembang unan, pengemb an, rehabilita si puskesm as	Jumlah sarana prasarana pertanian, yang direhabilita si dan di pelihara	
											Pembang unan, pengemb an, rhabilitas i fasilitas	Jumlah sarana prasarana pertanian, yang direhabilita	
	Meningk atnya sarana dan prasara na kesehat an yang memada i	Minimnya jumlah masyarakat yang tidak terlayani program kesehatan	Tersediany a akses dan sarana prasarana kesehatan	Ratio sarana dan prasarana kesehatan dan kemudaha n akses	Meningkat nya layanan kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan peroranga n	Ratio infrastruk tur kesehatan dalam keadaan siap	Program pemenuh an upaya kesehata n perorang an dan upaya kesehata n masyarakat at	Persentase sarana, prasarana serta utilitas keshatan yang di penuhi	Penyedia an fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenan gan daerah kabupate n kota	Jumlah sarana, prasarana serta utilitas kesehatan disediakan			

											kesehat n lainnya	si dan di pelihara	
											Pemeliha raan prasaran a dan penduku ng fasilitas pelayana n kesehata n	Jumlah sarana prasarana pertanian, yang direhabilita si dan di pelihara	
	Lingkun gan yang sehat dan bebas dari polusi	Minimnya tingkat pencemar an lingkunga n (air, udara dan lahan)	Menjaga dan meningkat kan kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkunga n	Memperta hankan dan meningkat kan kualitas air dan sumber mata air	Indeks kualitas air	Program perencana aan lingkung an hidup	Presentase pelaksana an perencana an lingkunga n hidup	Penyelen ggaran kajian lingkung an hidup streategis (klhs) kabupate n/kota	Jumlah dokumen kebijakan hasil kajian dan analisa	Pembuat an dan pelaksana an klhs rencana tata ruang	Jumlah dokumen dan kebijakan sinkronisasi pelaksanaa n klhs dan penataan ruang	Dinas lingkungan hidup
											Pembuat an dan pelaksana an klhs untuk krp yang berpoten si menimbu lkan dampak/ resiko lingkung an hidup	Jumlah dokumen kebijakan rencana program untunk mengurangi resiko dampak lingkungan hidup	

								perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	an dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	izin pplh						
								Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase sumber daya air yang dikelola secara maksimal	Pengelolaan sda dan pembangunan panti pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah unit pengelolaan sda	Pengelolaan hidrologi dan kualitas air ws kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin pplh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah unit usaha yang diawasi		
								Program pengelolaan dan pengembangan sistem air	Presentase limbah yang dikelola	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Jumlah spald yang dikelola dan dikembalikan	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan	Jumlah unit pengelolaan air dan pengawasaan kualitas air	Panjang sungai yang dipelihara sempadannya	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi teknis pengelolaan	Dinas pupr

														an, pendaura n ulang dan pemanfaa tan kembali						
														Penangan an sampah dengan melakuk an pemilaha n, pengump ulan, pengangk utan, pengolah an, dan pemroses an akhir sampah di tpa/tpst/ spa kabupate n/kota	Jumlah sampah yang diangkut ke tpa					
														Penyusu nan kebijakan kerjasam a pengelola an persampa han	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan sampah					
														Program pemb angan	Persentase sampah yang	Pengemb angan sistem	Jumlah sistem persampa	Penyedia an sarana	Jumlah sarana sistem	Dinas pupr

								sistem dan pengelolaan persampahan regional	dikelola	dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota	han yang dikembalikan dan ditingkatkan	persampahan	persampahan yang disediakan	
												Pembinaan teknik pengelolaan persampahan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	
												Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat rangka penyediaan sarana tpa/tpst/spa/tps3r/tps	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	
			Mempertahankan dan meningkatkan jumlah ruang hijau	Indeks ketertutupan lahan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase keanekaragaman hayati yang dikelola	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah ruang terbuka hijau dan keragaman hayati yang dikelola				Pengelolaan ruang terbuka hijau (rth)	Jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola	
					Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase keanekaragaman hayati yang dikonservasi	Pengelolaan taman hutan raya (tahura) kabupaten/kota	Jumlah tahura yang dikelola				Pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan tahura	Jumlah thura yang ditanggulangi dan dibatasi kerusakannya	Dinas lingkungan hidup



										rentan						
										Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah koordinasi dan sosialisasi taruna siaga bencana					
										Program pengembangan perumahan	Persentase pengembangan perumahan	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah yang data dan rumah yang ditangani akibat bencana yang tersedia	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Jumlah lokasi rawan bencana yang teridentifikasi	Dinas pupr
													Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah rumah korban bencana yang terdata		
													Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah data rumah sesuai dengan tingkatan kerusakan		



			Menciptakan rasa nyaman wisatawan dan kemudahan akses capaian objek wisata	Jumlah objek wisata yang ditingkatkan	Menciptakan kemudahan akses dan kenyamanan pengunjung objek wisata	Indeks kepuasan pengunjung objek wisata	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata	Presentase peningkatan sarana pendukung sektor pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase objek wisata yang ditingkatkan	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah objek wisata yang dikelola	Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan strategis pariwisata	Dinas parpora	
													Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah objek pariwisata yang dikembangkan		
													Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang disediakan dan dipelihara		
						Indeks kepuasan pengunjung objek wisata	Meningkatkan kemudahan pencapaian akses pariwisata	Presentase peningkatan akses menuju lokasi objek wisata	Program penyediaan jalan	Persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	Penyenggaraan jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan yang terselenggara baik ditataran perencanaan		Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jalan	Dinas pupr

											maupun pelaksanaan fisik jalan	pengembangan jalan		
												Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	
												Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang di rekonstruksi	
												Pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang dipelihara baik secara rutin atau berkala	
												Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	
												Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	
	Menciptakan reformasi birokrasi	Berjalannya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks spbe	Tersedianya arsitektur spbe	Presentase tersedianya sarana, prasarana serta utilitas pelaksanaan spbe	Program aplikasi informatika	Persentase opd yang telah melaksanakan spbe	Pengelolaan e-governmen di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan e-governmen t dilingkup pemda	Penataksanaan dan pengawasan e-governmen t dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Dokumen pedoman tatalaksana penyelenggaraan spbe	Dinas kominfodip ersantik	
											Sinkronisasi pengelola	Dokumen rencana induk		



											an rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	anggaran pemerintah berbasis elektronik											
											Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah data yang tersedia dan kemudahan akses data											
											Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintahan daerah	Sistem aplikasi komunikasi intra pemerintah daerah											
											Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Pengembangan aplikasi serta kecepatan akses data dan informasi											
											Kenyamanan	Menurunnya	Menciptakan rasa	Ratio keselamatan	Tersedianya	Jumlah ketersediaan	Program penyelenggaraan	Persentase penyelenggaraan	Penetapan	Jumlah dokumen	Pelaksanaan	Dokumen tatralok	Dinas perhubungan



												Desa	
												Pembinaan Dan Penataan Aset Desa (SIPADES)	Indikator : Jumlah Aset Desa (SIPADES)
								PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Indikator : Persentase Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Indikator : Jumlah Jeniis Pemilihan Perangkat Desa	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Indikator : Jumlah Kepala Desa Yang Terpilih
						Meningkatnya Peran Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat Yg Aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN	Indikator :	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUMDESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA	Indikator :	Pelaksanaan Ekspo Usaha Ekonomi Masyarakat Kawasan Perdesaan	Indikator : Jumlah Ekspo Yang Diikuti
												Penilaian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berprestasi Di Kabupaten Kepahiang	Indikator : Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berprestasi Di Kabupaten Kepahiang
												Pengembangan Badan	Indikator : Jumlah Badan

													Usaha Milik Desa (Bumdes)	Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang Berkembang
									PROGRAM TEKNOLOGI TEPAT GUNA KONSERVASI DAN SUMBER DAYA ALAM	Indikator : Persentase Penyelenggaraan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Indikator : Jumlah Jenis Pemanfaatan TTG	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Dan Lomba Inovasi Desa	Indikator : Jumlah Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna
													Inventarisasi Dan Monitoring Pemetaan Posyantik	Indikator : Jumlah Posyantek Yang Terbentuk Dan Teridentifikasi
													Fasilitasi Pengembangan Indeks Desa Membangun	Indikator : Persentase Desa Maju Dan Berkembang
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya Kualitas Program Transmigrasi	Persentase Tercapainya Jumlah Penempatan Transmigrasi (KK)	Meningkatnya Kualitas Program Transmigrasi	Persentase Tercapainya Jumlah Penempatan Transmigrasi (KK)	PROGRAM PEMBINAAN PEMBERDAYAAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Indikator : Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Dan Pendataan Bidang Tanah Lokasi Transmigrasi	Indikator : Jumlah Warga Transmigrasi	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam	Indikator : Jumlah Lahan Transmigrasi

										an Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	ngan RAT Dan Koperasi Patuh Peraturan	n, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	gan RAT	
													Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Koperasi Patuh Peraturan	
									Pemberdayaan UMKM	Indikator: Persentase Pelatihan Manajemen UKM	Pemberdayaan Usaha Mikro Yg Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Indikator: Jumlah Jenis Pelatihan Manajemen UKM	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	Indikator: Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen UKM	



										Perizinan , Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dg Pemangku Kepentingan					
										Pengembangan UKM	Indikator: Persentase Pertumbuhan UKM	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Indikator: Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	Indikator: Jumlah Peserta Pelatihan UKM
										Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Kategori Perdagangan Besar, Eceran, Bukan Mobil Dan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator: Persentase Sarana Perdagangan	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Sub	Indikator: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Indikator: Jumlah Pasar Yang Di Rehabilitasi



								Sepeda Motor Terhadap PDRB			Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
									Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indikator: Cakupan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Jenis Barang Yang Diawasi	Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Dan Jenis Barang Diawasi
											Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Jenis Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Yang Diawasi	Pengawasan Pengadaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	Indikator: Jumlah Pengadaan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi
													Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk	Indikator: Jumlah Dan Jenis Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi



											Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pameran Dagang Nasional	Indikator: Jumlah Pameran Dagang Nasional Yang Diikuti	
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian	Meningkatnya Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian	Persentase Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan, Hortikultura, Tanaman Pangan Dan Peternakan	Produksi Kopi	PROGRAM PENGEN DALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Indikator</i> : Persentase Bencana Pertanian Akibat Organisme Pengganggu, Zoonosis Dan Bencana Alam	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Indikator</i> : Jumlah Kebutuhan Jenis Pestisida	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan	<i>Indikator</i> : Jumlah Pestisida Yang Tersalurkan Ke Masyarakat	Dinas Pertanian
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Indikator</i> : Persentase Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indikator</i> : Jumlah Komoditas Pertanian Yang Berkualitas	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	<i>Indikator</i> : Jumlah Komoditi Pertanian Unggulan Yang Tersertifikasi (Kopi, Kentang Dan Jeruk)	

									<p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</p>	<p><i>Indikator :</i> Persentase Prasarana Pertanian Yang Efektif Dan Efisien</p>	<p>Pembangunan Prasarana Pertanian</p>	<p><i>Indikator :</i> Jumlah Infrastruktur Pertanian Yang Dibangun</p>	<p>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p>	<p><i>Indikator:</i> Jumlah Panjang Jalan Pertanian Yang Dibangun</p>
													<p>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</p>	<p><i>Indikator :</i> Jumlah Lantai Jemur Dan Saung Kopi Yang Terbangun</p>
									<p>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</p>	<p><i>Indikator :</i> Persentase Perizinan Usaha Pertanian</p>	<p>Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yg Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p><i>Indikator :</i> Jumlah Jenis Izin Usaha Pertanian</p>	<p>Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian</p>	<p><i>Indikator :</i> Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian</p>
									<p>PROGRAM PENYULUH PERTANIAN</p>	<p><i>Indikator:</i> Persentase Penyuluh Pertanian</p>	<p>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p>	<p><i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Penyuluh Pertanian</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Dan Desa</p>	<p><i>Indikator:</i> Jumlah Honorer Penyuluh, Jumlah Pelatihan Yang Dikuti, Jumlah Kelompok Tani Yg</p>

													Mengikuti PENAS KTNA	
								Produksi Daging Ternak	PROGRAM PENGEN DALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Penyakit Hewan Ternak Dan Penanggulangannya	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis	Indikator : Jumlah Hewan Ternak Yang Divaksin Dan Diobati
											Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Jenis Dokumen Kesehatan	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Produk Hewan Di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Dokumen Kesehatan Hewan Yg Masuk Ke Kepahiang
											Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik	Indikator: Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Medik	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Indikator: Jumlah Honorer Petugas Kesehatan Hewan

										Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
										Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Laporan Pengawasan	Pendampingan Unit Usaha Hewan Dan Produk Hewan	<i>Indikator:</i> Jumlah Laporan Pengawasan Usaha Peternakan	
										Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Dokumen Pengawasan	Penanganan Atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangan	<i>Indikator:</i> Jumlah Dokumen Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	
								PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Indikator :</i> Persentase Prasarana Pertanian Yang Efektif Dan Efisien	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Indikator :</i> Jumlah Infrastruktur Pertanian Yang Dibangun	Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	<i>Indikator :</i> Jumlah Rehabilitasi Rumah Potong Hewan Yang Dibangun	
								PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN	<i>Indikator:</i> Persentase Ketersediaan Prasarana	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit	<i>Indikator:</i> Jumlah Indukan Hewan Ternak	Pelestarian Dan Pemanfaatan Wilayah	<i>Indikator:</i> Jumlah Indukan Sapi Yang Dibagikan	



								BANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian	Ternak Dan Rumpun /Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota.		Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun /Galur Ternak	Ke Kelompok
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Indikator :</i> Persentase Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Indikator :</i> Jumlah Jenis SDG Hewan/Tanaman Yang Berkualitas	Penjaminan Dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	<i>Indikator :</i> Jumlah Benih Komoditas Pertanian Unggulan Daerah
										Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Laporan	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak Hijauan Pakan	<i>Indikator:</i> Jumlah Laporan Benih/Bibit Pakan Hijau Yg Bermutu





										Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yg Sumbernya Dalam 1(Satu) Daerah	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Hijauan Pakan	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yg Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Indikator:</i> Jumlah Hijauan Pakan Ternak (Rumput Gajah)
										Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Pengecer	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Laporan	Pemeriksaan Mutu, Khasiat Dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	<i>Indikator:</i> Laporan Pengawasan Obat Hewan
								PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANI AN	<i>Indikator :</i> Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar	<i>Indikator :</i> Jumlah Jenis Penerbitan Izin Usaha	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	<i>Indikator:</i> Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan



										Hewan, Rumah Potong Hewan			
										Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distribut or)	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Rekomend asi Izin	Pengawas an Pelaksana an Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	<i>Indikator:</i> Jumlah Rekomenda si Perizinan Usaha Penegecer Obat Hewan
							Produksi Tanaman Pangan (Padi Dan Jagung)	PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEM BANGAN SARANA PERTANI AN	<i>Indikator :</i> Persentase Sarana Pertanian	Pengawas an Pengguna an Sarana Pertanian	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Dokumen Dan Laporan	Pengawas an Pengguna an Sarana Penduku ng Pertanian Sesuai Dengan Komodita s, Teknologi Dan Spesifika si Lokasi	<i>Indikator:</i> Dokumen Peta Daerah Pertanian (LP2B)
								PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEM BANGAN PRASARA NA PERTANI AN	<i>Indikator :</i> Persentase Prasarana Pertanian Yang Efektif Dan Efisien	Pembang unan Prasara na Pertanian	<i>Indikator :</i> Jumlah Insfrastru ktur Pertanian Yang Dibangun	Pembang unan, Rehabilit asi Dan Pemeliha raan Embung Pertanian	<i>Indikator :</i> Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun
												Pembang unan, Rehabilit asi Dan Pemeliha	<i>Indikator :</i> Jumlah DAM Parit Yang Dibangun

													raan DAM Parit						
														<i>Indikator :</i> Jumlah Long Storage Yang Dibangun					
													Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Long Storage	<i>Indikator :</i>					
													Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Pintu Air	<i>Indikator :</i> Jumlah Pintu Air Yang Dibangun					
													PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Indikator :</i> Persentase Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Indikator:</i> Jumlah Jenis Dokumen Dan Laporan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Indikator:</i> Laporan Kelayakan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
													Produksi Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Merah)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	<i>Indikator :</i> Persentase Prasarana Pertanian Yang Efektif Dan Efisien	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Indikator :</i> Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	<i>Indikator :</i> Tersedianya Alat Dan Mesin Pertanian Yang Dibutuhkan Masyarakat

									PERTANI AN				Pertanian Lainnya	
							Meningkat nya Kesejahter aan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP) Di Kabupaten Kepahang	PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEM BANGAN PRASARA NA PERTANI AN	<i>Indikator</i> : Persentase Prasarana Pertanian Yang Efektif Dan Efisien	Pembang unan Prasaran a Pertanian	<i>Indikator</i> : Jumlah Infrastru ktur Pertanian Yang Dibangun	Pembang unan, Rehabilit asi Dan Pemeliha raan Jaringan Irigasi Usaha Tani	<i>Indikator</i> : Jumlah Jaringan Irigasi Pertanian Yang Dibangun
												Pembang unan, Rehabilit asi Dan Pemeliha raan Balai Penyuluh Di Kecamata n Serta Sarana Penduku ngnya	<i>Indikator</i> : Jumlah Fasilitas Penyuluhan Yang Rehabilitasi Dan Dibangun	
Meningk atnya Laju Pertumb uhan Ekonom i	Laju Pertumbuha n Ekonomi	Meningk atnya Kesejaht eraan Masyara kat	Indeks Gini	Meningkat nya Kesejahter aan Sosial	Angka Kesejahter aan Sosial	Meningkat nya PMKS Yg Mendapat Manfaat Pelayanan, Perlindung an Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yg Mendapat Manfaat Pelayanan, Perlindung an Dan Jaminan Sosial	Program Rehabilit asi Sosial.	<i>Indikator</i> : Persentase PMKS Yang Mendapat kan Pelayanan , Perlindung an Dan Jaminan Sosial.	Kegiatan Rehabilit asi Sosial Dasar Penyanda ng Disabilta s Terlantar , Anak Terlantar , Lanjut Usia Terlantar Serta	<i>Indikator</i> : Jumlah Jenis Pelayanan , Perlindung an Dan Jaminan Sosial Yang Diperoleh PMKS	Pemberia n Bimbinga n Sosial Kepada Keluarga Penyanda ng Disabilita s Terlantar , Anak Terlantar , Lanjut Usia	<i>Indikator</i> : Jumlah Pelayanan, Perlindung an Dan Jaminan Sosial Yang Diterima PMKS Dan PMKS Lainnya.	Dinas Sosial

										(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Diluar Panti Sosial.	kan Pelayanan , Perlindungan Dan Jaminan Sosial Khususnya Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Diluar Panti Sosial.	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan Napza Diluar Panti Sosial	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Khususnya Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Diluar Panti Sosial.		
										Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	Indikator : Persentase Warga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Indikator : Jumlah Warga Miskin Yang Mendapatkan Bantuan Sosial.	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Indikator : Jumlah Pengelolaan Data Warga Miskin Melalui Monev Data Dtk8 Kecamatan Se Kabupaten Kepahiang
												Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Indikator : Jumlah Monev SIGNJ Untuk Update Data Warga Miskin Dan Jumlah Warga Miskin Yang Mendapat Bantuan		

													Sosial.	
													Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Indikator : Jumlah Pemberdayaan Melalui Program Keluarga Harapan
													Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Indikator : Jumlah KUBE
									Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.	Indikator : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Untuk Karang Taruna Dan KUBE.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Hukum Adat Yang	Indikator : Jumlah Karang Taruna Dan KUBE Yang Diberdayakan.	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,P KK,Posyandu LPM Dan Karang Taruna) Lemabaga Adat Desa/Kelurahan	Indikator : Jumlah Karang Taruna Yang Yang Dibina.

											Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota.		Dan Masyarakat Hukum Adat.		
													Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.	Indikator : Jumlah Monev KUBE Lama Dan Pembentukan KUBE Baru Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan.	
													Kegiatan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Melalui Monev Program PKH.	Indikator : Jumlah Monev Program PKH Atas Bantuan Sosial PKH	
									Program Penanganan Bencana.	Indikator : Persentase Layanan Dan Pembagian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Dan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Kabupaten	Indikator : Jumlah Jenis Layanan Dan Pembagian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	Penyediaan Makanan .	Indikator : Jumlah Sembako Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial.	

									Bencana Sosial.	n/Kota	Alam Dan Bencana Sosial.		
										Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam Dan Bencana Sosial Tingkat Kabupaten/Kota.	Indikator : Jumlah Jenis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam Dan Bencana Sosial.	Koordinasi, Sosialisasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.	Indikator : Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam Dan Bencana Sosial.
												Koordinasi, Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	Indikator : Jumlah Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Baik Bencana Alam Maupun Bencana Sosial.
				Meningkatnya Pewarisan Nilai Kejuangan, Kepeloporan Dan Kepahlawanan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Peringatan Hari Pahlawan Dan Terwujudnya Kawasan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Persentase PSKS Yang Diberdayakan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Indikator : Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Jenis Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Pemeliharaan Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
												Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Peserta Pelaksanaan Hari Pahlawan.



1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatnya Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi	Jumlah Investasi /Tahun	Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Indikator: Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Intensif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Jenis Fasilitas Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Intensif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Indikator: Jumlah Perbup Yang Di Sahkan	DPMPTSP
									Promosi Penanaman Modal	Indikator: Persentase Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Jenis Pameran Yang Diikuti	Menyusun Strategi Promosi Penanaman Modal	Indikator: Jumlah Pameran Yang Diikuti	
									Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Indikator: Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Yang	Indikator: Jumlah Jenis Penanaman Modal Yang Terdaftar	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	Indikator: Laporan Pelaku Usaha Yang Telah Melakukan Imigrasi	

										n Modal	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Di Laporan Koordinasi Penanaman Modal (LKPM)	aan Penanaman Modal	Data	
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi Dan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Produksi Ikan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Indikator: Jumlah Jenis Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 Daerah Kab/Kota	Indikator: Jumlah KJA Dan Benih Ikan	Perikanan dan Ketahanan Pangan
													Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Prasarana Perikanan	
													Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dlm 1 Daerah Kab/Kota	Indikator: Jumlah Obat - Obatan Yang Disalurkan	

												Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan Di Darat	Indikator : Jumlah Pembinaan Kelompok Pembudidayaan Ikan	
							Meningkatnya Produksi Pengolahan Ikan	Produksi Pengolahan Ikan Budidaya	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Indikator: Persentase Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Indikator: Jumlah Bimbingan Pengolahan Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Indikator: Jumlah UPI Yang Mendapat Bimbingan
											Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator: Jumlah Jenis Peralatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator: Jumlah UPI/POKLA SAR Yang Mendapat Alat Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	Meningkatnya Ketahanan Pangan Dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Dan Ketersediaan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Indikator: Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator: Jumlah Jenis Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Indikator: Jumlah Lumbung Pangan Yang Aktif Kembali (2 Kelompok)
									Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indikator : Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Indikator: Laporan Penyaluran Jumlah Bahan Pangan Pokok	Penyediaan Informasi Harga Pangan Dan Neraca Bahan Makanan	Indikator: Jumlah Laporan NBM Dan Laporan PPH Ketersediaan
												Indikator: Jumlah TTI (Toko Tani Indonesia) Yang Aktif Kembali (2 TTI)		
													Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Indikator: Jumlah Laporan Panel Harga Pangan

											Angka Kecukupan Gizi		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganket aragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Indikator : 1) Jumlah Kelompok Penerima Bantuan P2L 2) Jumlah Kelompok Penerima PIPL 3) Jumlah Pelaksanaa n Mengikuti HPS 4) Jumlah Lomba B2SA	
							Meningkatnya Tingkat Keamanan Pangan Segar Yang Dikonsumsi	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar Yang Dikonsumsi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Indikator : Persentase Pengawasa n Dan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Jenis Pengawasa n Keamanan Pangan Segar	Penyediaan Sarana Dan Prasaran a Pengujia n Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuha n Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Pelaksanaa n Pengawasa n Keamanan Pangan	
1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Dan Pertumbuhan Sektor	Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Sektor Perindustrian	Meningkatnya Kontribusi Dan Pertumbuhan Sub Sektor	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perindustrian	Meningkatnya Produksi Industri Pengolahan Makanan Dan Minuman	Produksi Industri Pengolahan Makanan Dan Minuman	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Indikator: Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri	Penyusunan, Penerapan Dan Evaluasi Rencana Pembang	Indikator: Jumlah Jenis Peningkatan Kualitas Produksi	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pembang	Indikator: Jumlah IKM Yang Memperoleh Stimulus Produksi Baik	Dinas Perindustrian

			Unggulan Daerah	Pengolahan	Perindustrian Pengolahan	Pengolahan Terhadap PDRB	Dan Minuman				unan Industri Kabupaten Kabupaten/Kota		unan Sumber Daya Industri	Bantuan Sarana Prasarana Produksi Maupun Stimulus Bahan Baku (Sebanyak 150 IKM)
													Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri	Indikator: Jumlah Sarana Dan Prasarana IKM Yang Dapat Dibangun Dalam Menunjang Produksi Dan Promosi (Sarana Prasarana Rumah Promosi Dan Unit Layanan Produksi Kopi) Sebanyak 4 Paket Bangunan Pagar/Tembok, Rumah Jaga, Meubeler Dan Parkiran Taman)

											Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		n/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Sinan) Yg Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Halal, HAKI Dan BPOM
2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Pengangguran Terbuka	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka		Indikator: Persentase Pemenuhan Hak Tenaga Kerja	Pengesaan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1(Satu) Daerah	Indikator: Jumlah Jenis Monitoring Dan Sosialisasi	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Indikator: Jumlah Monitoring Dan Sosialisasi Ketenagakerjaan (50 Perusahaan)

											Kab/Kota					
									Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Pelatihan Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi	Indikator: Jumlah Jenis Pelatihan	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Indikator: Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan	
												Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indikator: Jumlah Jenis Lembaga Pelatihan Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Indikator: Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
									Program Penempatan Tenaga Kerja	Indikator: Persentase Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Indikator: Jumlah Jenis Informasi Kerja	Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Indikator: Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Informasi Pasar Kerja Online		

MISI V : Mendorong peningkatan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

No	Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran Kada	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Output
----	-------------	-----------------------	--------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	---------	-----------	----------	--------------------	--------------	------------------------	--------

1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat PeertumbuhanPendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat PeertumbuhanPendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai Realisasi PAD	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD/ Tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indikator : Persentase pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dan SDM yang bermutu, profesional	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Jenis Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	<i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Indikator : Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik/Instalasi listrik dan Penagadaan UPS	RS
									Persentase pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dan SDM yang bermutu, profesional	Indikator : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota	Indikator : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	<i>Pengadaan Obat, Vaksin</i>	<i>Indikator : Jumlah Paket Pengadaan Obat, Vaksin</i>		
										Indikator : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	Indikator : <i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupate</i>	Indikator : Jumlah Elemen Bab Penilaian yang lulus Akreditasi			



									1		Rujukan Tk. Daerah/Kabupaten/Kota		<i>n/ Kota</i>	
											Penerbitan Izin RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Jenis izin pelayanan Kesehatan	<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>	Indikator : Jumlah Dokumen mutu yang disusun
													<i>Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Indikator : Jumlah Gedung yang terpelihara
													<i>Pemeliharaan Prasarana dan Pedukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Indikator : Jumlah Alat Kantor Rumah Tangga yang terpelihara
													Indikator :	
													<i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	Indikator : Jumlah Alkes/Alat Penunjang Medik yang terkalibrasi
											Peningkatan Pelayanan BLUD	Indikator : Jumlah Kegiatan Peningkata	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	Indikator : Jumlah target Capaian

												n Pelayanan BLUD	BLUD	Pendapatan BLUD dalam 1 Tahun	
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</i>	Indikator : Jumlah Pegawai RSUD yang Mengikuti Pelatihan	
2			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah		Program Pengelolaan pendapatan daerah	Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)	Jumlah sektor pajak daerah yang diidentifikasi dan eksentifikasi	Analisis dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Indikator: 2 sektor pajak	
												Jumlah penyuluhan objek pajak dan subjek pajak	Penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah	Indikator: 3 kali Penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah	
												Jumlah desa, kelurahan dan objek pajak khusus yang dimutakhirkan	pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Indikator: 12 desa/kelurahan dikelola, dipelihara dan pelaporan basis data pajak	

												an		daerah
												Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi PAD jumlah wajib pajak PBB dan PBHTB	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Indikator: 4 kali Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
												Jumlah monitoring pajak dan sarana dan prasarana pendukung peningkatan PAD kab. kepahiang	Penagihan pajak daerah	Indikator: 1 paket Penagihan pajak daerah
												Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Indikator: 4 kali pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah

Berdasarkan hasil perumusan, maka visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 -2026 terdiri dari 8 (delapan) tujuan dengan 15 (lima belas) sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target indikator kinerja yang terukur sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran tersebut juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah yang sekaligus menjadi pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, diharapkan manfaat pembangunan yang tersirat dalam misi – misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Berikut target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026:

Tabel 5.2

**VISI MISI TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KEPAHANG
 MAJU MANDIRI SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68.82	69.36	69.92	70.47	71.02	71.57	71.57
		Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	8.15	8.25	8.35	8.45	8.55	8.65	8.65
			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	13.32	13.53	13.75	13.96	14.17	14.39	14.39
		Sasaran 1.1.2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	67.88	68.02	68.17	68.31	68.45	68.6	68.6
		Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	9,412,460	9,536,080	9,654,200	9,782,230	9,905,440	10,028,560	10,028,560

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
2	Meningkatnya efektifitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi	Tujuan 2.1 : Meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Indeks	C	C	C	B	B	B	B
		Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Indeks	CC	CC	B	B	B	B	B
		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persen	0	55	65	70	75	80	80	
		Nilai Indeks e-Government (SPBE)	Indeks	1.85 (C)	2.1 (C)	2.3 (C)	2.4 (C)	2.6 (B)	2.68 (B)	2.68 (B)	
		Tingkat Penegakan Peraturan Daerah	Persen	98	98	98	98	99	99	99	
		Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik sektor pelayanan perizinan	Zona	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Nilai Pelayanan Publik sektor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Nilai	77.93	83.25	85.5	90	93.7	95	95
			Nilai Pelayanan Publik pada sektor pelayanan kesehatan	Nilai	78	80	82	84	85	86	86
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Tujuan 3.1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	C	C	C	B	B	A	A
		Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	C	C	C	B	B	A	A
		Tujuan 3.2 Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	138	138	138	127.7	115.43	102.6	90.26
		Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya kapasitas bencana daerah	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.54	0.59	0.61	0.64	0.67	0.68	0.68

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Tujuan 3.3 : Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53.88	53.89	53.12	53.93	54.67	55.5	55.5
		Sasaran 3.3.1 Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	50.86	55.89	58.42	60.95	63.48	66.01	66.01
		Sasaran 3.3.2 Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87.28	87.32	87.42	87.52	87.63	87.73	87.73
		Sasaran 3.3.3 Meningkatnya cakupan tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	31.1	31.1	31.2	31.25	31.28	31.3	31.3
4	Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan	Tujuan 4.1 : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	1.3	4.2	4.31	4.38	4.5	4.58	4.58
		Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	25%	20-30%	20-30%	20-30%	20-30%	20-30%	20-30%
		Sasaran 4.1.2 Meningkatnya Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah terhadap	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2.02	4.47	4.77	5.07	5.37	5.67	5.67

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Perekonomian Daerah	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	40%	40-45%	40-45%	40-45%	40-45%	40-45%	40-45%
			Persentase pertumbuhan sektor Industri dan Pengolahan	Persen	3.19	7.94	8.23	8.54	8.83	9.13	9.13
			Kontribusi sektor Industri dan Pengolahan	Persen	8.9%	10.44%	10.7%	10.96%	11.22%	11.47%	11.47%
			Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	4.61	7.94	8.23	8.54	8.83	9.13	9.13
			Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	9.2%	10.44%	10.70%	10.96%	11.22%	11.47%	11.47%
			Persentase pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen	4.77	9.4	9.8	10.19	10.56	10.92	10.92
			Kontribusi sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen	2.30%	2.33%	2.39%	2.45%	2.51%	2.57%	2.57%

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase pertumbuhan sektor Akomodasi dan Makan Minum	Persen	4.69	8.8	9.05	9.28	9.52	9.74	9.74
			Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2.30%	2.35%	2.45%	2.55%	2.65%	2.75%	2.75%
		Tujuan 4.2 : Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	Persen	0.31	0.315	0.313	0.31	0.308	0.305	0.305
		Sasaran 4.1.3 Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	14.54	14.37	14.2	14.03	13.86	13.69	13.69
		Sasaran 4.1.4 Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.55	2.43	2.31	2.19	2.07	1.95	1.95

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
5	Mendorong peningkatan penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.	Tujuan 5.1 : Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Tingkat Pertumbuhan PAD	Persen	5-8%	5-8%	5-8%	5-8%	5-8%	5-8%	5-8%
		Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	rupiah	38.684.583.009	38.884.340.652	42.772.774.717,20	47.050.052.188,92	51.755.057.407,81	56.930.563.148,59	56.930.563.148,59

5.4 PRIORITAS DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mewujudkan capaian pembangunan maka perlu ditentukan prioritas pembangunan yang akan menjadi tonggak capaian antara untuk menuju tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026, antara lain:

a. Prioritas I: **Pembangunan Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Dasar Masyarakat.**

Hal tersebut akan dicapai melalui program prioritas, yaitu :

1. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan layanan pendidikan;
2. Peningkatan akses, kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
3. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, perempuan, anak, pemuda, budaya dan olahraga;

b. Prioritas II: **Peningkatan Layanan PMKS.**

Hal tersebut akan dicapai melalui program prioritas, yaitu :
Pelayanan perlindungan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

c. Prioritas III: **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah.**

Hal tersebut akan dicapai melalui program prioritas, yaitu :

1. Peningkatan standar kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi aparatur;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
4. Peningkatan akuntabilitas keuangan, penataan dan penegakan hukum;
5. Peningkatan penerapan pemerintah berbasis elektronik dan keterbukaan informasi publik;

d. Prioritas IV: **Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur.**

Hal tersebut akan dicapai melalui program prioritas, yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar;
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis;

e. Prioritas V: **Pengembangan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.**

Hal tersebut akan dicapai melalui program prioritas, yaitu :

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Peningkatan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;

f. Prioritas VI: **Peningkatan Perekonomian Daerah.**

Hal tersebut akan dicapai melalui program prioritas, yaitu :

1. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2. Peningkatan dan pengembangan pariwisata berbasis potensi unggulan;
3. Peningkatan perekonomian kerakyatan dan penciptaan iklim usaha serta iklim investasi;
4. Peningkatan kesempatan kerja, kompetensi dan perlindungan tenaga kerja;

TABEL 5.3
KETERKAITAN ANTARA ISU STRATEGIS, PRIORITAS DAERAH
DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
1	Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tingginya Angka Kemiskinan	(1) Pembangunan Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Dasar Masyarakat	(1) Peningkatan Akses, Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan (2) Peningkatan Akses, Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan (3) Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat, Perempuan, Anak, Pemuda, Budaya dan Olahraga
		(2) Peningkatan Layanan PMKS	(4) Pelayanan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2	Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Pemerintahan Desa, dan Belum Efektifnya Reformasi Birokrasi	(3) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	(5) Peningkatan Standar Kualitas Pelayanan Publik
			(6) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Aparatur
			(7) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah





NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS
			(8) Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Penataan dan Penegakan Hukum
			(9) Peningkatan Penerapan Pemerintah Berbasis Elektronik dan Keterbukaan Informasi Publik
3	Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Resiko Bencana, dan Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan	(4) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	(10) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar
3 4	Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Resiko Bencana, dan Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Strktural Perekonomian Daerah	(4) Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur (5) Pengembangan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana (5) Pengembangan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana (6) Peningkatan Perekonomian Daerah	(11) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Strategis
			(12) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4	Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Strktural Perekonomian Daerah	(6) Peningkatan Perekonomian Daerah	(13) Peningkatan Upaya Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana
			(14) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
			(15) Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Unggulan
			(16) Peningkatan Perekonomian Kerakyatan dan Penciptaan Iklim Usaha Serta Iklim Investasi
			(17) Peningkatan Kesempatan Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan evaluasi agenda – agenda pembangunan.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang ditunjukkan pada tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
KABUPATEN KEPAHANG

VISI: MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING		
Misi 1: Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang	1. Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
		2. Meningkatkan kualitas, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan serta minat baca disemua lapisan masyarakat Kabupaten Kepahiang
		3. Mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak bagi anak
		4. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, Olahraga dan Budaya
Misi 2: Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan



Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur, upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan insfrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis		Meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur serta mitigasi bencana dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup

Misi 4: Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang bedaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah terhadap Perekonomian Daerah	1.	Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan Industri Rumah Tangga (Usaha Mikro)
		2.	Mengembangkan produk potensi unggulan daerah dari hulu hingga hilir
		3.	Mengembangkan potensi dan destinasi pariwisata unggulan daerah
	Meningkatnya Penanaman Modal	1.	Mengembangkan iklim penanaman modal di daerah
		2.	Meningkatkan promosi potensi investasi daerah, pelayanan penanaman modal dan tata kelola penanaman modal daerah
	Meningkatnya Kesejahteraan	1.	Meningkatkan penempatan dan perluasan kerja

	Masyarakat	2.	Meningkatkan pelayanan, perlindungan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Misi 5: Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.	Mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

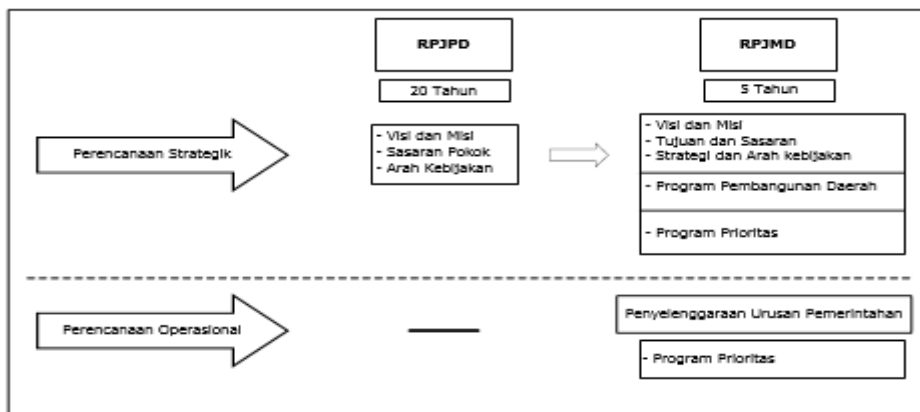
Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategik. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 6.1
 Perencanaan Strategik dan Perencanaan Operasional



Arah kebijakan sebagai pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan dan isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan serta analisis

dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Agar penetapan arah kebijakan terarah dan fokus maka dilakukan pemetaan waktu arah kebijakan pembangunan. Dengan adanya pemetaan waktu pencapaian arah kebijakan dapat terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang selama 5 (lima) tahun ke depan akan diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan yang akan dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 melalui 5 (lima) Arah Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Adapun 5 (lima) Arah Presiden, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang – undang.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi.

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya diejawantahkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 – 2026 merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya.

Penentuan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2021 – 2026 dimulai dengan menghadapi tantangan pemulihan ekonomi, sosial dan budaya akibat dampak pandemi COVID – 19. Skenario pemulihan ekonomi akan terus dijalankan sampai dengan tahun 2026 dan bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan infrastruktur strategis.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6.2
ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KEPAHANG

Tahun	Tema Pembangunan	Arah Kebijakan
Tahun I (Tahun 2022)	Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan ekonomi daerah; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3. Pemenuhan akses, sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; 4. Penanganan kemiskinan; 5. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berorientasi perwujudan ketahanan pangan; 6. Pengurangan penangguran melalui peningkatan kapasitas SDM; 7. Pembangunan infrastruktur strategis; 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Tahun II (Tahun 2023)	Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan pemulihan perekonomian daerah; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung daya saing daerah; 3. Pemenuhan dan pemerataan akses, sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; 4. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 5. Pengelolaan sumber daya alam yang

		<p>berkelanjutan serta berorientasi perwujudan ketahanan pangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Percepatan penurunan pengangguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan kapasitas SDM; 7. Pembangunan infrastruktur strategis; 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, inovatif dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
<p>Tahun III (Tahun 2024)</p>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan daerah; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna mendukung daya saing daerah; 4. Peningkatan dan pemerataan akses, sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan pangan dan peningkatan industri hilirisasi; 6. Peningkatan percepatan penurunan pengangguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing SDM; 7. Peningkatan pembangunan infrastruktur strategis; 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang

		efektif, efisien, inovatif dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
Tahun IV (2025)	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pertumbuhan perekonomian daerah; 2. Percepatan peningkatan dan pemerataan pemerataan akses, sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis; 5. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam untuk ketahanan pangan dan peningkatan industri hilirisasi; 6. Peningkatan percepatan penurunan pengangguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing SDM; 7. Percepatan penanggulangan kemiskinan; 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, inovatif dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
Tahun V (2026)	Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan stabilitas perekonomian daerah; 2. Percepatan peningkatan dan pemerataan pemerataan akses, sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat manusia; 3. Peningkatan daya saing daerah melalui

		<p>peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantapan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk penguatan industri hilirisasi dan penyediaan energi terbarukan; 5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur strategis; 6. Pemantapan penanggulangan kemiskinan; 7. Peningkatan kapasitas SDM pada sektor ketenaga kerjaan dan industri; 8. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
--	--	--

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan pada setiap misi sebagai berikut:

Tabel 6.3
Pencapaian Sasaran Visi Dan Misi Pembangunan
Kabupaten Kepahang Tahun 2021-2026

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 1: Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahang yang hebat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan																	
Tujuan (1) : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahang																	
Sasaran (1.1): Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan																	
0102	Program pengelolaan pendidikan	persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang PAUD	50%	73,996,666,285	20%	92,347,773,570	40	104,233,277,927	60	115,244,630,720	80	126,931,287,542	100	139,716,781,608	100	578,473,751,367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang SD	25%		25%		40		60		80		100		100		
		persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang SMP	55%		60%		70		75		80		85		85		
		persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang Kesetaraan	0%		29		43		57		71		86		86		
Sasaran (1.2): Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																	
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan MASYARAKAT	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82%	36,541,978,765	84%	72,616,000,000	86%	76,246,800,000	88%	81,202,842,000	90%	85,262,984,100	92%	91,231,392,987	92%	91,371,093,256	Dinas Kesehatan
		persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89%		90%		90%		91%		91%		92%		92%		

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026



NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94%		94%		95%		95%		95%		95%		95%		
		persentase kecamatan GERMAS	0%		12,5 %		25%		25%		38%		0%		100 %		
		persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58%		59%		60%		62%		63%		64%		64%		
		persentase UCI (universal childrent imunization)	92%		93%		94%		95%		96%		96%		96%		
		kabupaten sehat	0%		0%		0%		0%		0%		1%		1%		
		persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50%		80%		85%		90%		95%		95%		95%		
		persentase puskesmas yg memenuhi sarana dan alat (SPA) sesuai standar	50%		64%		71%		85%		92%		100 %		100 %		
		persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan Vaksin eksensial	80%		92%		94%		96%		98%		100 %		100 %		





NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	60%		75%		90%		100%		100%		100%		100%		
		persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pemerintah	75%		76%		78%		80%		90%		100%		100%		
		persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan scrining kesehatan sesuai standar	84%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		
		persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%		80%		85%		90%		95%		95%		95%		
		persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78%		78%		78%		78%		78%		78%		78%		
		persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55%		83%		83%		83%		83%		83%		83%		
		persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	45%		96%		96%		96%		96%		96%		96%		





NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		sesuai standar															
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<0,5 %		<0,5 %		<0,5 %		<0,5 %		<0,5 %		<0,5 %		<0,5 %		
		jumlah KLB yang ditanggulangi <24 jam	100%		100 %		100 %		100%		100%		100 %		100 %		
		angka kesakitan akibat penyakit menular langsung	100%		100 %		100 %		100%		100%		100 %		100 %		
		angka kesakitan akibat penyakit menular tukar Vektor dan ZOONOTIK	100%		100 %		100 %		100%		100%		100 %		100 %		
		persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100%		100 %		100 %		100%		100%		100 %		100 %		



NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10303	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktik	55%	205,740,775	60%	29,894,800	60%	530,000,000	71%	458,482,500	77%	481,406,625	82%	515,105,089	82%	665,867,554	
10404	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	45%	298,948,000	50%	205,740,775	50%	410,000,000	55%	592,672,500	65%	622,306,125	70%	665,867,554	70%	515,105,089	
10505	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan GERMAS	13%	281,152,000	13%	281,152,000	13%	550,000,000	25%	615,037,500	37%	645,789,375	0%	690,994,631	100%	690,994,631	
Sasaran (1.3): Meningkatkan kesejahteraan masyarakat																	
30202	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Sarana Pertanian	5 Jenis	1,405,501,600	5 Jenis	1,142,500,000	5 Jenis	1,199,625,000	5 Jenis	1,439,550,000	5 Jenis	1,461,143,250	5 Jenis	1,462,604,393	5 Jenis	1,462,604,393	Dinas Pertanian
30703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya Prasarana Pertanian	62 Unit	2,156,776,000	62 Unit	6,847,500,000	62 Unit	7,189,875,000	62 Unit	8,627,850,000	62 Unit	8,757,267,750	62 Unit	8,766,025,018	62 Unit	8,766,025,018	
30202	PROGRAM PERIZINAN USAHA	Tersedianya Perizinan Pelaku Usaha	1350 Kelo mpok	124,517,500	1350 Kelo mpok	370,000,000	1350 Kelo mpok	388,500,000	1350 Kelo mpok	466,200,000	1350 Kelo mpok	473,193,000	1350 Kelo mpok	473,666,193	1350 Kelo mpok	473,666,193	



NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
706	PERTANIAN	Tani			k		k						k		k		
32504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	produksi ikan budidaya air tawar	70%	1,513,936,200	77%	546,688,860	85%	1,004,551,000	93%	1,125,006,100	103%	1,261,506,710	113%	1,504,657,381	113%	1,504,657,381	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
32506	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	14%	0	29%	323,910,000	44%	356,301,000	58%	391,931,100	73%	431,124,210	88%	474,236,672	88%	474,236,672	
Misi 2: Meningkatnya efektifitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi																	
Tujuan: Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan																	
Sasaran (2.1): Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan																	
50120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	100%	1,212,775,000	100%	875,000,000	100%	875,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,140,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase prioritas kecamatan yang diakomodir dalam RKPD			100%	647,000,000	100%	670,000,000	100%	705,000,000	100%	710,000,000	100%	726,000,000	100%	726,000,000	
		Tingkat ketercapaian target kinerja pembangunan tahun berjalan	100%	229,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangu an Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	100%	1,212,775,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
503		Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	100%	643,711,000	100%	80,000,000		85,000,000		90,000,000		95,000,000		100,000,000	100%	100,000,000	
		Persentase Sinkronisasi program kegiatan bidang pemerintahan dengan RKPD dan RPJMD	100%	81,314,000	100%	50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		75,000,000	100%	75,000,000	
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia dengan RKPD dan RPJMD	100%	47,250,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dengan RKPD dan RPJMD	100%	149,808,000	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	105,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	115,000,000	
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rancangan pembangunan	100%	94,127,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	



NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		tingkat provinsi dan nasional															
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah Bidang SDA	100%	45,980,000	100%	90,000,000	100%	96,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	105,000,000	100%	105,000,000	
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang infrastruktur	100%	89,099,000	100%	65,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah bidang infrastruktur	100%	46,046,000	100%	82,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	120,000,000	
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang Kewilayahan	100%	82,156,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	

KEPAHANG MOUNTAIN VALLEY
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah bidang kewilayahan	100%	46,190,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia dengan RKPD dan RPJMD	100%	199,710,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase ketersediaannya penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah	100%	11,541,997,800	100%	8,527,949,450	100%	8,698,508,439	100%	8,872,478,608	100%	9,049,928,180	100%	9,230,926,744	100%	9,230,926,744	Bagian Organisasi
60103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang mengimplemen tasikan SPIP	65%	504,460,000	68%	958,639,000	70%	977,811,780	71%	997,368,016	73%	1,017,315,376	75%	1,037,661,683	75%	1,058,414,917	Inspektorat
50202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen laporan keuangan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu		7,811,301,900		2,653,221,900		2,918,544,090		3,210,398,499		3,531,438,349		3,884,582,184			BKD Keuangan



NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian raperda/ raperbup APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksana APBD yang disusun															
		persentase dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun															
		Persentase tingkat akueasi data barang milik daerah															
503	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,146,033,000		1,146,033,000		1,260,636,300		1,386,699,930		1,525,369,923		1,677,906,915			
601	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	80%	299,190,000	80%	804,350,000	85%	820,437,000	90%	836,845,740	95%	853,582,654	100%	870,654,307	100%	888,067,394	INSPEKTORAT
602		Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	80%	358,726,000	80%	1,132,800,000	83%	1,155,456,000	85%	1,178,565,120	87%	1,202,136,422	90%	1,226,179,150	90%	1,250,702,734	
50302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penataan Pejabat Struktural berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	99%	Rp 1,623,892,372	99%	Rp 554,405,000	99%	Rp 2,505,000,000	100%	Rp 2,920,000,000	100%	Rp 3,095,000,000	100%	Rp 3,280,000,000	100%	Rp 3,280,000,000	BKD PSDM

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	9%	Rp 28,334,000	60%	Rp 57,650,000	65%	160,000,000	70%	185,000,000	75%	210,000,000	80%	150,000,000	80%	150,000,000	
21602	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat pengelolaan informasi publik	30%	289,730,000	35%	1,250,000,000	45%	1,450,000,000	55%	1,595,000,000	55%	1,754,500,000	60%	1,929,950,000	60%	1,929,950,000	KOMINFO
21603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang telah melaksanakan SPBE	30%	983,200,000	35	2,900,000,000	43	4,930,000,000	50	4,280,000,000	58	4,000,000,000	60	4,050,000,000	60	4,050,000,000	
Sasaran (2.2): Meningkatkan kualitas pelayanan publik																	
21804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	jumlah mediasi dalam pelayanan perizinan	100%	60,000,000.00	100%	63,000,000.00	100%	66,150,000.00	100%	69,457,500.00	100%	72,930,375.00	100%	76,576,894.00	100%	80,405,738.00	DPMPTSP
21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase usaha yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan	100%	326,122,000.00	100%	342,428,100.00	100%	359,549,505.00	100%	377,526,980.00	100%	396,403,329.00	100%	416,223,496.00	100%	437,034,671.00	
21802	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan (RSUD)	75%	2,752,451,600	80%	9,191,510,000	85%	21,386,628,000	85%	19,335,754,000	90%	10,603,157,800	90%	8,404,576,000	100%	71,714,077,400	RSUD

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21022	PROGRAM PENDAFTAR AN PENDUDUK	Presentase Penduduk yang sudah merekam dan Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	-	90%	235,650,000	71%	185,000,000	90%	235,000,000	71%	185,000,000	100 %	260,500,000	100 %	260,500,000	DUKCAPIL
21032	PROGRAM PENCATATA N SIPIL	Presentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	-	-	95%	226,140,000	74%	176,140,000	95%	226,140,000	95%	176,140,000	100 %	238,440,000	100 %	238,440,000	
21044	PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat , Persentase data Kependudukan , Jumlah OPD yang memanfaatkan data	56%	195,000,000	56%	882,190,000	91%	314,159,000	91%	314,159,000	91%	314,159,000	100 %	344,159,000	100 %	344,159,000	
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur																	
Tujuan: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur																	
Sasaran (3.1) : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur																	
10302	PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	0%	-	37%	14,603,600,000	41%	15,245,600,000	45%	15,864,700,000	48%	16,562,255,000	52%	17,239,687,000	100 %	17,239,687,000	Dinas Pekerjaan Umum
10303	PROGRAM PENGELOLA AN DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah yang berakses air minum	0%	-	90%	13,115,500,000	92%	20,851,000,000	94%	9,729,260,375	96%	15,853,220,000	98%	12,326,003,000	100 %	12,326,003,000	

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10304	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kecamatan yang terlayani sistem persampahan	0%	-	60%	1,700,000,000	65%	5,556,250,000	70%	7,262,812,500	75%	9,440,952,500	80%	11,930,247,000	100%	11,930,247,000	
10305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase wilayah padat yang terlayani oleh SPALD	0%	-	50%	6,500,000,000	60%	6,044,750,000	70%	6,578,512,500	80%	6,704,853,750	90%	6,912,467,750	100%	6,912,467,750	
106	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	0%	-	60%	1,800,000,000	65%	8,800,000,000	70%	6,020,000,000	75%	6,251,000,000		6,493,550,000	100%	6,493,550,000	
109	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	0%	-	60%	42,600,000,000	65%	50,362,500,000	70%	52,900,625,000	75%	55,343,155,000	80%	58,495,313,000	100%	58,495,313,000	
10310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	0%	-	55%	42,600,000,000	60%	50,362,500,000	65%	52,900,625,000	70%	55,343,155,000	75%	58,495,313,000	100%	58,495,313,000	
10312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggara program penyelenggaraan penataan ruang	0%	-	60%	450,000,000	65%	2,050,000,000	70%	2,700,000,000	75%	3,100,000,000	80%	3,450,000,000	100%	3,450,000,000	

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase terpenuhinya pengembangan perumahan	0%	-	40%	-	45%	450,000,000	50%	450,000,000	55%	450,000,000	60%	450,000,000	100%	450,000,000	
10403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh disatu wilayah kabupaten	0%	-	50%	6,000,000,000	55%	6,300,000,000	60%	6,615,000,000	65%	6,945,750,000	70%	7,293,037,500	100%	7,293,037,500	
10404	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana utilitas umum dalam kondisi baik	0%	-	50%	1,380,000,000	55%	1,845,625,000	60%	2,167,250,000	65%	2,373,000,000	70%	2,694,625,000	100%	2,694,625,000	
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur																	
Tujuan: Menurunkan Resiko Bencana																	
Sasaran (3.2) : Meningkatnya Kapasitas Bencana Daerah																	
20503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)	Peresentase keterpenuhan capaian penguatan kapasitas bencana	doku men/desa/sekolah	2,788,386,500	doku men/desa/sekolah	3,070,000,000	doku men/desa/sekolah	3,620,000,000	doku men/desa/sekolah	3,970,000,000	doku men/desa/sekolah	4,315,000,000	doku men/desa/sekolah	4,790,000,000		19,659,291,650	BPBD
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur																	
Tujuan: Terjaganya kualitas Lingkungan Hidup																	
Sasaran (3.3) : Meningkatnya Kualitas Air																	
Sasaran (3.4) : Meningkatnya Kualitas Udara																	
Sasaran (3.5) : Meningkatnya Cakupan Tutupan Lahan																	
21100	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup	20%	149,252,000	20%	150,000,000	60%	450,000,000	67%	500,000,000	0%	-	33%	250,000,000	100%	750,000,000	DLH



NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
21103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	8%	50,000,000	47%	275,000,000	58%	345,000,000	92%	540,000,000	96%	565,000,000	100%	590,000,000	100%	590,000,000	
21105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang mendapatkan rekomendasi izin Tempat penyimpanan Sementara Limbah B3	0%	-	54%	140,000,000	58%	230,000,000	75%	300,000,000	88%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	
21106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	24%	199,992,000	48%	390,000,000	77%	630,000,000	84%	690,000,000	91%	750,000,000	100%	820,000,000	100%	820,000,000	
21111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah wilayah yang yang ditangani pengelolaan sampah	24%	400,819,000	60%	995,000,000	72%	1,190,000,000	84%	1,390,000,000	83%	1,370,000,000	95%	1,580,000,000	95%	1,660,000,000	

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
Misi 4: Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan																	
Tujuan: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi																	
Sasaran (4.1) : Meningkatnya Nilai investasi																	
21802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan deregulasi investasi	-	-	100 %	150,000,000.00	100 %	157,500,000.00	100%	165,375,001.00	100%	173,643,750.00	100 %	182,325,937.00	100 %	191,442,234.00	DPMPSTP
21803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	jumlah tujuan promosi investasi	100%	59,998,000.00	100 %	62,997,900.00	100 %	66,147,795.00	100%	69,455,185.00	100%	72,927,944.00	100 %	76,574,341.00	100 %	80,403,058.00	
Sasaran (4.2) : Meningkatnya Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah terhadap Perekonomian Daerah																	
32702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Sarana Pertanian	5 Jenis	1,405,501,600	5 Jenis	1,142,500,000	5 Jenis	1,199,625,000	5 Jenis	1,439,550,000	5 Jenis	1,461,143,250	5 Jenis	1,462,604,393	5 Jenis	1,462,604,393	Pertanian
32703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya Prasarana Pertanian	62 Unit	2,156,776,000	62 Unit	6,847,500,000	62 Unit	7,189,875,000	62 Unit	8,627,850,000	62 Unit	8,757,267,750	62 Unit	8,766,025,018	62 Unit	8,766,025,018	
32704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak	18 Dokumen	377,547,000	18 Dokumen	1,195,000,000	18 Dokumen	1,254,750,000	18 Dokumen	1,505,700,000	18 Dokumen	1,528,285,500	18 Dokumen	1,529,813,786	18 Dokumen	1,529,813,786	

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	VETERINER																
3 2 7 0 5	PROGRAM PENGENDAL IAN DAN PENANGGUL ANGAN BENCANA PERTANIAN	Tersedianya Pupuk dan Pestisida	200 Ton	101,349,000	220 Ton	778,000,000	230 Ton	816,900,000	240 Ton	980,280,000	240 Ton	994,984,200	250 Ton	995,979,184	230 Ton		
3 2 7 0 7	PROGRAM PENYULUHA N PERTANIAN	Tersedianya Penyuluh dan Kelembagaan Penyuluhan	8 Unit	2,282,167,600	8 Unit	1,900,000,000	8 Unit	1,995,000,000	8 Unit	2,394,000,000	8 Unit	2,429,910,000	8 Unit	2,432,339,910	8 Unit	2,432,339,910	
3 2 5 0 4	PROGRAM PENGELOLA AN PERIKANAN BUDIDAYA	produksi ikan budidaya air tawar	70%	1,513,936,200	77%	546,688,860	85%	1,004,551,000	93%	1,125,006,100	93%	1,261,506,710	93%	1,504,657,381	100 %	1,504,657,381	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 2 5 0 6	PROGRAM PENGOLAHA N DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	14%	0	29%	323,910,000	44%	356,301,000	58%	391,931,100	73%	431,124,210	88%	474,236,672	88%	474,236,672	
3 3 1 0 2	PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANGU NAN INDUSTRI	persentase peningkatan kapasitas produksi industri	7%	134,107,000	8%	240,500,000		692,905,000		657,195,500		668,915,050		594,208,965			Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
3 3 1 0 0	PROGRAM PENGENDAL IAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase jenis izin usaha industri yang dikeluarkan pemerintah	7%			195,000,000		-		-		159,500,000		-			



NO	Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3		daerah															
33003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Jumlah dokumen urusan perdagangan (nilai pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB, persentase pengguna produk dalam negeri dan pemasaran produk persentase sarana distribusi perdagangan dan inflasi pangan bergejolak)	55%	315,528,000	70%	400,000,000	75%	500,000,000	80%	600,000,000	85%	700,000,000	90%	800,000,000		3,382,488,500	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
			0%		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		0		
33004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	koefisien kestabilan harga Cakupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	0	42,488,500	0	500,000,000	0	605,000,000	0	650,000,000	0	785,000,000	0	800,000,000		2,486,785,000	
			10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		
33005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor	0	-	50%	400,000,000	55%	445,000,000	60%	493,500,000	65%	545,850,000	70%	602,435,000		1,802,141,000	

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3060	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standar dan perlindungan konsumen	18%	153,764,000	21%	270,000,000	25%	297,000,000	29%	326,700,000	33%	359,370,000	38%	395,307,000		2,226,973,500	
3070	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pemasaran produk dalam negeri	60%	396,973,500	65%	300,000,000	75%	330,000,000	80%	360,000,000	85%	400,000,000	90%	440,000,000			
3082	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase objek wisata yang ditingkatkan	4	16,458,211,600	6	22,500,000,000	4	22,500,000,000	4	18,000,000,000	3	3,000,000,000	3	3,000,000,000	10	82,500,000,000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3082		persentase objek wisata yang ditingkatkan	62%		83%	950,000,000	108%	980,000,000	131%	1,020,000,000	134%	1,040,000,000	138%	1,050,000,000	170%	3,190,000,000	
3083	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	prosentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	25	105,394,000	25	1,600,000,000	37.5	1,620,000,000	50	1,630,000,000	62.5	1,650,000,000	75	1,650,000,000	75	1,650,000,000	
Misi 4: Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan																	
Tujuan: Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat																	
Sasaran (4.3) : Menurunnya angka Kemiskinan																	
10604	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan , perlindungan dan jaminan sosial.	56%	83,800,000	67%	1,569,000,000	67%	1,569,000,000	67%	1,569,000,000	70%	1,599,000,000	75%	1,698,000,000	75%	1,698,000,000	Dinas Sosial
10600	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang mendapat bantuan sosial.	36%	89,200,000	53%	294,000,000	53%	294,000,000	53%	294,000,000	53%	294,000,000	55%	372,000,000	55%	372,000,000	

KEPAHIANG MOUNTAIN VALLEY
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

NO	Misi/ Tujuan/ sasaran/ Program Pembangunan Daerah	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5																	
Sasaran (4.4) : Menurunnya Pengangguran																	
20702	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase dokumen rencana tenaga kerja			5,32 %	145,000,000	0%	147,900,000	0%	150,858,000	0%	153,875,160		156,952,663			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
20703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	20%		20%	90,000,000	20%	90,000,000	20%	108,900,000	20%	119,790,000	20%	131,769,000			
20704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang ditempatkan	25%		25%	150,000,000	26%	165,000,000	27%	181,500,000	58%	199,650,000	29%	199,650,000			
Misi 5: Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya																	
Tujuan: Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak																	
Sasaran(5.1) : Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)																	
50204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)		1,396,408,000		1,396,062,000		1,535,668,200		1,689,235,020		1,858,158,522		2,043,974,374			BKD Keuangan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi pendanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah melalui rencana strategis perangkat daerah dan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahang
Tahun 2022 s/d Tahun 2026

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.00	BELANJA						
5.10	BELANJA OPERASI	500,664,516,111.00	550,400,560,003.70	553,518,254,468.69	542,193,029,197.12	536,426,668,266.70	533,524,475,123.15
5.1.01	Belanja Pegawai	293,785,166,413.00	297,415,187,376.52	302,755,503,857.85	299,572,225,068.11	298,182,663,397.41	297,403,866,009.52
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178,686,449,698.00	209,236,951,632.98	206,623,040,009.40	200,770,128,661.12	198,477,084,413.21	195,856,531,884.72
5.1.03	Belanja Bunga	3,000,000,000.00	5,312,984,895.00	5,312,984,895.00	5,312,984,895.00	5,312,984,895.00	5,312,984,895.00
5.1.05	Belanja Hibah	24,692,900,000.00	35,596,336,099.20	37,383,692,373.11	34,943,646,128.45	31,872,681,857.38	34,216,535,543.79
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	2,839,100,000.00	1,443,033,333.33	1,594,044,444.44	2,581,253,703.70	734,556,790.12
5.20	BELANJA MODAL	144,797,785,607.00	91,724,078,378.28	95,663,359,416.26	100,933,668,859.96	99,299,325,395.47	100,016,135,957.44
	Belanja Modal Tanah						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,717,067,007.00	39,700,176,777.76	39,818,784,638.80	39,350,239,422.27	37,663,970,614.31	38,042,707,475.42
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,694,403,000.00	38,147,565,910.06	38,826,345,116.72	39,446,772,751.53	37,244,728,989.62	37,532,997,111.80
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,386,315,600.00	13,876,335,690.45	17,018,229,660.74	22,136,656,686.16	24,390,625,791.54	24,440,431,370.21
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
5.30	BELANJA TIDAK	2,000,000,000.00	2,959,594,618.00	3,040,002,190.80	2,798,591,561.72	2,749,062,274.10	2,575,737,979.73



Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TERDUGA						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	2,959,594,618.00	3,040,002,190.80	2,798,591,561.72	2,749,062,274.10	2,575,737,979.73
5.40	BELANJA TRANSFER	135,336,508,440.00	149,294,469,986.20	145,867,253,154.20	144,750,453,265.58	142,787,268,977.79	142,579,206,393.01
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135,336,508,440.00	149,294,469,986.20	145,867,253,154.20	144,750,453,265.58	142,787,268,977.79	142,579,206,393.01
	Jumlah Belanja	782,798,810,158.00	794,378,702,986.18	798,088,869,229.95	790,675,742,884.38	781,262,324,914.07	778,695,555,453.33

7.2 Program Perangkat Daerah

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek setrategi, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak

langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepahiang berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian

sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi

Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun rumusan masalah pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program baik program pembangunan daerah dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dituangkan ke dalam tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Kepahiang

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	TOTAL PAGU ANGGARAN			372,059,117,867		676,084,604,209		788,796,526,903		821,188,203,761
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			274,930,377,110		510,737,618,948		595,937,798,207		630,009,264,024
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			171,687,224,328		190,436,971,613		212,082,982,674		233,799,403,222
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			170,705,603,328		189,011,710,613		210,563,608,674		232,207,994,542
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan administrasi keuangan dan operasional perkantoran Persentase Penyediaan Dokumen	95% 100%	96,708,937,043	96% 20%	96,663,937,043	97% 40%	106,330,330,747	98% 60%	116,963,363,822
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang PAUD persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang SD persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang SMP persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang Kesetaraan	50% 30.11% 55.17% 0.00%		20 25 60 28.57		40 40 70 43		60 60 75 57	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			21,621,000		446,061,000		520,590,000		572,649,000
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Festival yang diikuti	0	5,000,000	15	300,600,000	36	330,660,000	57	363,726,000
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase BMA yang dibina	0	5,260,000	20	80,300,000	40	88,330,000	60	97,163,000
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang telah terdaftar dan dilindungi	0	11,361,000	20	65,161,000	40	101,600,000	60	111,760,000
	SMP			810,000,000		826,200,000		842,724,000		859,578,480

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	TK PEMBINA			120,000,000		122,400,000		124,848,000		127,344,960
	UPTD SKB			30,000,000		30,600,000		31,212,000		31,836,240
	DINAS KESEHATAN			72,723,071,874		126,888,662,575		133,198,468,750		140,252,071,719
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			72,723,071,874		111,528,662,575		116,302,468,750		121,666,471,719
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan yang Berkualitas	100%	35,395,252,334	100%	38,395,875,000	100%	38,565,668,750	100%	38,797,437,219
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			36,541,978,765		72,616,000,000		76,246,800,000		81,202,842,000
		persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82%		84%		86%		88%	
		persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89%		90%		90%		91%	
		persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94%		94%		95%		95%	
		persentase kecamatan GERMAS	0%		12,5%		25%		25%	
		persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58%		59%		60%		62%	
		persentase UCI (universal childrent imunization)	92%		93%		94%		95%	
		kabupaten sehat	0%		0%		0%		0%	
		persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50%		80%		85%		90%	
		persentase puskesmas yg memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	50%		64%		71%		85%	
		persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan Vaksin	80%		92%		94%		96%	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		eksensial								
		persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	60%		75%		90%		100%	
		persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pemerintah	75%		76%		78%		80%	
		persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan scrining kesehatan sesuai standar	84%		80%		80%		80%	
		persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55%		80%		85%		90%	
		persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78%		78%		78%		78%	
		persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55%		83%		83%		83%	
		persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45%		96%		96%		96%	
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50%		0%		0%		0%	
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<0,5%		<0,5%		<0,5%		<0,5%	
		jumlah KLB yang ditanggulangi <24 jam	100%		100%		100%		100%	
		angka kesakitan akibat penyakit menular langsung	100%		100%		100%		100%	
		angka kesakitan akibat penyakit menular tukar Vektor dan ZOONOTIK	100%		100%		100%		100%	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100%		100%		100%		100%	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktik	55%	205,740,775	60%	29,894,800	60%	530,000,000	71%	458,482,500
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	45%	298,948,000	50%	205,740,775	50%	410,000,000	55%	592,672,500
		Persentase TPM dan IRTP yang memenuhi syarat	50%		55%		55%		60%	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan GERMAS	0%	281,152,000	13%	281,152,000	13%	550,000,000	25%	615,037,500
	PUSKEMAS SE KABUPATEN KEPAHIANG					15,300,000,000		16,830,000,000		18,513,000,000
	UPTD GUDANG FARMASI					30,000,000		33,000,000		36,300,000
	UPTD LABKESDA					30,000,000		33,000,000		36,300,000
	RSUD			23,535,278,600		33,987,105,430		48,549,492,453		49,083,974,378
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD)			23,535,278,600		33,987,105,430		48,549,492,453		49,083,974,378
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah	80%	20,782,827,000	80%	24,795,595,430	85%	27,162,864,453	90%	29,748,220,378
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan	75%	2,752,451,600	80%	9,191,510,000	85%	21,386,628,000	85%	19,335,754,000
	DINAS PEKERJAAN UMUM					142,662,418,766		183,084,043,766		186,208,104,141
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					142,662,418,766		183,084,043,766		186,208,104,141
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	0%	-	75%	8,093,318,766	75%	8,745,818,766	75%	9,359,318,766
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	0%	-	37%	14,603,600,000	41%	15,245,600,000	45%	15,864,700,000

KEPAHANG MOUNTAIN VALLEY

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah yang berakses air minum	0%	-	90%	13,115,500,000	92%	20,851,000,000	94%	9,729,260,375
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kecamatan yang terlayani sistem persampahan	0%	-	60%	1,700,000,000	65%	5,556,250,000	70%	7,262,812,500
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase wilayah padat yang terlayani oleh SPALD	0%	-	50%	6,500,000,000	60%	6,044,750,000	70%	6,578,512,500
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	0%	-	60%	1,800,000,000	65%	8,800,000,000	70%	6,020,000,000
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dinas atau OPD yang terlayani bangunan gedung daerah	0%	-	60%	2,100,000,000	65%	2,000,000,000	70%	8,400,000,000
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	0%	-	60%	42,600,000,000	65%	50,362,500,000	70%	52,900,625,000
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	0%	-	55%	42,600,000,000	60%	50,362,500,000	65%	52,900,625,000
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase terlaksananya Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0%	-	50%	635,000,000	55%	1,435,000,000	60%	1,505,000,000
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan penataan ruang	0%	-	60%	450,000,000	65%	2,050,000,000	70%	2,700,000,000
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase terpenuhinya pengembangan perumahan	0%	-	40%	-	45%	450,000,000	50%	450,000,000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh disatu wilayah kabupaten	0%	-	0%	6,000,000,000	0%	6,300,000,000	0%	6,615,000,000
1 04 04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana utilitas umum dalam kondisi baik	0%	-	50%	1,380,000,000	55%	1,845,625,000	60%	2,167,250,000
	SATPOL PP & DAMKAR			-		4,560,000,000		6,297,000,000		7,474,000,000
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			-		4,560,000,000		6,297,000,000		7,474,000,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota	0%		95%	514,265,000	95%	787,000,000	95%	1,124,000,000
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%		55%	2,775,615,000	55%	3,685,000,000	55%	4,295,000,000
1 05 04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	0%		65%	1,270,120,000	75%	1,825,000,000	85%	2,055,000,000
	BPBD			6,022,345,708	-	6,390,460,564	-	7,063,810,564	-	7,529,710,564
2 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6,022,345,708	-	6,390,460,564	-	7,063,810,564	-	7,529,710,564
2 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,233,959,208		3,320,460,564		3,443,810,564		3,559,710,564
2 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)	Peresentase keterpenuhan capaian penguatan kapasitas bencana	dokumen/ desa/sekolah	2,788,386,500	dokumen/ desa/sekolah	3,070,000,000	dokumen/ desa/sekolah	3,620,000,000	dokumen/ desa/sekolah	3,970,000,000
	DINAS SOSIAL			481,228,300	-	2,906,000,000	-	2,831,000,000	-	2,831,000,000
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			481,228,300	-	2,906,000,000	-	2,831,000,000	-	2,831,000,000
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	308,228,300	100%	700,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan , perlindungan dan jaminan sosial.	56%	83,800,000	67%	1,569,000,000	67%	1,569,000,000	67%	1,569,000,000
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang mendapat bantuan sosial.	36%	89,200,000	53%	294,000,000	53%	294,000,000	53%	294,000,000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase layanan dan pembagian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.	0%	-	67%	174,000,000	67%	174,000,000	67%	174,000,000
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan.	0%	-	60%	169,000,000	60%	94,000,000	62%	94,000,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25,299,388,768		37,143,616,500		57,367,541,374		48,147,845,001

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	DPPKBP3A			9,588,165,517		11,442,645,527		27,853,162,474		17,213,688,465
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3,326,251,517		4,392,645,527		4,918,162,474		5,054,188,465
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,173,008,717	100%	3,483,078,447		3,919,171,114		3,958,362,825
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan	0%	-	100%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181,500,000
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan	0%	-	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Jenis sosialisasi		79,797,000	8%	387,776,700	8%	425,756,400	8	466,736,100
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak mendapat pendampingan		73,445,800	100%	171,790,380	100%	188,234,960	100%	205,589,540
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6,261,914,000		7,050,000,000		22,935,000,000		12,159,500,000
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	0%	-	0%	300,000,000	0%	15,510,000,000	0%	3,993,000,000
		Persentase Unmed Need	0%	6,261,914,000	30%	6,600,000,000	27%	7,260,000,000	24%	7,985,000,000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Remaja Perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	28%	-	25%	150,000,000	25%	165,000,000	25%	181,500,000
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			6,419,765,400		7,928,295,900		9,823,125,490		11,269,938,039
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6,419,765,400		7,928,295,900		9,823,125,490		11,269,938,039
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	67%	5,473,870,400	68%	5,558,295,900	76%	6,233,125,490	84%	6,824,938,039
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup	20%	149,252,000	20%	150,000,000	60%	450,000,000	67%	500,000,000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	8%	50,000,000	47%	275,000,000	58%	345,000,000	92%	540,000,000
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen Pengelolaan KEHATI	22%	54,165,000	54%	230,000,000	60%	350,000,000	75%	550,000,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang mendapatkan rekomendasi izin Tempat penyimpanan Sementara Limbah B3	0%	-	54%	140,000,000	58%	230,000,000	75%	300,000,000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	24%	199,992,000	48%	390,000,000	77%	630,000,000	84%	690,000,000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah, organisasi dan/atau masyarakat yang berwawasan lingkungan	42%	50,000,000	58%	70,000,000	83%	100,000,000	92%	110,000,000
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	21%	41,667,000	60%	120,000,000	75%	150,000,000	80%	200,000,000
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sengketa lingkungan yang terselesaikan	0%	-	0%	-	71%	145,000,000	80%	165,000,000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah wilayah yang ditangani pengelolaan sampah	24%	400,819,000	60%	995,000,000	72%	1,190,000,000	84%	1,390,000,000
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			708,243,300		3,018,404,000		2,384,723,000		2,509,723,000
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			708,243,300		3,018,404,000		2,384,723,000		2,509,723,000
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.00	473,243,300	97%	1,527,734,000	97%	1,537,734,000	99%	1,557,734,000
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penduduk yang sudah merekam dan Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-	-	90%	235,650,000	71%	185,000,000	90%	235,000,000
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	-	-	95%	226,140,000	74%	176,140,000	95%	226,140,000
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat , Presentase data Kependudukan, Jumlah OPD yang memanfaatkan data	56.66	195,000,000	56%	882,190,000	91%	314,159,000	91%	314,159,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Data dalam Penyusunan Profil dan Agregat Kependudukan	19.51	40,000,000	72%	146,690,000	84%	171,690,000	86%	176,690,000
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			2,740,710,000		2,604,500,000		2,717,574,000		2,771,925,480
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2,740,710,000		2,604,500,000		2,717,574,000		2,771,925,480
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	100%	485,000,000	100%	529,500,000	100%	540,090,000	100%	550,891,800
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA									
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA									
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun		1,557,890,000		1,385,000,000		1,412,700,000		1,440,954,000
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Terbina.		667,820,000		665,000,000		739,284,000		754,069,680
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase sertifikat yang diterima transmigrasi		30,000,000		25,000,000		25,500,000		26,010,000
	DINAS PERHUBUNGAN			-		-		-		-
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-		-		-		-
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan keselamatan lalu lintas								
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			1,751,718,920		5,588,800,000		7,808,180,000		7,370,998,000
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1,702,898,920		5,043,800,000		7,363,180,000		6,956,498,000
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	99%	429,968,920	98%	893,800,000	98%	983,180,000	98%	1,081,498,000
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat pengelolaan informasi publik	30%	289,730,000	35%	1,250,000,000	45%	1,450,000,000	55%	1,595,000,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang telah melaksanakan SPBE	30%	983,200,000	35	2,900,000,000	43	4,930,000,000	50	4,280,000,000
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			48,820,000		295,000,000		195,000,000		214,500,000
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	30%	48,820,000	52%	295,000,000	52%	195,000,000	60%	214,500,000
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			-		250,000,000		250,000,000		200,000,000
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	0	-	32%	250,000,000	32%	250,000,000	32%	200,000,000
	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3,782,006,431	5	4,121,106,753		4,327,162,090		4,543,520,197
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			3,782,006,431	5	4,121,106,753		4,327,162,090		4,543,520,197
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100%	3,335,886,431.00	100%	3,502,680,753.00	100%	3,677,814,790.00	100%	3,861,705,531.00
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan deregulasi investasi	-	-	100%	150,000,000.00	100%	157,500,000.00	100%	165,375,001.00
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	jumlah tujuan promosi investasi	100%	59,998,000.00	100%	62,997,900.00	100%	66,147,795.00	100%	69,455,185.00
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	jumlah mediasi dalam pelayanan perizinan	100%	60,000,000.00	100%	63,000,000.00	100%	66,150,000.00	100%	69,457,500.00
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase usaha yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan	100%	326,122,000.00	100%	342,428,100.00	100%	359,549,505.00	100%	377,526,980.00
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			308,779,200		2,439,864,320		2,453,614,320		2,468,051,820
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			308,779,200		2,164,864,320		2,164,864,320		2,164,864,320
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indikator: persentase perlengkapan,jasa, sarana prasana kantor	50%	308,779,200	60%	497,400,000	70%	522,270,000	80%	548,383,500

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang terbina	50%	-	60%	528,000,000	70%	554,400,000	80%	582,120,000
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			-		275,000,000		288,750,000		303,187,500
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase pengelolaan arsip	50%	-	50%	200,000,000	60%	210,000,000	70%	220,500,000
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase perizinan pengguna kearsipan	10 perbub dan diklat	-	10 perbub dan diklat	75,000,000	12 perbub dan diklat	78,750,000	14 perbub dan diklat	82,687,500
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			25,313,178,731		63,332,177,911		65,925,626,143		67,379,850,027
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			1,728,716,300		1,912,857,760		2,567,355,800		2,774,521,380
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1,513,936,200		1,487,749,760		2,076,850,000		2,304,535,000
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah Kab	100%	-	10000%	617,150,900	10000%	715,998,000	10000%	787,597,800
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	produksi ikan budidaya air tawar	70384%	1,513,936,200	77422%	546,688,860	85164%	1,004,551,000	93680%	1,125,006,100
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1471%	0	2941%	323,910,000	4412%	356,301,000	5882%	391,931,100
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			214,780,100		425,108,000		490,505,800		469,986,380
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	34%	-	5134%	180,000,000	6846%	180,000,000	8557%	120,000,000
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan energi perkapita	100%		100%		100%		100%	
		Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100%	170,700,100	100%	179,250,000	100%	211,475,000	100%	245,372,500
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	25,480,000	100%	28,028,000	100%	30,830,800	100%	33,913,880
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	18,600,000	100%	37,830,000	100%	68,200,000	100%	70,700,000
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			21,961,215,511		32,967,835,921		33,137,835,921		29,317,835,921
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			20,706,538,421		29,297,835,921		29,337,835,921		24,907,835,921

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	119	4,142,932,821	157	4,247,835,921	157	4,237,835,921	157	4,257,835,921
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase objek wisata yang ditingkatkan	4	16,458,211,600	6	22,500,000,000	4	22,500,000,000	4	18,000,000,000
		persentase objek wisata yang ditingkatkan	62%		83%	950,000,000	108%	980,000,000	131%	1,020,000,000
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	prosentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	25	105,394,000	25	1,600,000,000	37.5	1,620,000,000	50	1,630,000,000
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1,254,677,090		3,670,000,000		3,800,000,000		4,410,000,000
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase Pemuda yang berkualitas	50	595,081,940	95	1,270,000,000	105	1,290,000,000	105	1,290,000,000
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pesentase SDM Olah Ragawan yang dibina	3	659,595,150	14	2,400,000,000	14	2,510,000,000	14	3,120,000,000
	DINAS PERTANIAN			-		22,432,903,830		23,554,549,022		28,265,458,826
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-		22,432,903,830		23,554,549,022		28,265,458,826
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10,296,988,830		10,811,838,272		12,974,205,926
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6,847,500,000		7,189,875,000		8,627,850,000
						1,142,500,000		1,199,625,000		1,439,550,000
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1,195,000,000		1,254,750,000		1,505,700,000
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					195,000,000		204,750,000		245,700,000
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1,900,000,000		1,995,000,000		2,394,000,000
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA									
01.0004	UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian	Jumlah tenaga penyuluhan			117 Orang	351,150,000	117 Orang	368,707,500	117 Orang	442,449,000
01.0003	UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas	Jumlah Pemeriksaan Hewan layak potong			2000 Ekor	95,900,000	2000 Ekor	100,695,000	2000 Ekor	120,834,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
01.0002	UPTD Balai Pembibitan Ternak	Jumlah Bibi yang dihasilkan			50 Ekor	152,165,000	50 Ekor	159,773,250	50 Ekor	191,727,900
01.0001	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah layanan kesehatan hewan			2.000 Layanan	115,300,000	2.000 Layanan	121,065,000	2.000 Layanan	145,278,000
01.0005	UPTD Balai Benih Hortikultura	Jumlah Benih Unggul Hortikultura			20.000 batang	141,400,000	20.000 batang	148,470,000	20.000 batang	178,164,000
	DINAS PERDAGANGAN, KOP & UKM			1,489,139,920		5,168,080,400		5,537,080,400		5,887,280,400
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1,390,429,420		2,462,000,000		2,831,000,000		3,181,200,000
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	90%	481,675,420	90%	592,000,000	90%	654,000,000	90%	751,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan	55%	315,528,000	70%	400,000,000	75%	500,000,000	80%	600,000,000
		Jumlah dokumen urusan perdagangan (nilai pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB, persentase pengguna produk dalam negeri dan pemasaran produk persentase sarana distribusi perdagangan dan inflasi pangan bergejolak)	0%		2 Dok		2 Dok			
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	koefisien kestabilan harga	0	42,488,500	0	500,000,000	0	605,000,000	0	650,000,000
		Cakupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis			
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor	0	-	50%	400,000,000	55%	445,000,000	60%	493,500,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standar dan perlindungan konsumen	18%	153,764,000	21%	270,000,000	25%	297,000,000	29%	326,700,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pemasaran produk dalam negeri	60%	396,973,500	65%	300,000,000	75%	330,000,000	80%	360,000,000
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			98,710,500		2,706,080,400		2,706,080,400		2,706,080,400
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	35%	47,341,000	40%		45%	150,000,000	50%	170,000,000
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pelatihan SDM Koperasi	0%	-	60%	100,000,000	65%	125,000,000	70%	150,000,000



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelatihan manajemen UKM	19%	51,369,500	25%	115,000,000	31%	145,000,000	38%	180,000,000
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM	-	-	60%	100,000,000	75%	125,000,000	80%	150,000,000
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			134,107,000		850,500,000		1,128,805,000		1,134,753,500
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			134,107,000		435,500,000		692,905,000		657,195,500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan kapasitas produksi industri	7%	134,107,000	8%	240,500,000		692,905,000		657,195,500
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase jenis izin usaha industri yang dikeluarkan pemerintah daerah	7%			195,000,000		-		-
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			-		415,000,000		435,900,000		477,558,000
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase dokumen rencana tenaga kerja			5,32%	145,000,000	0%	147,900,000	0%	150,858,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	20%		20%	90,000,000	20%	90,000,000	20%	108,900,000
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang ditempatkan	25%		25%	150,000,000	26%	165,000,000	27%	181,500,000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	peersentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	32%		32%	30,000,000	45%	33,000,000	45%	36,300,000
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN									
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			26,800,610,758		38,652,581,950		39,425,633,589		40,214,146,261
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			15,603,139,100		18,154,518,250		18,517,608,615		18,887,960,787
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaannya penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah	100%	11,541,997,800	100%	8,527,949,450	100%	8,698,508,439	100%	8,872,478,608

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksana dan terwujudnya tat kelola OPD yang mendukung meningkatkan administrasi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	98%	3,749,891,800	100%	6,527,611,800	100%	6,658,164,036	100%	6,791,327,317
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksana dan terwujudnya tata kelola OPD yang mendukung meningkatkan pembangunan dan perekonomian	100%	311,249,500	100%	1,390,132,000	100%	1,417,934,640	100%	1,446,293,333
4 01 04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		0	-	100%	1,708,825,000	100%	1,743,001,500	100%	1,777,861,530
4 02	SEKRETARIAT DPRD			11,197,471,658		20,498,063,700		20,908,024,974		21,326,185,473
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian pelaksanaan administrasi dan penunjang urusan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahang	100%	8,745,652,658	100%	5,718,220,420	100%	5,832,584,828	100%	5,949,236,525
4 02 03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyediaan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	2,451,819,000	100%	14,779,843,280	100%	15,075,440,146	100%	15,376,948,949
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			17,237,214,760		18,345,316,900		21,984,048,590		27,006,773,449
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6,883,471,860		6,150,000,000		6,250,000,000		6,450,000,000
5 01	PERENCANAAN			6,883,471,860		6,150,000,000		6,250,000,000		6,450,000,000
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan pada BAPPEDA	100%	2,553,830,860.00	100%	2,976,000,000	100%	2,979,000,000	100%	2,980,000,000
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	100%	1,212,775,000.00	100%	875,000,000	100%	875,000,000	100%	1,000,000,000
		Persentase prioritas kecamatan yang diakomodir dalam RKPD			100%	647,000,000	100%	670,000,000	100%	705,000,000
		Tingkat ketercapaian target kinerja	100%	229,000,000.00	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		pembangunan tahun berjaan								
		Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	100%	1,212,775,000.00	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi program RKPD terhadap RPJMD	100%	643,711,000.00	100%	80,000,000		85,000,000		90,000,000
		Persentase Sinkronisasi program kegiatan bidang pemerintahan dengan RKPD dan RPJMD	100%	81,314,000.00	100%	50,000,000		55,000,000		60,000,000
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia dengan RKPD dan RPJMD	100%	47,250,000.00	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dengan RKPD dan RPJMD	100%	149,808,000.00	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	105,000,000
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rancangan pembangunan tingkat provinsi dan nasional	100%	94,127,000.00	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah Bidang SDA	100%	45,980,000.00	100%	90,000,000	100%	96,000,000	100%	100,000,000
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang infrastruktur	100%	89,099,000.00	100%	65,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah bidang infrastruktur	100%	46,046,000.00	100%	82,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang Kewilayahan	100%	82,156,000.00	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	65,000,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024			
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah bidang kewilayahan	100%	46,190,000.00	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000		
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia dengan RKPD dan RPJMD	100%	199,710,000.00	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan pedoman penelitian dan pengembangan	100%	149,700,000.00	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000		
	BADAN KEUANGAN DAERAH			10,353,742,900		8,195,316,900		9,014,848,590		9,916,333,449		
5 02	KEUANGAN			10,353,742,900		8,195,316,900		9,014,848,590		9,916,333,449		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,000,000,000		3,300,000,000	-	3,630,000,000		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen laporan keuangan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu		7,811,301,900		2,653,221,900		2,918,544,090		3,210,398,499		
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian raperda/raperbup APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksana APBD yang disusun										
		Persentase dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun										
		Persentase tingkat akueasi data barang milik daerah										
		Persentase pencapaian penyerapan belanja OPD dan PPKD										
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,146,033,000		1,146,033,000		1,260,636,300		1,386,699,930		
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)		1,396,408,000		1,396,062,000		1,535,668,200		1,689,235,020		



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			-		4,000,000,000		6,719,200,000		10,640,440,000
5 03	KEPEGAWAIAN			-		2,184,200,000		4,909,200,000		5,639,800,000
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ASN dengan nilai SKP berkategori baik			90%	105,000,000	95%	635,000,000	97%	720,000,000
		Persentase dokumen perencanaan diselesaikan dengan tepat waktu			100%	1,399,200,000	100%	1,609,200,000	100%	1,814,800,000
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penataan ASN berdasarkan kuaifikasi pendidikan			99%	610,000,000	99%	2,505,000,000	100%	2,920,000,000
		Persentase pembinaan dan disipin ASN			60%	70,000,000	65%	160,000,000	70%	185,000,000
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1,815,800,000		1,810,000,000		5,000,640,000
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi aparatur			27%	1,815,800,000	31%	1,810,000,000	35%	5,000,640,000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			2,013,650,740		4,000,000,000		4,080,000,000		4,161,600,000
	INSPEKTORAT			2,013,650,740		4,000,000,000		4,080,000,000		4,161,600,000
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi PD	99%	851,274,740	99%	300,000,000	99%	306,000,000	99%	312,120,000
			99%		99%	804,211,000	99%	820,295,220	99%	836,701,124
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	80%	657,916,000	80%	804,350,000	85%	820,437,000	90%	836,845,740
		Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	80%		80%	1,132,800,000	83%	1,155,456,000	85%	1,178,565,120
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP	65%	504,460,000	68%	958,639,000	70%	977,811,780	71%	997,368,016
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7 01	KECAMATAN ADMINISTRASI *****)									
7 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN *****) KELURAHAN									
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			464,697,000		3,873,292,000		4,075,879,000		4,268,725,000

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL 2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT			464,697,000		3,873,292,000		4,075,879,000		4,268,725,000
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	77%	464,697,000	100%	856,636,000	100	972,300,000	100	1,069,530,000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0%	0	80%	511,448,000	81	511,448,000	83	511,448,000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	0%	0	80%	401,928,000	81	442,120,000	83	486,332,000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0%	0	80%	1,635,970,000	81	1,635,970,000	83	1,635,970,000
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	0%	0	85%	467,310,000	85.5	514,041,000	86.5	565,445,000

KEPAHANG MOUNTAIN VALLEY

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	TOTAL PAGU ANGGARAN			897,603,936,350		937,093,911,574		2,279,502,254,308	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			667,918,272,101		711,157,276,816		1,822,993,615,577	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			257,260,036,520		282,995,274,694		1,176,574,668,723	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			255,590,987,746		281,242,451,833		1,168,616,753,408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan administrasi keuangan dan operasional perkantoran	99%	128,659,700,204	99%	141,525,670,225	489%	590,143,002,041	
		Persentase Penyediaan Dokumen	80%		100%		100%		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang PAUD	80	126,931,287,542	100	139,716,781,608	100	578,473,751,367	
		persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang SD	80		100		100		
		persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang SMP	80		85		85		
		persentase pemerataan mutu pendidikan jenjang Kesetaraan	71		86		86		
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			629,913,900		692,905,290		2,862,119,190	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Festival yang diikuti	78	400,098,600	99	440,108,460	99	1,835,193,060	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase BMA yang dibina	80	106,879,300	100	117,567,230	100	490,239,530	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang telah terdaftar dan dilindungi	80	122,936,000	100	135,229,600	100	536,686,600	
	SMP			876,770,050		894,305,451		4,299,577,980	SMP Se Kabupaten Kepahiang
	TK PEMBINA			129,891,859		132,489,696		636,974,516	TK PEMBINA Se Kabupaten Kepahiang
	UPTD SKB			32,472,965		33,122,424		159,243,629	UPTD SKB
	DINAS KESEHATAN			146,443,955,305		154,858,356,976		154,998,057,245	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			125,999,795,305		132,369,780,976		132,509,481,245	Dinas Kesehatan



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan yang Berkualitas	100%	38,987,309,080	100%	39,266,420,715	100%	39,266,420,715	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			85,262,984,100		91,231,392,987		91,371,093,256	
		persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90%		92%		92%		
		persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91%		92%		92%		
		persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95%		95%		95%		
		persentase kecamatan GERMAS	38%		0%		100%		
		persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63%		64%		64%		
		persentase UCI (universal childrent imunization)	96%		96%		96%		
		kabupaten sehat	0%		1%		1%		
		persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95%		95%		95%		
		persentase puskesmas yg memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	92%		100%		100%		
		persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan Vaksin esensial	98%		100%		100%		
		persentase pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	100%		100%		100%		
		persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pemerintah	90%		100%		100%		



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan scrining kesehatan sesuai standar	80%		80%		80%		
		persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95%		95%		95%		
		persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78%		78%		78%		
		persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83%		83%		83%		
		persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96%		96%		96%		
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	0%		0%		0%		
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<0.5%		<0.5%		<0.5%		
		jumlah KLB yang ditanggulangi <24 jam	100%		100%		100%		
		angka kesakitan akibat penyakit menular langsung	100%		100%		100%		
		angka kesakitan akibat penyakit menular tukar Vektor dan ZOONOTIK	100%		100%		100%		
		persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100%		100%		100%		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Izin Praktik	77%	481,406,625	82%	515,105,089	82%	665,867,554	

KEPAHIANG MOUNTAIN VALLEY

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	65%	622,306,125	70%	665,867,554	70%	515,105,089	
		Persentase TPM dan IRTP yang memenuhi syarat	70%		75%		75%		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kecamatan GERMAS	37%	645,789,375	0%	690,994,631	100%	690,994,631	
	PUSKEMAS SE KABUPATEN KEPAHANG			20,364,300,000		22,400,730,000		22,400,730,000	Puskesmas Se Kabupaten Kepahang
	UPTD GUDANG FARMASI			39,930,000		43,923,000		43,923,000	UPTD Gudang Farmasi
	UPTD LABKESDA			39,930,000		43,923,000		43,923,000	UPTD LABKESDA
	RSUD			43,193,509,696		44,121,572,566		242,510,933,123	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (RSUD)			43,193,509,696		44,121,572,566		242,510,933,123	RSUD
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (RSUD)	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah	90%	32,590,351,896	95%	35,716,996,566	100%	170,796,855,723	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	Persentase pemenuhan upaya kesehatan	90%	10,603,157,800	90%	8,404,576,000	100%	71,714,077,400	
	DINAS PEKERJAAN UMUM			198,830,160,016		205,332,062,016		205,332,062,016	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			198,830,160,016		205,332,062,016		205,332,062,016	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	75%	9,972,818,766	75%	10,611,818,766	100%	10,611,818,766	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	48%	16,562,255,000	52%	17,239,687,000	100%	17,239,687,000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah yang berakses air minum	96%	15,853,220,000	98%	12,326,003,000	100%	12,326,003,000	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kecamatan yang terlayani sistem persampahan	75%	9,440,952,500	80%	11,930,247,000	100%	11,930,247,000	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase wilayah padat yang terlayani oleh SPALD	80%	6,704,853,750	90%	6,912,467,750	100%	6,912,467,750	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam keadaan baik dan berfungsi baik	75%	6,251,000,000		6,493,550,000	100%	6,493,550,000	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dinas atau OPD yang terlayani bangunan gedung daerah	75%	4,000,000,000	80%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	75%	55,343,155,000	80%	58,495,313,000	100%	58,495,313,000	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten diselenggarakan	70%	55,343,155,000	75%	58,495,313,000	100%	58,495,313,000	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase terlaksananya Program Pengembangan Jasa Konstruksi	65%	1,920,000,000	70%	1,970,000,000	100%	1,970,000,000	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggaranya program penyelenggaraan penataan ruang	75%	3,100,000,000	80%	3,450,000,000	100%	3,450,000,000	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase terpenuhinya pengembangan perumahan	55%	450,000,000	60%	450,000,000	100%	450,000,000	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh disatu wilayah kabupaten	0%	6,945,750,000	0%	7,293,037,500	100%	7,293,037,500	
1 04 04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana utilitas umum dalam kondisi baik	65%	2,373,000,000	70%	2,694,625,000	100%	2,694,625,000	
	SATPOL PP & DAMKAR			8,487,000,000		9,132,000,000			
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8,487,000,000		9,132,000,000		35,950,000,000	Satpol PP Damkar
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan daerah kab/kota	95%	927,000,000	95%	1,202,000,000	95%	4,554,265,000	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentruman dan Ketertiban Umum	55%	5,025,000,000	55%	5,160,000,000	55%	20,940,615,000	

KEPAHANG MOUNTAIN VALLEY

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1 05 04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	95%	2,535,000,000	95%	2,770,000,000	95%	10,455,120,000	
	BPBD		-	7,981,610,564	-	8,590,010,564	-	37,449,894,470	
2 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		-	7,981,610,564	-	8,590,010,564	-	37,449,894,470	BPBD
2 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,666,610,564		3,800,010,564		17,790,602,820	
2 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD)	Persentase keterpenuhan capaian penguatan kapasitas bencana	dokumen/ desa/sekolah	4,315,000,000	dokumen/ desa/sekolah	4,790,000,000		19,659,291,650	
	DINAS SOSIAL		-	2,861,000,000	-	3,064,000,000	-	3,064,000,000	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			2,861,000,000		3,064,000,000		3,064,000,000	Dinas Sosial
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	700,000,000	100%	700,000,000	100%	700,000,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan , perlindungan dan jaminan sosial.	70%	1,599,000,000	75%	1,698,000,000	75%	1,698,000,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin yang mendapat bantuan sosial.	53%	294,000,000	55%	372,000,000	55%	372,000,000	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase layanan dan pembagian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.	67%	174,000,000	70%	190,000,000	70%	190,000,000	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan.	63%	94,000,000	65%	104,000,000	65%	104,000,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			49,751,339,513		89,719,948,258		139,545,511,018	
	DPPKBP3A			18,531,815,456		56,323,064,547		107,169,076,469	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5,098,365,456		41,615,269,547		61,078,631,469	DPPKBP3A
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi		3,997,554,536		40,367,456,247	100%	55,725,623,169	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	KABUPATEN/KOTA	Perkantoran							
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan	100%	199,650,000	100%	291,615,000	100%	987,765,000	
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan	100%	266,200,000	100%	292,820,000	100%	1,221,020,000	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Jenis sosialisasi	8	411,015,800	8	419,976,500	100%	2,111,261,500	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak mendapat pendampingan	100%	223,945,120	100%	243,401,800	100%	1,032,961,800	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13,433,450,000		14,707,795,000		46,090,445,000	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Ratio Akseptor KB	0%	4,392,300,000	0%	4,831,530,000	0%	4,831,530,000	
		Persentase Unmed Need	30%	8,841,500,000	20%	9,656,650,000	100%	40,343,150,000	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Remaja Perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	23%	199,650,000	23%	219,615,000	23%	915,765,000	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			11,334,431,843		12,587,375,027		13,167,375,027	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11,334,431,843		12,587,375,027		13,167,375,027	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	91%	7,444,431,843	100%	8,172,375,027	100%	8,172,375,027	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelaksanaan perencanaan lingkungan hidup	0%	-	33%	250,000,000	100%	750,000,000	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	96%	565,000,000	100%	590,000,000	100%	590,000,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen Pengelolaan KEHATI	80%	350,000,000	90%	250,000,000	90%	250,000,000	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan/Usaha yang mendapatkan rekomendasi izin Tempat penyimpanan Sementara Limbah B3	88%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	91%	750,000,000	100%	820,000,000	100%	820,000,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah, organisasi dan/atau masyarakat yang berwawasan lingkungan	95%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	95%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sengketa lingkungan yang terselesaikan	90%	185,000,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah wilayah yang yang ditangani pengelolaan sampah	83%	1,370,000,000	95%	1,580,000,000	95%	1,660,000,000	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			2,423,723,000		2,625,833,000		2,625,833,000	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2,423,723,000		2,625,833,000		2,625,833,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran	99%	1,566,734,000	99%	1,577,734,000	100%	1,577,734,000	
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penduduk yang sudah merekam dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	71%	185,000,000	100%	260,500,000	100%	260,500,000	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	95%	176,140,000	100%	238,440,000	100%	238,440,000	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat , Persentase data Kependudukan, Jumlah OPD yang memanfaatkan data	91%	314,159,000	100%	344,159,000	100%	344,159,000	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Data dalam Penyusunan Profil dan Agregat Kependudukan	97%	181,690,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			2,827,364,015		2,883,911,264		2,883,911,264	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2,827,364,015		2,883,911,264		2,883,911,264	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	100%	561,909,636	100%	573,147,828	100%	573,147,828	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA								
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi masyarakat dalam membangun		1,469,773,106		1,499,168,539		1,499,168,539	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Terbina.		769,151,073		784,534,093		784,534,093	
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase sertifikat yang diterima transmigrasi		26,530,200		27,060,804		27,060,804	
	DINAS PERHUBUNGAN			-		-		-	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-		-		-	Dinas Perhubungan
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan keselamatan lalu lintas							
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			7,380,097,800		7,748,107,580		7,998,107,580	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			6,944,147,800		7,288,562,580		7,288,562,580	Dinas Kominfo
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	98%	1,189,647,800	98%	1,308,612,580	98%	1,308,612,580	
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat pengelolaan informasi publik	55%	1,754,500,000	60%	1,929,950,000	60%	1,929,950,000	
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang telah melaksanakan SPBE	58	4,000,000,000	60	4,050,000,000	60	4,050,000,000	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			235,950,000		259,545,000		259,545,000	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	60%	235,950,000	60%	259,545,000	60%	259,545,000	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			200,000,000		200,000,000		450,000,000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal atau akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis	32%	200,000,000	32%	200,000,000	32%	450,000,000	
	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4,770,696,204		5,009,231,015		5,316,803,826	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4,770,696,204		5,009,231,015		5,316,803,826	DPMPSTP
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100%	4,054,790,806.00	100%	4,257,530,347.00	100%	4,527,518,125.00	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan deregulasi investasi	100%	173,643,750.00	100%	182,325,937.00	100%	191,442,234.00	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	jumlah tujuan promosi investasi	100%	72,927,944.00	100%	76,574,341.00	100%	80,403,058.00	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	jumlah mediasi dalam pelayanan perizinan	100%	72,930,375.00	100%	76,576,894.00	100%	80,405,738.00	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase usaha yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan	100%	396,403,329.00	100%	416,223,496.00	100%	437,034,671.00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			2,483,211,195		2,542,425,825		384,403,852	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2,164,864,320		2,208,161,606			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indikator: persentase perlengkapan,jasa, sarana prasana kantor	90%	575,802,675	100%	604,592,809	100%	695,281,730	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang terbina	90%	611,226,000	100%	641,787,300	100%	738,055,395	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		0%	-	0%	-	0%	-	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			318,346,875		334,264,219		384,403,852	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase pengelolaan arsip	80%	231,525,000	90%	243,101,250	100%	279,566,438	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		0%	-	0%	-	0%	-	
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase perizinan pengguna kearsipan	16 perbub dan diklat	86,821,875	18perbub dan diklat	91,162,969	18perbub dan diklat	104,837,414	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			53,862,240,757		54,530,797,617		146,295,343,401	
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			3,069,003,518		3,484,383,911		4,334,313,911	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2,558,988,500		2,931,887,391		2,931,887,391	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintah daerah Kab	10000%	866,357,580	10000%	952,993,338	10000%	952,993,338	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	produksi ikan budidaya air tawar	103048%	1,261,506,710	113350%	1,504,657,381	113350%	1,504,657,381	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	7353%	431,124,210	8824%	474,236,672	8824%	474,236,672	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			510,015,018		552,496,520		1,402,426,520	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	9413%	120,000,000	9927%	120,000,000	9927%	720,000,000	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan energi perkapita	100%	279,509,750	100%	315,460,725	10000%	315,460,725	
		Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100%		100%				
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	37,305,268	100%	41,035,795	10000%	41,035,795	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	100%	73,200,000	100%	76,000,000	100%	325,930,000	
	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA			14,437,835,921		14,497,835,921		96,137,835,921	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			9,987,835,921		10,037,835,921		91,677,835,921	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	157	4,297,835,921	157	4,337,835,921	157	4,337,835,921	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase objek wisata yang ditingkatkan	3	3,000,000,000	3	3,000,000,000	10	82,500,000,000	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		persentase objek wisata yang ditingkatkan	134%	1,040,000,000	138%	1,050,000,000	170%	3,190,000,000	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	prosentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	62.5	1,650,000,000	75	1,650,000,000	75	1,650,000,000	
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4,450,000,000		4,460,000,000		4,460,000,000	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase Pemuda yang berkualitas	120	1,310,000,000	120	1,310,000,000	120	1,310,000,000	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pesentase SDM Olah Ragawan yang dibina	14	3,140,000,000	14	3,150,000,000	14	3,150,000,000	
	DINAS PERTANIAN			28,689,440,708		28,718,130,149		28,718,130,149	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			28,689,440,708		28,718,130,149		28,718,130,149	Dinas Pertanian
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,168,819,015		13,181,987,834		13,181,987,834	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			8,757,267,750		8,766,025,018		8,766,025,018	
				1,461,143,250		1,462,604,393		1,462,604,393	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1,528,285,500		1,529,813,786		1,529,813,786	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			249,385,500		249,634,886		249,634,886	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2,429,910,000		2,432,339,910		2,432,339,910	
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
01.0004	UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian	Jumlah tenaga penyuluhan	117 Orang	449,085,735	117 Orang	449,534,821	117 Orang	449,534,821	
01.0003	UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas	Jumlah Pemeriksaan Hewan layak potong	2000 Ekor	122,646,510	2000 Ekor	122,769,157	2000 Ekor	122,769,157	
01.0002	UPTD Balai Pembibitan Ternak	Jumlah Bibi yang dihasilkan	50 Ekor	194,603,819	50 Ekor	194,798,422	50 Ekor	194,798,422	
01.0001	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah layanan kesehatan hewan	2.000 Layanan	147,457,170	2.000 Layanan	147,604,627	2.000 Layanan	147,604,627	
01.0005	UPTD Balai Benih Hortikultura	Jumlah Benih Unggul Hortikultura	20.000 batang	180,836,460	20.000 batang	181,017,296	20.000 batang	181,017,296	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	DINAS PERDAGANGAN, KOP & UKM			6,324,300,400		6,697,944,008		17,105,063,420	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3,618,220,000		3,937,742,000		12,898,388,000	Dinas Perdagangan Koperasi UKM
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	90%	828,000,000	95%	900,000,000		3,000,000,000	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Jumlah dokumen urusan perdagangan (nilai pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB, persentase pengguna produk dalam negeri dan pemasaran produk persentase sarana distribusi perdagangan dan inflasi pangan bergejolak)	85% 2 Dok	700,000,000	90% 2 Dok	800,000,000	0	3,382,488,500	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	koefisien kestabilan harga Cakupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	0 10 Jenis	785,000,000	0 10 Jenis	800,000,000	10 Jenis	2,486,785,000	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor	65%	545,850,000	70%	602,435,000		1,802,141,000	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standar dan perlindungan konsumen	33%	359,370,000	38%	395,307,000		2,226,973,500	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pemasaran produk dalam negeri	85%	400,000,000	90%	440,000,000			
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2,706,080,400		2,760,202,008		4,206,675,420	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	55%	190,000,000	60%	210,000,000		897,341,000	
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pelatihan SDM Koperasi	75%	175,000,000	80%	200,000,000		750,000,000	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelatihan manajemen UKM	43%	215,000,000	54%	250,000,000		956,369,500	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM	85%	175,000,000	90%	200,000,000		750,000,000	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			1,341,660,210		1,132,503,628			

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			828,415,050		594,208,965			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan kapasitas produksi industri		668,915,050		594,208,965			
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase jenis izin usaha industri yang dikeluarkan pemerintah daerah		159,500,000		-			
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			513,245,160		538,294,663		-	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase dokumen rencana tenaga kerja	0%	153,875,160		156,952,663			
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	20%	119,790,000	20%	131,769,000			
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang ditempatkan	58%	199,650,000	29%	199,650,000			
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	45%	39,930,000	46%	49,923,000			
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			41,018,429,186		41,838,797,770		126,323,781,100	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			19,265,720,003		19,651,034,403		19,651,034,403	Sekretariat Daerah
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaannya penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah	100%	9,049,928,180	100%	9,230,926,744	100%	9,230,926,744	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksana dan terwujudnya tat kelola OPD yang mendukung meningkatkan administrasi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	6,927,153,863	100%	7,065,696,940	100%	7,065,696,940	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
RPJMD KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021 - 2026

KEPAHANG MOUNTAIN VALLEY



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksana dan terwujudnya tata kelola OPD yang mendukung peningkatan pembangunan dan perekonomian	100%	1,475,219,199	100%	1,504,723,583	100%	1,504,723,583	
4 01 04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		100%	1,813,418,761	100%	1,849,687,136	100%	1,849,687,136	
4 02	SEKRETARIAT DPRD			21,752,709,183		22,187,763,367		106,672,746,697	Sekretariat DPRD
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyelesaian pelaksanaan administrasi dan penunjang urusan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahang	100%	6,068,221,255	100%	6,189,585,681	100%	29,757,848,709	
4 02 03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase penyediaan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	15,684,487,927	100%	15,998,177,686	100%	76,914,897,988	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			76,327,966,794		30,803,163,473		18,814,400,000	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6,664,000,000		6,500,000,000		6,500,000,000	
5 01	PERENCANAAN			6,664,000,000		6,500,000,000		6,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan penunjang urusan pemerintahan pada BAPPEDA	100%	2,984,000,000	100%	2,984,000,000	100%	2,984,000,000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	100%	1,140,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000	
		Persentase prioritas kecamatan yang diakomodir dalam RKPd	100%	710,000,000	100%	726,000,000	100%	726,000,000	
		Tingkat ketercapaian target kinerja pembangunan tahun berjalan	100%	230,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	
		Tingkat keselarasan sasaran prioritas daerah tahun n+1 terhadap sasaran RPJMD	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Tingkat konsistensi program RKPd terhadap		95,000,000		100,000,000	100%	100,000,000	





NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	PEMBANGUNAN DAERAH	RPJMD							
		Persentase Sinkronisasi program kegiatan bidang pemerintahan dengan RKPD dan RPJMD		65,000,000		75,000,000	100%	75,000,000	
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia dengan RKPD dan RPJMD	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang perekonomian dengan RKPD dan RPJMD	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	115,000,000	
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencanan pembangunan tingkat provinsi dan nasional	100%	80,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah Bidang SDA	100%	110,000,000	100%	105,000,000	100%	105,000,000	
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang infrastruktur	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah bidang infrastruktur	100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	
		Persentase sinergitas rencana pembangunan tingkat kabupaten terhadap rencana pembangunan tingkat provinsi dan nasional bidang Kewilayahan	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	
		Persentase tercapainya rencana kerja daerah bidang kewilayahan	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
		Persentase sinkronisasi program kegiatan bidang pembangunan manusia dengan RKPD dan RPJMD	100%	160,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase ketersediaan pedoman penelitian dan pengembangan	100%	160,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000		
	BADAN KEUANGAN DAERAH			10,907,966,794		11,998,763,473		-		
5 02	KEUANGAN			10,907,966,794		11,998,763,473		-	BKD Keuangan	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	3,993,000,000	-	4,392,300,000				
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen laporan keuangan daerah yang disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu		3,531,438,349		3,884,582,184				
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian raperda/raperbup APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksana APBD yang disusun								
		Persentase dokumen pedoman pengelolaan keuangan daerah yang disusun								
		Persentase tingkat akueasi data barang milik daerah								
		Persentase pencapaian penyerapan belanja OPD dan PPKD								
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,525,369,923		1,677,906,915				
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)		1,858,158,522		2,043,974,374				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			58,756,000,000		12,304,400,000		12,314,400,000		
5 03	KEPEGAWAIAN			6,140,400,000		6,586,000,000		6,596,000,000	BKD PSDM	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ASN dengan nilai SKP berkatagori baik	98%	815,000,000	99%	910,000,000	99%	910,000,000		
		Persentase dokumen perencanaan	100%	2,020,400,000	100%	2,246,000,000	100%	2,256,000,000		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		diselesaikan dengan tepat waktu							
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penataan ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan	100%	3,095,000,000	100%	3,280,000,000	100%	3,280,000,000	
		Persentase pembinaan dan disipin ASN	75%	210,000,000	80%	150,000,000	100%	150,000,000	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			52,615,600,000		5,718,400,000		5,718,400,000	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pengembangan kompetensi aparatur	40%	52,615,600,000	44%	5,718,400,000	44%	5,718,400,000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			4,244,832,000		4,329,728,640		4,416,323,213	
	INSPEKTORAT			4,244,832,000		4,329,728,640		4,416,323,213	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi PD	100%	318,362,400	100%	324,729,648	100%	331,224,241	INSPEKTORAT
			100%	853,435,147	100%	870,503,850	100%	887,913,927	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	95%	853,582,655	100%	870,654,308	100%	888,067,394	
		Persentase temuan audit yang bersifat material nihil	87%	1,202,136,422	90%	1,226,179,151	90%	1,250,702,734	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP	73%	1,017,315,376	75%	1,037,661,683	75%	1,058,414,917	
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN ADMINISTRASI *****)								KECAMATAN DAN KELURAHAN
7 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN *****)								
	KELURAHAN								
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			4,480,856,000		4,714,199,000		21,113,280,000	
	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4,480,856,000		4,714,199,000		21,113,280,000	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	1,176,483,000	100	1,294,131,000	100	5,069,406,000	KESBANGPOLINMAS
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	84	511,448,000	85	511,448,000	85	2,557,240,000	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Kebangsaan							
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	84	534,966,000	85	588,462,000	85	2,453,810,000	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	84	1,635,970,000	85	1,635,970,000	85	8,179,850,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	87	621,989,000	87.5	684,188,000	87.5	2,852,974,000	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti : Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten. Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada Tabel 8.1 Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai saat ini, dan memperhatikan peluang dengan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan.

TABEL 8.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KEPAHANG

No	Indikator	Target Tahun Ke					Keterangan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.36	69.92	70.47	71.02	71.57	Misi I
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	C	C	B	B	B	Misi II
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	C	B	B	A	A	Misi III
4	Indeks Resiko Bencana	138	127.7	115.43	102.6	90.26	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51.36	51.66	51.87	52.18	52.43	
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1,3	1.95	2.58	3.21	3.89	Misi IV
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.43	2.31	2.19	2.07	1.95	
8	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 -8 %	5 -8 %	5 -8 %	5 -8 %	5 -8 %	Misi V

Tabel 8.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPAHANG

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	0.06	0.7	1.3	1.95	2.58	3.21	3.89	3.89
2	Pengeluaran perkapita	9,273,000	9,412,460	9,536,080	9,654,200	9,782,320	9,905,440	10,028,560	10,028,560
3	IPM	68.17	68.82	69.36	69.92	70.47	71.02	71.57	71.57
4	Persentase Kemiskinan (%)	14,69	14.54	14.37	14.2	14.03	13.86	13.69	13.69
5	Tingkat Pengangguran (%)	2.52	2.55	2.43	2.31	2.19	2.07	1.95	1.95
6	Angka Harapan Hidup	67,95	67.88	68.02	68.17	68.31	68.45	68.6	68.6

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
7	Angka partisipasi murni (APK)PAUD (%)	44,20	65,84	67,50	71,56	74,6	77,65	80,25	80,25
8	Angka partisipasi murni (APM) SD (%)	96,51	98,55	98,65	98,82	99,02	99,25	99,45	99,45
9	Angka partisipasi murni (APM) SLTP (%)	75,19	80,05	82,10	84,15	86,20	88,25	90,30	90,30
10	Persentase balita gizi buruk/gizi kurang (%)	<10%	<10%	<10% / <11%	<9% / <10,5%	<8,5% / <10%	<8,2% / <9,5%	<8% / <9,3%	<8% / <9,3%
11	AKB/1.000 (Jiwa)	11	<13	<13	<13	<13	<13	<13	<13
12	AKI/100.000 (Jiwa)	81	<162	<162	<162	<162	<162	<162	<162
13	Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk (Jiwa)	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
14	Jumlah kasus DBD kurang dari 49/100.000 penduduk (kasus)	108,6	4,24	35,00	34,00	33,00	32,00	31,00	31,00
15	Persentase partisipasi pejabat dan ASN dalam pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	-	-	80	81	83	84	85	85
16	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial, persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional	-	-	90	90	90	90	90	90

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
17	Persentase peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-	-	80	81	83	84	85	85
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
18	Persentase Perpustakaan Sekolah SMU Yang Dibina (%)	17	17	19	21	23	25	27	27
19	Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	51,97%	83,27%	85%	88%	92%	96%	100%	100%
20	Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	37,45%	39,96%	43,90%	48,43%	53,46%	58,45%	64,37%	64,37%
21	Persentase SD yang	96%	96%	96,5%	97%	97,5%	98,5%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	ter-akreditasi (%)								
22	Persentase SLTP yang ter-akreditasi (%)	89,6%	97%	97,5%	98%	98,5%	99%	100%	100%
23	Standar Kompetensi Lulusan (SD) (indeks)	5,05	5,09	5,15	5,23	5,27	5,33	5,52	5,52
24	Standar Isi (SD) (indeks)	4,77	4,88	4,92	4,98	5,03	5,08	5,29	5,29
25	Standar Proses (SD) (indeks)	4,4	4,9	5,1	5,3	5,5	5,9	6,13	6,13
26	Standar Penilaian Pendidikan (SD) (indeks)	5,59	5,7	5,73	5,79	5,83	5,90	6,14	6,14
27	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SD) (indeks)	5,36	5,41	5,46	5,52	5,57	5,59	5,78	5,78
28	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (SD) (indeks)	4,19	4,5	4,9	5,3	5,7	5,9	6,17	6,17
29	Standar Pengelolaan Pendidikan (SD) (indeks)	4,85	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,91	5,91

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
30	Standar Pembiayaan (SD) (indeks)	5,13	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,16	6,16
31	Standar Kompetensi Lulusan (SMP) (indeks)	5,02	5,10	5,14	5,18	5,24	5,30	5,36	5,36
32	Standar Isi (SMP) (indeks)	4,9	4,90	4,93	4,98	5,03	5,07	5,18	5,18
33	Standar Proses (SMP) (indeks)	4,79	4,9	5,2	5,5	5,6	5,9	6,1	6,1
34	Standar Penilaian Pendidikan (SMP) (indeks)	5,48	5,7	5,75	5,79	5,86	5,90	5,98	5,98
35	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SMP) (indeks)	5,82	5,41	5,46	5,55	5,58	5,59	5,68	5,68
36	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP) (indeks)	4,64	4,5	4,9	5,3	5,5	5,7	5,8	5,8
37	Standar Pengelolaan Pendidikan (SMP) (indeks)	4,96	4,8	5,1	5,3	5,4	5,5	5,7	5,7
38	Standar Pembiayaan (SMP) (indeks)	5,4	5,1	5,3	5,5	5,6	5,8	6,1	6,1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
39	Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	31%	92%	93%	94%	95%	96%	96%	96%
40	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	93,30%	93,60%	94,10%	94,60%	95%	95,50%	96%	96%
41	Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (bulin)	2144	2155	2166	2177	2188	2199	2210	2210
42	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	5	1	6	6	6	6	6	6
43	Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun (desa)	0	0	1	1	1	1	1	1
44	Persentase jaringan irigasi wewenang Kabupaten dalam kondisi baik (%)	29,81%	33,57%	37,33%	41,09%	44,85%	48,61%	52,37%	52,37%

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
45	Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)	49,6%	50,45%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
46	Persentase rumah tangga berakses air bersih (%)	88,42	88,92	90	92	96	98	100	100
47	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi (%)	80,10	80,10	82	84	86	88	90	90
48	Persentase Kecamatan terlayani pengelolaan persampahan (%)	50%	50%	62.50%	75%	87.50%	100%	100%	100%
49	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,138	0,14	0,007	0,0067	0,0152	0,0045	0,0265	0,08

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
50	Jumlah Dokter Spesialis (Orang)	18	8	14	15	18	23	29	29
51	Persentase sekolah aman bencana (%)	0	0	4	6	8	10	12	40
52	Indeks pengendalian pencemaran Air	50,83	40	40.5	40.8	41	41.5	41.8	41.8
53	Indeks pengendalian pencemaran Udara	87,11	88,74	89.24	89.74	90.24	90.74	91.24	91.24
54	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	31	31.1	31.1	31.2	31.25	31.28	31.3	31.3
Fokus Layanan Urusan Pilihan									
55	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :								
	a. padi	33.490	33.500	35.500	37.600	39.800	42.100	44.500	44.500
	b. Jagung	5.565	5.600	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000	7.000
	d. Cabe Merah	38.87	38.87	40.813	42.854	44.996	47.246	49.609	52.089

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
56	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina (Desa)	-	-	-	1	2	2	2	2
57	Jumlah penumbuhan desa mandiri pangan	-	-	-	1	1	-	-	2
58	Jumlah lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dibina	-	-	2	2	2	2	2	2
59	Jumlah toko tani indonesia (TTI) yang dibina	-	-	2	2	2	2	2	2
60	Jumlah cadangan pangan yang pemerintah daerah (CCPD) yang disediakan (ton)	4	4	4	4	4	4	4	4
61	jumlah kelompok pekarangan pangan lestari P2L	5	11	6	6	6	6	6	41

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	penumbuhan (KWT)								
62	jumlah komoditi pangan yang teregistrasi (prima 3)	5	8	3	3	3	3	3	23
63	Jumlah pemeriksaan tingkat residu pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	1	2	2	2	2	2	2	2
64	Jumlah pembinaan kelompok pengembangan industri panga lokal	-	2	1	1	1	1	1	7
65	Produksi Perkebunan unggulan (ton)								
	a. Kopi	19.518	19.518,42	20.242,52	20.736,24	21.229,96	21.723,68	22.217,40	22.217,40
	b. Lada	1.298	1.378,11	1.479,06	1.501,47	1.523,88	1.546,29	1.568,70	1.568,70
	c. Kakao	46	84,5	64.80	97.00	103,7	110,4	117,1	117,1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
66	Rasio Penyuluh terhadap Poktan	15	14	10,4	9,4	8,6	7,8	7,1	7,1
67	Produksi daging ternak (ton)								
	b. Sapi Potong	118.8	91	120	130	140	150	160	160
	b. Kerbau	19	13	14	15	16	17	18	18
	c. Kambing	12	7.500	7.850	8.100	8.430	8.710	8.920	9.612
68	Produksi telur & susu								
	b. Telur Ayam Ras	173(ton)	173(ton)	185(ton)	198(ton)	212(ton)	227(ton)	243(ton)	243(ton)
	c. Telur Ayam Buras	2.880	2.880	3.168	3.484	3.832	4.125	4.636	4.636
	d. susu murni	30.000	30.000	32.000	34.000	35.000	37.000	38.000	39.000
69	Rasio Akseptor KB (%)	1:01	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
70	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang	28,45	28,45	27,02	25,67	24,39	23,17	22,01	22,01

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	melahirkan (%)								
71	Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/ Wirausaha Baru (WUB) yang dibangun	25	1	5	10	15	20	25	76
72	Jumlah KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	70	50	75	85	90	100	115	515
73	Jumlah Koperasi yang di revitalisasi (unit)	0	1	2	3	4	5	6	21
74	Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan permodalan dan peralatan (unit)	0	0	5	10	15	20	25	75
75	Jumlah pasar tradisional yang di	0	10	2	2	2	2	2	20

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	revitalisasi (unit)								
76	Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi (orang)	191	191	220	250	270	285	300	300
77	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha (orang)	50	50	75	100	125	150	200	200
78	Jumlah BUMDES yang dibentuk didesa tertinggal (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Jumlah BUMDES yang dibina dan dikembangkan didesa tertinggal	13	13	13	13	13	13	13	13

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	(unit)								
80	Persentase Aparat desa yang di tingkatkan kapasitasnya (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
81	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	1,200	1,200	2,000	4,120	6,200	8,050	10,300	10,300
82	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,27	67,67	74,43	81,19	81,19	81,19	100	81,19
83	Presentase perempuan yang duduk di jabatan Publik(%)	12%	12%	12%	2%	12%	12%	12%	12%
84	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan (%)	33,3%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
85	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani dan dilindungi (kasus)	41	25	20	15	15	15	15	15
86	Jumlah anak bermasalah dengan hukum yang dilayani dan dilindungi (orang)	35	25	20	15	15	15	15	15
87	Jumlah aplikasi elektronikper yang dikembangkan (aplikasi)	0	-	2	2	2	1	1	8
C	ASPEK DAYA SAING								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
88	Nilai Tukar Petani - NTP	97	100	101	102	102	103	103	103

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
89	Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras (gapoktan)	0	2	4	4	4	4	4	4
90	Jumlah petani yang ditingkatkan kemampuan dalam pengembangan usaha agribisnis (orang)	0	0	10	10	10	10	10	10
91	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (unit)	0	15	17	19	20	21	22	23
92	Jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan (jenis)	1	1	1	1	2	2	2	2
93	Jumlah kecamatan yang dikembangkan sentra industrinya	3	3	1	1	1	1	1	8

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	(sentra)								
Fokus Iklim Berinvestasi									
94	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu	83.52	88.605	88.781	88.957	89.133	89.309	89.485	89.485
95	Nilai Investasi (Rp trilyun)	0,03T	0,4 T	0,4 T	0,45 T	0,45 T	0,5 T	0,5 T	0,5 T
96	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani	121 izin	139 izin	139 izin	139 izin	120	120	125	125
97	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi (hari)	10 hari	10 hari	10 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari
98	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan / non	10 hari	10 hari	7 hari	7 hari	3 hari	2 hari	1 hari	1 hari

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	perizinan administrasi (hari)								
99	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	100%	100%	100%	100%	90	95	100%	100%
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur									
100	Persentase Pembangunan kawasan wisata <i>edutainment Taman Pintar (%)</i>	0%	0%	25%	40%	60%	75%	85%	85%
101	Persentasi Tingkat hunian hotel (%)	5%	5%	30%	40%	50%	70%	80%	80%
102	Rata-rata lama tinggal (hari)	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari	3 hari

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
103	Jumlah lokasi wisata yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN)	2	2	4	4	4	4	4	4
104	Jumlah jenis pariwisata daerah yang dikembangkan dan dipasarkan	1	1	2	4	4	4	5	5
105	Persentase peningkatan objek wisata unggulan	0%	20%	30%	40%	50%	70%	80%	80%
106	Persentase pembangunan sarana dan prasarana objek wisata	0%	20%	40%	40%	50%	70%	80%	80%
107	Persentase menggali potensi destinasi wisata	5%	15%	30%	50%	60%	70%	80%	80%

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
108	Persentase peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata	5%	20%	40%	40%	50%	80%	90%	90%
109	Jumlah ruas jalan lintas Kabupaten yang dikembangkan (ruas)	-	2	8	10	10	10	10	10
110	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi Darat (unit)	7,294	-	7,489	-	910	550	50	9,054
Fokus Sumber Daya Manusia									
111	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	10 kelompok	12 kelompok	12 kelompok

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
112	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten (orang)	295	295	295	295	295	295	295	295
113	Peringkat Prestasi Olahraga Berskala Nasional								
	a. PON	0	0	3	5	7	8	8	8
	b. POPNAS	0	0	5	5	6	8	8	8
	c. POPCANAS	0	0	5	5	6	8	8	8
	d. POSPENAS	0	0	3	5	6	8	8	8
	e. PORWIL	0	0	5	5	7	8	8	8
114	Jumlah Wasit/Pelatih/Juri	42	42	42	42	42	42	42	42

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
115	Persentase pejabat struktural Kab. Kepahiang yang telah mengikuti diklat kepemimpinan (%)								
	- Eselon II	24%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	64%
	- Eselon III	36%	36%	39%	43%	47%	50%	54%	54%
	- Eselon IV	8%	8%	9%	10%	11%	13%	14%	14%
116	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan (orang) :								
	- Spesialis Kedokteran	0 orang	0 Orang	2 orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	10 Orang
	- S2	5 orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	25 Orang
	- S3	0 orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
117	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah	C	C	CC	B	B	B	B	B

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Kabupaten								
118	Jumlah SKPD Kabupaten yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB (OPD)	5	5	7	10	15	20	25	25
119	Persentase ASN Kab. Kepahiang yang telah mengikuti diklat teknis/ fungsional	25%	40%	60%	53%	70%	80%	90%	100%
120	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
121	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	55	55	65	70	70	80	80	80

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
122	Persentase penempatan pejabat ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%) :								
	Eselon II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Eselon III	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Eselon IV	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%
123	Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	46%	46%	49%	52%	55%	59%	62%	62%
124	Jumlah kasus dan temuan (Kasus dan Temuan)	200	210	190	175	150	135	120	120

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
125	Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	3	3
126	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3	3

BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepahiang. RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021- 2026 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024. Sebagai tanggung jawab bersama, upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja, maka diperlukan peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan sikap mental, tekad dan semangat aparaturnya pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, dukungan DPRD Kabupaten Kepahiang, Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Pusat secara bertahap melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing.

BUPATI KEPAHANG,

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM.,IPU